

**STRATEGI KEBIJAKAN POLITIK PAN-ISLAMISME TURKI UTHMANI  
PADA MASA SULTAN ABDUL HAMID II (1876-1909 M)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Afifah Alawiyah**  
NIM. 201104040011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
OKTOBER 2023**



**STRATEGI KEBIJAKAN POLITIK PAN-ISLAMISME TURKI UTSMANI  
PADA MASA SULTAN ABDUL HAMID II (1876-1909 M)**

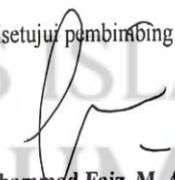
**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Oleh :

Afifah Alawiyah  
Nim:201104040011

Disetujui pembimbing



**Muhammad Faiz, M. A.**  
NIP. 198510312019031006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**STRATEGI KEBIJAKAN POLITIK PAN-ISLAMISME TURKI UTSMANI  
PADA MASA SULTAN ABDUL HAMID II (1876-1909 M)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 29 Mei 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Akhyat, S. Ag, M. Pd.**  
NIP. 197112172000031001

  
**Muhammad Arif Mustaqim, S. Sos, M. Sosio**  
NIP. 198711182023211016

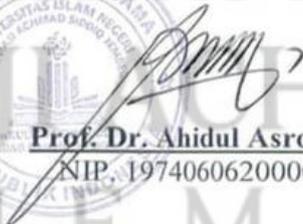
**Anggota:**

1. **Dr. H. Amin Fadlillah, SQ, M.A**
2. **Muhammad Faiz, M.A**

  
( )  
  
( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

  
**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

**MOTTO**

“Puncak dari ketinggian adab adalah saat engkau diam dan mendengarkan seseorang yang berbicara kepadamu, tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara dia tidak menguasainya”.<sup>1</sup>

(IBNU KHALDUN)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

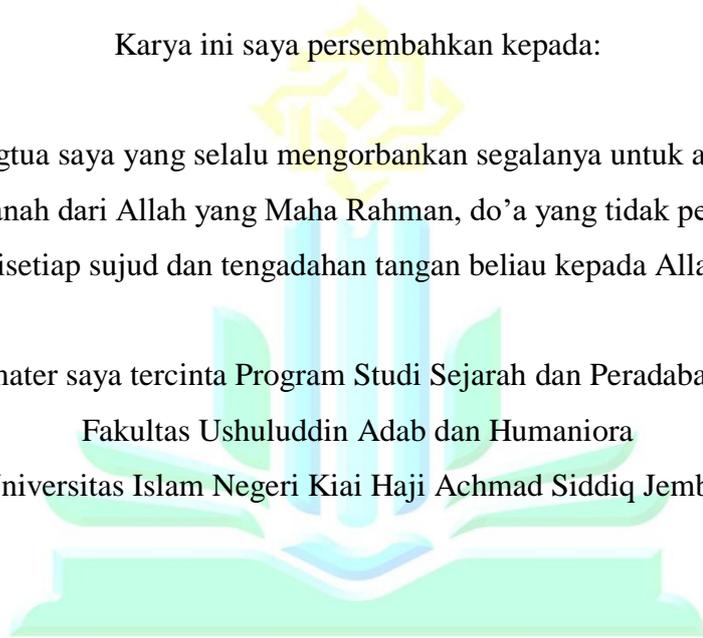
<sup>1</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Ilham, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011)

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya yang selalu mengorbankan segalanya untuk anaknya yang menjadi amanah dari Allah yang Maha Rahman, do'a yang tidak pernah terputus disetiap sujud dan tengadahan tangan beliau kepada Allah.

Almamater saya tercinta Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

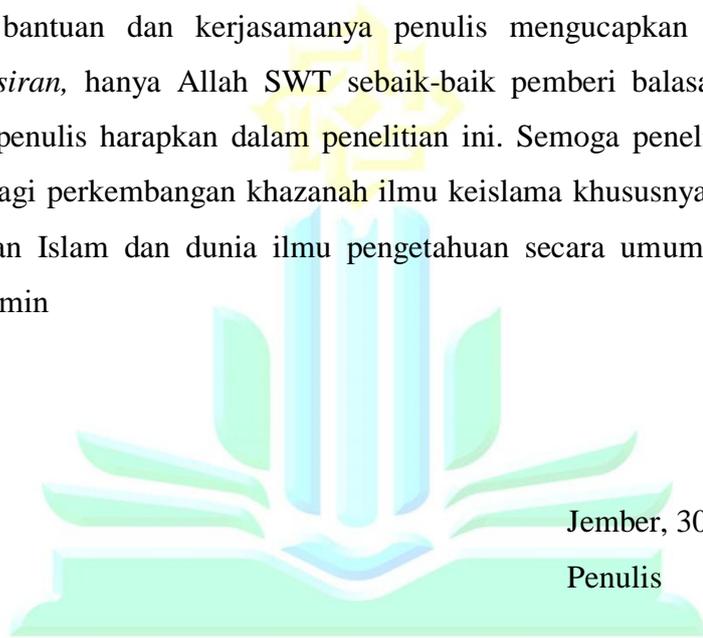
## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam bagi Rasulullah SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Puji syukur tidak terhingga dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Taufiq-Nya penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir Program S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M) dapat terselesaikan. Dalam penulisan karya ini penulis menyadari masih banyak bagian yang perlu dibenahi, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulisan karya-karya selanjutnya. Penelitian ini tidak lepas dari kontribusi semua guru, sahabat dan orang-orang terdekat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., MM., CPEM, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas seluruh kegiatan akademik
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas lainnya dalam penyelesaian skripsi ini
3. Dr. Win Ushuluddin Bernadien, M. Hum selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang telah mengayomi mahasiswa dalam melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
4. Dr. Akhiyat, M. Pd, selaku Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam yang telah meberikan ilmu serta arahan studi akademik selama masa studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Muhammad Faiz, M.A. selaku dosen pembimbing yang sudah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Arahan serta ilmu yang diberikan telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam melihat permasalahan dan implementasinya dalam sebuah laporan penelitian yang baik. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan

6. Seluruh dosen beserta staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan sampai selesai

Atas bantuan dan kerjasamanya penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*, hanya Allah SWT sebaik-baik pemberi balasan. Kritik dan saran selalu penulis harapkan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu keislama khususnya studi Sejarah dan Peradaban Islam dan dunia ilmu pengetahuan secara umum. Aamiin Yaa Robbal ‘Aalamin



Jember, 30 April 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD Afifah Alawiyah  
JEMBER NIM. 201104040011

## ABSTRAK

**Afifah Alawiyah. 2024:** *Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M)*

Sultan Abdul Hamid II diangkat menjadi Khalifah Daulah Utsmaniyah pada tanggal 31 Agustus 1876 Pada masa kepemimpinan Khalifah Daulah Utsmaniyah yang sebelumnya lebih condong ke Barat dan menyebabkan Daulah Utsmaniyah mengalami berbagai permasalahan, mulai dari westernisasi yang besar hingga terjadinya perubahan kondisi politik, sosial, dan keagamaan. Sultan Abdul Hamid II yang membawa pendekatan tersendiri dalam kepemimpinannya didalam pemerintahan dengan bermaksud mengembalikan kondisi Daulah Utsmaniyah dengan menyatukan seluruh umat Muslim seluruh dunia dibawah kekuasaannya, yang disebut dengan kebijakan politik Pan-Islamisme. Visi Pan-Islamisme sebagai sarana untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia, selaras dengan strateginya yang lebih luas untuk menstabilkan Turki Utsmaniyah selama periode tantangan yang signifikan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini ialah: 1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II? 2. Bagaimana strategi Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan kebijakan politik Pan-Islamisme terhadap Daulah Utsmaniyah? Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II dan menjelaskan menjelaskan strategi Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan kebijakan politik Pan-Islamisme terhadap Daulah Utsmaniyah. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kajian pustaka, dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang mencakup *heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi*. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berbasis primer dan sekunder, seperti arsip, tulisan, dan buku-buku yang mengkaji Turki Utsmani. Kemudian sumber-sumber tersebut dianalisis berdasarkan isinya dari data-data yang telah dikumpulkan, baik data primer dan sekunder.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa : 1.) latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal munculnya kebijakan Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah, akibat dari kemuduran pasca kekalahan perang. Sedangkan faktor eksternal dari munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah, Masuknya pemikiran Barat di dalam Daulah Utsmaniyah dan terjadinya penjajahan di wilayah-wilayah Islam. 2.) Strategi kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid yang digunakan dalam merealisasikan kebijakan Pan-Islamismenya, diantaranya ialah: a.) Strategi propaganda media massa, b.) Pengiriman konsuler ke berbagai wilayah-wilayah Muslim, c.) Pembangunan sistem transportasi, d.) Kampanye memajukan Pendidikan, dan e.) Strategi memajukan ekonomi

**Kata Kunci:** Strategi, Kebijakan Politik Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Studi Terdahulu .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	22
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II KONDISI DAULAH UTSMANIYAH MENJELANG MASA SULTAN ABDUL HAMID II.....	31
A. Daulah Utsmaniyah Dan Gelar Khalifah.....	31
B. Kondisi Sosial Politik .....	34
C. Nuansa Kebudayaan .....	43
D. Nuansa Keagamaan .....	45
BAB III KEBIJAKAN PAN-ISLAMISME SULTAN ABDUL HAMID II.....	50
A. Pengertian Pan-Islamisme .....	50
B. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II .....	55

C. Hubungan Konsep Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II Dengan Jamaluddin Al-Afghani.....	78
BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN PAN-ISLAMISME SULTAN ABDUL HAMID II.....	89
A. Strategi Propaganda Media Massa .....	89
B. Strategi Penyebaran Pan-Islamisme Melalui Pengiriman Konsuler.....	96
C. Pembangunan Sistem Transportasi.....	102
D. Kampanye Memajukan Pendidikan.....	106
E. Strategi Memajukan Ekonomi.....	114
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	124
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ARSIP-ARSIP DALAM PENELITIAN.....	133
BIOGRAFI PENULIS .....	141

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam berbagai catatan sejarah, diceritakan bahwa asal usul Kesultanan Utsmani dimulai sebelum tahun 1300 Masehi.<sup>2</sup> Entitas tangguh ini muncul di bawah kepemimpinan Osman Gazi bin Ertugrul, seorang tokoh terkemuka di wilayah Turki abad pertengahan. Osman dan pasukannya meraih kemenangan penting melawan 2.000 tentara Kristen Bizantium, kemudian menguasai kota Nicea (Izmir) pada tahun 1302 M. Momen penting ini menjadi tonggak berdirinya Negara Utsmani, yang kemudian diperintah oleh keturunan Osman Ghazi.<sup>3</sup> Luas wilayah Kesultanan Utsmaniyah cukup luas, meliputi Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara.<sup>4</sup>

Abad ke-15 menandai periode kemajuan signifikan bagi Kekaisaran Utsmani. Pada masa pemerintahan khalifah ketujuh, Sultan Muhammad II (1432-1481 M) Daulah Utsmaniyah menyaksikan puncak sejarah. Penaklukan Sultan Muhammad II meluas ke daratan Eropa, yang berpuncak pada penaklukan Konstantinopel, sebuah peristiwa penting yang memfasilitasi ekspansi Islam ke Eropa Timur. Kehormatan pembukaan Konstantinopel bagi Islam dianugerahkan kepada Sultan Utsmani muda,

---

<sup>2</sup> Masudul Hasan, *History of Islam Vol II* (Delhi: Adam Publisher and Distributer, 1995), 572

<sup>3</sup> Halil Inalcik, *The Utsmani Empire: The Classical Age 1300-1600* (London: Phoenix, 1995), 6

<sup>4</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 248

Sultan Muhammad II, yang dikenal sebagai Al-Fatih (Sang Penakluk), yang mengemban tugas besar ini pada usia 21 tahun. Hal ini menandai berdiri kokohnya Negara Utsmani, membuka jalan bagi perluasan lebih lanjut dan dakwah Islam.

Abad ke-16 menandai kelanjutan kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, terutama pada masa pemerintahan Sulaiman I (1494-1566 M), yang biasa dikenal dengan sebutan Yang Agung atau Yang Agung. Di bawah pemerintahannya, sebagian besar wilayah Hongaria berada di bawah kekuasaan Utsmani. Sulaiman I mengatur sejumlah penaklukan di Eropa, Asia, dan Afrika Utara, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pengaruh wilayah kekaisaran.<sup>5</sup> Daulah Utsmaniyah mengalami evolusi yang dinamis, ditandai dengan periode kemakmuran, perkembangan, kemajuan, dan kemunduran sesekali. Catatan sejarah Islam menggarisbawahi era Sulaiman Al-Qanuni sebagai puncak kekuasaan Utsmani. Sultan-sultan berikutnya mencapai berbagai tingkat keberhasilan, meskipun tidak mencapai puncak kejayaan pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, dan pada periode-periode berikutnya terjadi kemunduran dan melemahnya kesultanan secara bertahap.

Dalam konteks yurisprudensi Islam, Khilafah mewakili entitas politik yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan Islam berfungsi sebagai kerangka dasar negara. Misi kekhalifahan melibatkan penyebaran Islam secara global melalui dakwah (dakwah) dan jihad

---

<sup>5</sup> Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 2* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 241

(perjuangan).<sup>6</sup> Menurut teks fundamental mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab *Fath al-Qarib*, jihad dianggap sebagai kewajiban komunal yang dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara-negara Islam, sejak zaman Nabi Muhammad hingga Kesultanan Utsmaniyah, menganjurkan ekspansi militer ke *Dar al-harb* (wilayah non-Muslim) hingga masuk Islam atau tunduk pada Khilafah, disertai dengan pembayaran sejumlah uang. pajak atau *jizyah* (pajak pemungutan suara) bagi non-Muslim.

Seperti pada masa Sultan Salim I yang berhasil menaklukkan Mamluk di Mesir dan mewarisi jabatan Khalifah dari Daulah Abbasiyah pada tahun 1517 M, ia juga mendapatkan kewenangan untuk menjadi "Pelayan Dua Tanah Suci". Jadi, selain berhak untuk mengontrol Mekkah dan Madinah sebagai ritus umat Islam sedunia untuk melaksanakan ibadah haji, Daulah Utsmaniyah juga berkewajiban untuk mengamankan rute-rute menuju Tanah Suci, khususnya rute Laut Merah dan Samudera Hindia. Hal ini membuat Khalifah harus berhadapan dengan armada laut Portugis yang saat itu mencoba merebut kontrol perdagangan internasional di perairan Samudera Hindia.<sup>7</sup>

Kemudian pada masa Sultan Mehmet IV pada tahun 1648 M. Yang mana Sultan Mehmet IV diangkat menjadi Khalifah pada saat baru menginjak tujuh tahun, melihat hal ini negara-negara Eropa menjadikan sebagai kesempatan untuk memporak-porandakan hegemoni Khilafah.

---

<sup>6</sup> Taqi al-Din al-Nahbani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), 148

<sup>7</sup> Andrew Peacock, *From Anatolia to Aceh* (Oxford University Press, 2015)

Mereka membentuk aliansi yang terdiri dari Austria, Polandia, Venesia, Rusia, pendeta-pendeta Malta, dan paus di Roma yang mereka namakan sebagai aliansi suci (*Holy League*) untuk melawan Daulah Utsmaniyah.<sup>8</sup> Kekuatan Khilafah pada saat itu sedikit demi sedikit mulai melemah, apalagi semenjak penaklukan kota Vienna gagal pada tahun 1683 M. Setelah itu pasukan *Holy League* Eropa menghantam balik Daulah Utsmaniyah. Perjanjian Karlowitz ditandatangani pada tahun 1699 M, yang menandakan keberhasilan *Holy League* dalam merebut kembali Hungaria yang sebelumnya berada dibawah otoritas kekuasaan Islam.<sup>9</sup>

Pertempuran Daulah Utsmaniyah yang berlarut-larut dengan Rusia kemudian diakhiri di tahun 1774 M dengan perjanjian Kucuk Kaynarca. Dalam perjanjian ini, wilayah Krimea yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah kini menjadi wilayah merdeka. Namun begitu, penduduk Krimea yang beragama Islam tetap dapat memperlakukan Daulah Utsmaniyah seperti yang ditetapkan dalam agama, tetapi secara politik dan sipil, kaum Muslim Krimea bukanlah warga negara Khilafah. Hal ini merupakan awal upaya Barat untuk memisahkan potensi spiritual dan politik dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah.<sup>10</sup>

Konsep Khilafah, yang dihormati oleh para ulama sebagai institusi yang menjaga agama dan mengawasi urusan global, mengalami pengikisan

---

<sup>8</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 378

<sup>9</sup> Suraiya Faroghi, *The Utsmani Empire and The World Around I* (London: Bloomsbury Academic, 2004), 58

<sup>10</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda*, (Bogor: Komunitas Literasi Islam, 2021), 50

bertahap pada otoritasnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I (1823-1861 M). Sultan Abdul Majid I, penguasa Daulah Utsmani, memprakarsai sebuah gerakan resmi. menuju westernisasi dalam pemerintahan, menjadi ujung tombak penerapan sistem Tanzimat (Reformasi). Hal ini menandai era penting di mana Kekhalifahan Utsmaniyah mengadopsi banyak undang-undang yang dipengaruhi oleh model-model Barat.<sup>11</sup>

Di bawah pemerintahan Tanzimat, Kekhalifahan Utsmani melakukan serangkaian reformasi yang mencerminkan praktik Barat. Sultan Abdul Majid I menganjurkan integrasi Negara Utsmani ke dalam lingkup Eropa, mencari penerimaan dalam komunitas Eropa. Namun penerimaan ini datang dengan ketentuan yang ketat. Kesultanan Utsmaniyah diharuskan melepaskan Islam sebagai landasan hubungan internasionalnya dan mematuhi prinsip-prinsip "Hukum Publik Eropa".

Era Tanzimat menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Utsmani, khususnya mengenai ekspansi militer dan pertahanan melawan dinasti Muslim lainnya yang berjanji setia kepada Istanbul. Kekuasaan Utsmani dibatasi kemampuannya untuk terlibat dalam inisiatif kebijakan luar negeri aktif, termasuk intervensi militer, karena kendala hukum internasional yang melarang campur tangan dalam urusan negara berdaulat. Selain itu, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada umat Islam di luar wilayahnya yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Nicho Pandawa Trisakti, *Pasang Dan Surut Pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah Terhadap Hindia Belanda 1882-1928 (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)*

menjadi sasaran pemerintahan kolonial Eropa. Setelah rentang waktu 22 tahun di bawah rezim Tanzimat pimpinan Sultan Abdul Majid I, tampuk kepemimpinan beralih ke Sultan Abdul Aziz (1830-1876 M). Masa jabatan Sultan Abdul Aziz mencerminkan masa jabatan pendahulunya, yang ditandai dengan keterlibatan diplomatik yang luas dengan rekan-rekannya di Eropa dan penerapan reformasi yang cenderung berpihak pada model pemerintahan Barat.

Pada masa Sultan Abdul Aziz, dunia Islam sedang bergejolak dengan sederet peperangan kaum Muslim melawan Kolonialisme Eropa, salah satunya yang terjadi di Aceh pada tahun 1870 an. Seperti pada masa sultan sebelumnya, Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Aziz terjebak dilema antara tekanan diplomatik dari para duta besar Eropa agar tidak mencampuri urusan Belanda-Aceh, dan di satu sisi tuntutan publik Istanbul untuk menolong Muslim Aceh. Kemudian akhirnya, *Sadrazam* mengambil jalan tengah dengan hanya memberikan medali Osmani tingkat pertama untuk Sultan Aceh saat itu tanpa memberikan substansi dari permintaan Aceh yaitu bantuan militer, yang artinya para pejabat Utsmaniyah lebih condong kepada suara Belanda.

Dengan keputusan tersebut, maka Abd Al-Rahman al-Zahir, yang merupakan utusan Aceh saat itu sangat marah dan Khilafah Utsmaniyah dianggap mengorbankan orang-orang Aceh serta melawan hukum Al-Qur'an. Sejak Daulah Utsmaniyah tergabung dalam keluarga Eropa pada tahun 1856 M, elite negara Utsmaniyah mengubah struktur pemerintahan

menjadi sistem monarki parlementer, sebagaimana negara-negara Eropa yang lain. Maka dengan begitu, kekuasaan Sultan dibatasi oleh dewan kementerian yang dipimpin oleh *Sadrizam*, yang mana identik dengan jabatan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan Barat.<sup>12</sup> Kelompok yang bertanggungjawab dalam perubahan sistem pemerintahan ini ialah Utsmani Muda, yakni kelompok intelegensia Utsmaniyah yang banyak terpengaruh pemikiran Barat.<sup>13</sup> Maka dari sinilah kemudian semangat Pan-Islamisme yang di usung oleh Sultan Abdul Hamid II muncul.

Pada tahun 1876 M, pergeseran signifikan dalam kepemimpinan Utsmani terjadi ketika Midhat Pasha, seorang tokoh gerakan Freemason, mengatur pemecatan Sultan Abdul Aziz dari jabatannya. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran atas anggapan Sultan Abdul Aziz yang dianggap boros, yang sempat menjadi bahan perdebatan. Setelah Abdul Aziz dicopot, Sultan Murad V diangkat sebagai penggantinya (1876 M), meskipun masa jabatannya hanya berlangsung singkat selama 93 hari.

Pada tanggal 31 Agustus 1876 M, Sultan Abdul Hamid II mengambil peran sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah, menggantikan Sultan Murad V.<sup>14</sup> Sultan Abdul Hamid II membawa serta pendekatan tersendiri terhadap pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan. penggabungan cita-cita Barat ke dalam masyarakat Utsmani. Berbeda dengan beberapa orang sezamannya yang ingin mengadopsi peradaban

<sup>12</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda*, 63

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 105.

<sup>14</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013), 148.

Barat secara menyeluruh, Sultan Abdul Hamid II menyimpan keraguan. Ia percaya bahwa dunia Timur memiliki peradaban yang kaya, yang merupakan tantangan yang tangguh dari Barat.

Inti dari pemerintahan Sultan Abdul Hamid II adalah penolakannya yang gigih terhadap pengaruh Barat, terutama prinsip-prinsip demokrasi dan kerangka hukum yang ia anggap sebagai pengaruh asing. Ia menolak konsep-konsep seperti *Al-Masyruthiyah*, sebuah sistem dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah yang menentukan batas masa jabatan penguasa, dan menganggapnya sebagai gagasan impor Barat yang tidak sesuai dengan visinya.

Kebijakan Sultan Abdul Hamid II mempunyai banyak segi, mencakup reformasi pendidikan di mana sekolah-sekolah negeri ditempatkan di bawah pengawasan langsungnya. Dia memobilisasi lembaga-lembaga ini untuk memupuk persatuan Islam dan berkolaborasi dengan sekte-sekte Sufi, mencari kesetiaan mereka kepada Negara Utsmani. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempromosikan Pan-Islamisme, sebuah gerakan yang menganjurkan solidaritas antar negara-negara Islam dan memposisikan Istanbul sebagai pusat penting pengaruh Khilafah dan Sufi.<sup>15</sup> Tokoh terkenal seperti Jamaluddin Al-Afgani menggemakan seruan Sultan Abdul Hamid II untuk Pan-Islamisme, selaras dengan visi Sultan tentang front Islam yang bersatu dengan latar belakang meningkatnya kolonialisme internasional. Aspirasi Sultan Abdul Hamid II lebih dari sekadar konsolidasi

---

<sup>15</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Daulah Utsmaniyah, Faktor-Faktor Kebangkitan Dan Sebab Sebab Keruntuhannya* (Jakarta:Ummul Qura, 2017), 744-751

politik; mereka mencakup narasi solidaritas Islam yang lebih luas, menekankan pentingnya kekuatan kolektif dan otonomi dalam menghadapi tekanan eksternal.

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, sebuah istilah ideologis penting muncul dalam wacana Utsmani: Ittihat-t Islam, umumnya diterjemahkan sebagai Persatuan Islam, namun juga ditafsirkan oleh pers Eropa sebagai Pan-Islamisme, yang mewakili landasan agenda politik Sultan Abdul Hamid II. Visinya berpusat pada penggunaan Pan-Islamisme sebagai sarana untuk meremajakan dan menyatukan umat Islam di seluruh dunia, selaras dengan strateginya yang lebih luas untuk menstabilkan Turki Utsmaniyah selama periode tantangan yang signifikan.

Konsepsi Sultan Abdul Hamid II tentang Pan-Islamisme berasal dari keyakinan mendalam akan potensi Islam sebagai kekuatan pemersatu. Ia melihatnya sebagai alat politik untuk menjalin ikatan yang kuat di kalangan umat Islam, memupuk solidaritas dan pemberdayaan kolektif. Visi ini melampaui sekedar retorika; Sultan Abdul Hamid II secara aktif berupaya memanfaatkan posisinya sebagai Kekhalifahan untuk menggalang dukungan dan persatuan di antara komunitas Muslim secara global. Inti dari strategi Sultan Abdul Hamid II adalah pengakuan Islam sebagai kekuatan yang kuat dalam politik dalam negeri. Ia percaya bahwa dengan menekankan persatuan Islam, ia dapat memperkuat integritas teritorial dan kohesi internal di dalam Negara Utsmani. Pandangan strategis ini merupakan perubahan dari kesultanan-kesultanan sebelumnya yang menunjukkan

keterbukaan lebih besar terhadap pengaruh dan ideologi Barat. Kekhasan pendekatan Sultan Abdul Hamid II terhadap Eropa, khususnya dalam urusan politik, terlihat dari pengutamaannya terhadap Pan-Islamisme sebagai pilar kebijakan. Perbedaan dari sikap sultan-sultan sebelumnya ini menggarisbawahi kompleksitas dan kedalaman pemikiran politiknya, sehingga memicu minat ilmiah untuk mengeksplorasi nuansa dan implikasi kebijakan Pan-Islamisnya dalam kerangka pemerintahan Daulah Utsmaniyah.<sup>16</sup>

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti menemukan perbedaan cara pandang Sultan Abdul Hamid II terhadap Eropa, khususnya dalam bidang politik. Salah satu aspek yang menonjol adalah penerapan Pan-Islamisme sebagai kebijakan utama Kesultanan Utsmaniyah, yang menandai penyimpangan dari sultan-sultan sebelumnya yang menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap pengaruh Barat. Perbedaan dalam pendekatan Sultan Abdul Hamid II telah menarik minat peneliti, mendorong peneliti untuk mempelajari lebih dalam dan menganalisis seluk-beluk kebijakan Pan-Islamisnya di pemerintahan Utsmani.

## **B. Fokus Penelitian**

Apa saja yang dibahas dalam penelitian ini ialah mengenai bagaimana kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II serta

---

<sup>16</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda*, 67

bagaimana upaya Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan gagasan Pan-Islamisme dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II?
2. Bagaimana strategi Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan kebijakan politik Pan-Islamisme terhadap Daulah Utsmaniyah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II
2. Untuk menjelaskan strategi Sultan Abdul Hamid II dalam merealisasikan kebijakan politik Pan-Islamisme terhadap Daulah Utsmaniyah

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Kajian ini menggali konteks sejarah doktrin politik Pan-Islamisme di masa Kesultanan Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, dan mengeksplorasi upayanya untuk mengaktualisasikan ideologi tersebut. Penelitian ini menetapkan parameter spesifik untuk menyelidikannya, menggambarkan batas-batas temporal dan spasial untuk memastikan penyelidikan terfokus.

1. Ruang lingkup temporal, kajian ini memulai analisisnya dari tahun penting 1876 M, bertepatan dengan naiknya tahta Sultan Abdul Hamid II. Periode ini menandai dimulainya Pan-Islamisme di Kesultanan Utsmaniyah, yang terutama diperjuangkan oleh Sultan Abdul Hamid II sendiri. Penyelidikan ini berlangsung hingga tahun 1909 M, sebuah titik penting yang ditandai dengan keputusan Dewan Nasional untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II, tepatnya pada tanggal 27 April 1909 M.
2. Ruang lingkup spasial, penelitian ini membatasi kajiannya pada lanskap politik Pan-Islamisme di dalam Kekhalifahan Utsmani, dengan fokus utama pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Pembatasan spasial ini memastikan analisis terkonsentrasi terhadap kebijakan dan inisiatif yang berkaitan dengan Pan-Islamisme selama periode sejarah tertentu.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari upaya penelitian ini ada dua, mencakup bidang teoritis dan praktis

##### 1. Manfaat teoritis

Studi ini didedikasikan untuk mencermati dan menggambarkan lintasan sejarah doktrin politik Pan-Islamis di Kekaisaran Utsmani. Dengan menggali narasi sejarah ini, masyarakat luas dapat memperoleh wawasan berharga tentang asal usul ideologi Pan-Islamis dan strategi Sultan Abdul Hamid II dalam mengaktualisasikan doktrin-doktrin ini di

Kesultanan Utsmani. Oleh karena itu, penelitian ini siap menjadi gudang pengetahuan yang sangat diperlukan, menambah kekayaan intelektual masyarakat untuk anak cucu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan basis referensi yang kuat, menyempurnakan karya ilmiah selanjutnya sekaligus memperkaya wacana ilmiah tentang Kesultanan Utsmaniyah.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi penulis

Upaya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para penulis dan cendekiawan tentang paradigma politik Pan-Islamis pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan menjelaskan strategi yang digunakannya dalam mewujudkan cita-cita Pan-Islamis di Kekaisaran Utsmani.

### b. Bagi kalangan intelektual atau masyarakat

Di luar signifikansi ilmiahnya, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi substansial terhadap kumpulan pengetahuan sejarah Islam. Dengan menyoroti seluk-beluk Pan-Islamisme dalam konteks Utsmani, artikel ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat dan mendorong wacana yang lebih bernuansa tentang sejarah Islam.

## F. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tulisan dari peneliti lain yang lebih dahulu meneliti dan menulis tentang tema serupa dan terkait. Namun berbeda halnya dengan menyalin penelitian orang lain, penelitian terdahulu lebih berfokus pada perbandingan penelitian serta perbedaan dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu juga sebagai sumber referensi bagi penulis untuk menulis penelitian ini.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku yang ditulis dalam bentuk terjemahan oleh Masturi Ilham dan Mujiburrahman dengan judul "*Memoar Sultan Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi Fremasson dan Sekuler Liberal*" yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar pada tahun 2012. Buku ini menjelaskan wawasan unik mengenai catatan harian Sultan Abdul Hamid II tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahannya. Meskipun buku ini tidak memuat bab khusus mengenai strategi politik Sultan, buku ini memberikan informasi berharga mengenai upaya politiknya, termasuk dukungannya terhadap Pan-Islamisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam ideologi politik Sultan Abdul Hamid II, khususnya dengan fokus pada kebijakan Pan-Islamisnya. Eksplorasi ini akan mencakup kajian terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya strategi politik Pan-Islamisme pada masa Sultan Abdul Hamid II, serta

analisis taktik Sultan dalam menerapkan kebijakan tersebut di Negara Utsmani.

2. Buku yang ditulis oleh Karya Dr. Mehmet Maksudoglu dengan judul, *"The Untold History of Ottoman"* yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar pada tahun 2011. Buku ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ilmu sejarah, yang berisi pemahaman rinci tentang lintasan sejarah Daulah Utsmaniyah. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah terdapat sub-bab khusus yang menyelidiki masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah, bagian ini mencakup berbagai topik, mulai dari awal naiknya Sultan ke kekuasaan hingga kebijakan politiknya dan akhirnya turun takhta. Namun, meskipun mengeksplorasi secara menyeluruh masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, buku ini tidak secara spesifik membahas doktrin politik Pan-Islamisme yang diusung Sultan Abdul Hamid II. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ilmiah tersebut dengan menjelaskan kebijakan Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II, penelitian ini berupaya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ideologi Pan-Islamisme pada era Sultan Abdul Hamid II dan mendalami strategi yang digunakan Sultan untuk mewujudkan kebijakan tersebut di dalam Daulah Utsmaniyah.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Kusuma Rahmawati dengan judul *"Studi Historis Kebijakan Politik Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II"*

mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan mengenai seluk-beluk kebijakan politik luar negeri Sultan Abdul Hamid II. Berfokus pada pemerintahan Daulah Utsmaniyah, skripsi ini membahas mengenai analisis komprehensif mengenai strategi politik Sultan Abdul Hamid II, khususnya pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri. Sedangkan dalam penelitian ini mengupas tuntas faktor-faktor yang membentuk kebijakan politik pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, salah satunya kebijakan politik Pan-Islamisme. Melalui kajian yang cermat, penelitian ini menjelaskan bagaimana Sultan Abdul Hamid II menggunakan Pan-Islamisme sebagai alat strategis dalam kerangka politik Daulah Utsmaniyah. Dengan mengkaji sumber-sumber sejarah dan wawasan ilmiah, penelitian ini menyoroti nuansa pendekatan Sultan Abdul Hamid II terhadap Pan-Islamisme dan bagaimana hal itu terwujud dalam agenda kebijakan luar negerinya yang lebih luas. Dari skripsi ini, penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sejarah dan pertimbangan strategis yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik selama era penting dalam sejarah Utsmani.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nurfaizillah dengan judul “*Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam*” yang diterbitkan oleh Journal of Government and Social Science, Volume 6, Number 1 pada Oktober 2020. Jurnal ini membahas mengenai praktik politik yang

menjadi ciri di era ini, perbedaan tentang struktur kekuasaan dan mekanisme pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Salim III, merupakan periode penting dalam sejarah Utsmani, berbagai kekuatan politik bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Daulah Utsmaniyah. Khususnya, para ulama (cendekiawan Islam) dan bangsawan setempat muncul sebagai pemain penting, tindakan mereka seringkali bertujuan untuk mengekang kekuasaan absolut sultan. Jurnal ini menyoroti dinamika kekuatan-kekuatan politik, menyoroti peran mereka dalam membentuk kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Meskipun jurnal ini tidak secara khusus membahas pemerintahan Sultan Abdul Hamid II atau kebijakan Pan-Islamismenya, jurnal ini membuka peluang bagi diskusi yang lebih luas mengenai evolusi strategi politik di Negara Utsmani. Era Sultan Abdul Hamid II menyaksikan kebangkitan Pan-Islamisme sebagai ideologi politik, dengan implikasi besar terhadap pemerintahan dalam negeri dan hubungan internasional. Penelitian ini bermaksud untuk membahas lebih dalam mengenai kebijakan politik Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II terutama eksplorasi kemunculan Pan-Islamisme sebagai doktrin politik yang signifikan, faktor-faktor mendasar yang mendorong kebangkitannya, dan manuver strategis Sultan Abdul Hamid II dalam menyelaraskan kebijakannya dengan cita-cita Pan-Islamisme sambil menavigasi kompleksitas pemerintahan Utsmani dan tekanan eksternal.

5. Jurnal yang ditulis oleh Adib Khairil Mustafa dan Hanik Purwati dengan

judul “*Sejarah dan Transformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme*” yang diterbitkan oleh Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume 10, Nomer 1 pada Juli 2022. Dalam jurnal ini membahas lanskap sejarah dan politik yang kompleks di Turki, dengan fokus sekularisme dan Islamisme yang telah mendefinisikan politik Turki selama bertahun-tahun. Turki merupakan studi kasus unik dimana pertentangan antara cita-cita sekuler dan aspirasi Islam telah membentuk arah politik negara tersebut. Jurnal ini mengkaji evolusi politik Turki, terutama di tengah latar belakang masyarakat yang semakin condong ke arah sekularisme. Terlepas dari tren ini, kelompok Islamis kembali muncul di kancah politik Turki, menghidupkan kembali perdebatan tentang peran agama dalam pemerintahan. Pertentangan antara sekularisme dan Islamisme berakar kuat pada tradisi politik Turki, yang mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara modernitas dan nilai-nilai tradisional di masyarakat mayoritas Muslim. Adapun yang membedakan jurnal dengan penelitian ini adalah fokusnya terhadap dinamika politik di masa pemerintahan Utsmani, khususnya mengenai kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya ideologi politik Pan-Islamisme, pendekatan strategis Sultan Abdul Hamid II dalam mewujudkan kebijakan politik Pan-Islamisme.

6. Jurnal yang ditulis oleh Duriana dengan judul “*Pemikiran Politik Turki Utsmani Hingga Masa Modern*” yang diterbitkan oleh Jurnal Pemikiran

Islam dan Ilmu Sosial Islam, Volume 11, Nomor 2. Jurnal ini memaparkan eksplorasi pemikiran politik Turki Utsmani secara komprehensif dari awal berdirinya hingga era modern. Jurnal ini berisi wawasan mengenai evolusi pemikiran Turki Utsmani dalam bidang politik, mengkaji berbagai dimensi pemikiran Turki Utsmani yang mencakup berbagai bidang termasuk militer dan pemerintahan, sains dan budaya, serta wacana keagamaan dan memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana ideologi politik dan kerangka filosofis membentuk lintasan Kesultanan Utsmani, memengaruhi struktur pemerintahan dan norma-norma masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi kebijakan politik khususnya doktrin politik Pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh Sultan Abdul Hamid II, faktor-faktor yang memicu munculnya ideologi politik Pan-Islamis di lingkungan Utsmani, dan manuver strategis Sultan Abdul Hamid II dalam mewujudkan agenda politik Pan-Islamismenya.

7. Jurnal yang ditulis oleh Sitti Nurtina, seorang sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul "*The Dynamics of Applying Pan-Islamism as A New Politic Concept*" yang diterbitkan oleh Journal of Islamic Word and Politics, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019. Jurnal ini berisi analisis yang signifikan dalam menggali Pan-Islamisme sebagai konsep politik baru, dengan fokus khusus pada perkembangannya pada era Sultan Abdul Hamid II di masa Kesultanan Utsmaniyah. Dalam pembahasan awalnya, Jurnal ini memberikan

gambaran singkat tentang konteks sejarah seputar Pan-Islamisme dan penerimaannya di kalangan pemikir Islam pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Ia menyinggung tahap-tahap awal kebijakan politik Pan-Islamisme dan beragam pendapat di kalangan intelektual Islam mengenai konsep yang muncul ini. Jurnal ini menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pan-Islamisme secara luas, dan menyoroti keterbatasan jangkauannya meskipun memiliki signifikansi ideologis. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam seluk-beluk kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya ideologi Pan-Islamis pada era Sultan Abdul Hamid II, serta pendekatan strategis Sultan Abdul Hamid II dalam mewujudkan agenda politik Pan-Islamisme terhadap Daulah Utsmaniyah.

8. Skripsi yang ditulis oleh Luqman Al-Hakim dengan judul “*Sejarah Jaringan Sekularisme Dalam Tubuh Kekhalifahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II*” mahasiswa jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2020. Skripsi ini menyoroti dinamika rumit ideologi sekuler dalam konteks Turki Utsmani, dengan fokus khusus pada upaya Sultan Abdul Hamid II untuk menavigasi dan memperkuat pemahaman sekularisme, khususnya melalui kebijakan politik Pan-Islamisme. Skripsi ini dimulai dengan membahas latar belakang sejarah sekularisme di dalam Kekhalifahan Utsmani, menyoroti berbagai

interpretasi dan tantangan seputar kerangka ideologis ini. Di dalam skripsi ini menggali nuansa pendekatan Sultan Abdul Hamid II terhadap sekularisme, menjelaskan bagaimana Sultan menggunakan Pan-Islamisme sebagai alat strategis untuk menegakkan aspek-aspek tertentu dari pemerintahan sekuler sambil mempertahankan etos Islam Khilafah. Salah satu titik kunci konvergensi dengan penelitian sebelumnya terletak pada eksplorasi rinci kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II. Kebijakan ini menjadi benteng sekularisme di Kesultanan Utsmaniyah, yang menunjukkan interaksi kompleks antara prinsip-prinsip agama dan praktik pemerintahan modern pada era tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong munculnya ideologi Pan-Islamisme dan upaya bersama Sultan untuk mewujudkan kebijakan politik ini dalam konteks Negara Utsmani yang sedang berkembang. Inti dari penelitian ini adalah kajian kritis terhadap strategi Sultan Abdul Hamid II dalam mempromosikan dan menerapkan Pan-Islamisme sebagai doktrin politik.

9. Skripsi yang ditulis oleh Sutrisno dengan judul "*Konsep Pan-Islamisme menurut Jamaluddin Al-Afghani*" mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mendalami konsep mendalam Pan-Islamisme yang dikemukakan Jamaluddin Al-Afghani. Skripsi ini menavigasi lanskap sejarah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan membahas narasi kebangkitan Islam melalui kacamata Pan-Islamisme. Adapun penelitian

ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsekuensi politik Pan-Islamisme dalam konteks Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dengan membahas berbagai faktor yang memunculkan Pan-Islamisme dan menyoroti visi strategis Sultan Abdul Hamid II dalam mewujudkan kebijakan Pan-Islamis terhadap Daulah Utsmaniyah.

10. Skripsi yang ditulis oleh I'in Sayyi Mawarti dengan judul "*Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhalifahan Turki Utsmani Tahun 1876-1909*" mahasiswa jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023. Skripsi ini membahas mengenai Pan-Islamisme dan upaya Sultan Abdul Hamid II untuk mempertahankan Kekhalifahan Utsmani. Skripsi ini berfungsi sebagai eksplorasi dimensi politik dan ideologi seputar pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dan keterlibatan strategisnya dengan Pan-Islamisme. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong Pan-Islamisme sebagai salah satu kebijakan politik Turki Utsmani, serta menyelidiki manuver strategis yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II untuk mewujudkan kebijakan Pan-Islamisme di Turki Utsmani.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam upaya penelitian berfungsi sebagai segmen penting yang menjelaskan istilah-istilah penting yang

menggambarkan titik fokus penelitian. Dengan mendefinisikan istilah-istilah ini, kerangka ini bertujuan untuk mencegah salah tafsir maknanya dalam konteks penelitian. Di sinilah letak istilah-istilah kunci yang digunakan oleh peneliti:

### 1. Kebijakan

Kebijakan merangkum serangkaian keputusan yang diatur oleh individu atau entitas politik untuk menggambarkan tujuan dan metode untuk mewujudkan tujuan tersebut.<sup>17</sup>

### 2. Politik

Dalam analisis ilmiah yang dikemukakan Mariam Budiardjo, politik berarti spektrum aktivitas dalam suatu sistem politik atau negara-bangsa yang mencakup proses penentuan tujuan dan pelaksanaan selanjutnya.<sup>18</sup> Dalam upaya ini, negara mempunyai kekuasaan dan wewenang, yang dapat dimanfaatkan untuk memupuk kerja sama dan mengurangi konflik yang mungkin timbul, terkadang melalui cara persuasif atau, terkadang, melalui tindakan koersif, semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, politik dapat diartikan sebagai rangkaian interaksi yang diprakarsai oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap masyarakatnya.

### 3. Pan-Islamisme

Pan-Islamisme mengacu pada ideologi yang menganjurkan persatuan umat Islam, di mana umat Islam ditafsirkan sebagai

<sup>17</sup> Achmad fanan, *Kamus Istilah Populer* (Jakarta : Mitra Pelajar, 2012), 256

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 8

masyarakat Islam. Masyarakat ini mewujudkan suatu kolektif yang bercirikan kesamaan kebiasaan, tradisi, sikap, dan rasa persatuan yang diikat oleh benang merah Islam. Menurut Ali Syari'ati, masyarakat Islam adalah suatu ummat, suatu komunitas yang berhijrah dan saling mendukung dalam mengejar aspirasi bersama. Hal ini sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Sultan Abdul Hamid II pada masa Utsmani, yang dikemas dalam konsep Pan-Islamisme yang bergema di wilayah Utsmani.<sup>19</sup>

#### 4. Turki Utsmani

Turki Utsmani berdiri sebagai kekhalifahan bersejarah yang didirikan oleh Usman, putra Ertugrul, dengan pusatnya di Istanbul dan mencakup wilayah luas yang mencakup Asia, Afrika, dan Eropa. Kota ini mempunyai populasi yang besar dan menandai pemerintahan terlama dari tahun 1300 hingga 1924 M.<sup>20</sup>

#### 5. Sultan Abdul Hamid II

Sultan Abdul Hamid II, Sultan Utsmani Türkiye ke-34, lahir pada tanggal 21 September 1842 dan meninggal pada tanggal 10 Februari 1918, naik takhta pada tanggal 31 Agustus 1876, menggantikan saudaranya Murad V. Masa jabatannya menandai era penting dalam sejarah Utsmani, ditandai dengan pembelaannya terhadap Pan-

<sup>19</sup> Agus Ahmad Saefi, *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 74

<sup>20</sup> Colin Imber, *Kerajaan Utsmani 1300-1650 Struktur Kekuasaan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5

Islamisme dan kontribusinya terhadap warisan Utsmani.<sup>21</sup>

## 6. Teori Agresivitas

Dalam kerangka teori, penulis menggunakan teori agresivitas menurut Robert Baron. Dalam teorinya, Robert Baron menjelaskan bahwa terjadinya penyerangan oleh pihak yang berseteru terhadap pihak lain guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud ialah pihak yang diserang menerima kehendak penyerang dan menanamkan pengaruhnya di daerah taklukan.<sup>22</sup> Secara umum agresi dalam teori Robert Baron memiliki berbagai jenis, salah satunya agresi *Instrumental aggression*, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain. Agresi disini hanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. *Instrumental aggression* tidak bertujuan untuk melukai, merusak, atau merugikan, akan tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan lainnya. Agresi yang dilakukan disebabkan oleh adanya kekhawatiran terhadap eksistensinya, mempertahankan citra diri, mempertinggi kekuatan serta adanya dominasi pihak penyerang terhadap pihak yang diserang.<sup>23</sup>

Daulah Utsmaniyah melakukan agresi atau penyerangan terhadap segala bentuk permasalahan yang ada didalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah pada saat itu, dengan melakukan berbagai strategi kebijakan politik Pan-Islamisme pada saat kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II, kebijakan ini sebagai salah satu penyerangan terhadap orang-

<sup>21</sup> Muhammad Syafii Antonio dan Tim Tazkia, *Ensiklopedia Peradaban Islam Istanbul* (Jakarta: Tazkiya Publishing, 2012), 218

<sup>22</sup> Leonard Berkowitz, *Agresi I: Sebab dan Akibatnya* (Jakarta: Pustaka Binaan Persido, 1995), 6

<sup>23</sup> Taqiyuddin An-Nahbani, *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq (Jakarta: HTI Press, 2006), 197

orang Barat sekaligus respon atas segala bentuk kolonisasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, masuknya pemikiran Barat dalam wilayah Kekhalifahan Daulah Utsmaniyah, dan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap wilayah Daulah Utsmaniyah. Bentuk strategi kebijakan Pan-Islamisme yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II salah satu diantaranya ialah dengan mengirimkan konsuler dikirim ke wilayah-wilayah yang dianggap rentan terhadap pengaruh gagasan Barat, kemudian para petugas konsuler ini bertindak di bawah arahan Sultan Abdul Hamid II, dengan memulai kunjungan strategis untuk memperkuat struktur Islamisme Utsmani di seluruh dunia Islam.

Agresi yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II dalam Daulah Usmaniyah dengan berbagai strategi kebijakan politik Pan-Islamisme adalah sebagai bentuk pertahanan untuk menjaga stabilitas politik Daulah Utsmaniyah, keagamaan, sosial, dan sebagainya yang pada saat itu di dominasi Eropa sekaligus untuk memperjuangkan persatuan umat Islam di bawah Kekhalifahan sehingga akan memperkuat ikatan masyarakat, bentuk kekhawatiran Sultan Abdul Hamid II dengan dominasi orang-orang Eropa terhadap wilayah Daulah Utsmaniyah pada saat itu.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup kerangka kerja rinci atau pendekatan sistematis yang bertujuan memperoleh data untuk tujuan penelitian.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus khusus pada analisis kritis yang berkaitan dengan sejarah Kesultanan Utsmani. Metodologi penelitian tersebut menggabungkan teknik seperti penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, tesis, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, metode penelitian sejarah digunakan, mengikuti proses terstruktur yang terdiri dari eksplorasi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

### 1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam setiap upaya penelitian. Hal ini memerlukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang penting untuk penelitian, yang selaras dengan metodologi sejarah. Dalam penelitian ini sumber yang digunakan meliputi berbagai bahan tertulis seperti buku, ensiklopedia, majalah, sumber online, dan lain-lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

### 2. Verifikasi

Verifikasi merupakan penilaian kritis terhadap sumber yang diperoleh dalam konteks penelitian. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi kredibilitas dan validitas data yang dikumpulkan. Kritik

---

<sup>24</sup> Dr. Eng. Lilya Susanti, *Modul Metode Penelitian* (Departemen Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, 2016)

sumber terdiri dari dimensi internal dan eksternal:

- a. Kritik intern, melibatkan penelusuran isi sumber dan membandingkannya dengan tulisan lain untuk memastikan keakuratan data.
- b. Kritik ekstern, yaitu menyelidiki keaslian sumber dengan memeriksa atribut fisik dan melakukan pengujian.<sup>25</sup>

### 3. Interpretasi

Interpretasi, juga disebut sebagai analisis, melibatkan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap sumber-sumber sejarah. Tujuannya adalah untuk memperoleh fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber tersebut dan mensintesisikannya menjadi sebuah narasi yang kohesif.<sup>26</sup> Interpretasi mencakup dua aspek utama:

- a. Analisis, melibatkan deskripsi dan penjelasan sumber-sumber sejarah untuk memastikan dasar faktualnya dalam suatu peristiwa sejarah.
- b. Sintesis, mengintegrasikan fakta sejarah dari berbagai sumber untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

### 4. Historiografi

Historiografi menandai puncak penelitian sejarah, menawarkan gambaran menyeluruh tentang proses penelitian. Fase ini mengharuskan kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan, termasuk ketepatan linguistik, liputan sejarah yang komprehensif, dan penyajian fakta dan

<sup>25</sup> Rizka Kusuma Rahmawati, *Strategi Kebijakan Politik Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II Di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 13

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 102

argumen sejarah yang diteliti.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memastikan koherensi dan kejelasan dalam eksposisi, menawarkan pendekatan yang metodis dan terorganisir terhadap pokok bahasan. Metode ini membagi isi menjadi bab-bab yang kohesif dan saling mendukung satu sama lain, sehingga memudahkan pembahasan secara komprehensif. Kerangka struktural wacana ini terungkap sebagai berikut:

### **1. BAB I**

Bab pendahuluan berfungsi sebagai kerangka dasar, menggambarkan latar belakang penyelidikan, merumuskan pernyataan masalah, mengartikulasikan tujuan dan kegunaan, melakukan tinjauan literatur, menetapkan landasan teoritis, merinci metodologi penelitian, dan memulai wacana terstruktur. Laporan ini memberikan gambaran umum keseluruhan kumpulan temuan penelitian, yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk pertimbangan selanjutnya.

### **2. BAB II**

Bab kedua mendalami era Kesultanan Utsmaniyah sebelum Sultan Abdul Hamid II, menguraikan struktur sosio-politik, peradani budaya, dan lingkungan keagamaannya. Penjelasan ini memberikan landasan untuk memahami agenda politik Pan-Islam Sultan Abdul Hamid II, yang menjadi titik fokus pembahasan selanjutnya.

### 3. BAB III

Bab ketiga merupakan inti dari penyelidikan ini, menyelidiki faktor-faktor mendasar yang mendorong Sultan Abdul Hamid II mengadopsi Pan-Islamisme sebagai strategi politik. Ini mewakili dorongan utama dari upaya peneliti, menawarkan eksplorasi mendalam terhadap doktrin politik Pan-Islam Sultan Abdul Hamid II.

### 4. BAB IV

Bab keempat menggambarkan manuver taktis Sultan Abdul Hamid II dalam mewujudkan visi Pan-Islam di wilayah Utsmani.

### 5. BAB V

Bab penutup merangkum temuan-temuan penyelidikan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan mengenai Kebijakan Politik Pan-Islam Abdul Hamid II di Kekaisaran Utsmani. Selain itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas struktural wacana, sehingga mendorong produksi upaya penelitian di masa depan dengan tema serupa.

**BAB II**  
**KONDISI DAULAH UTSMANIYAH MENJELANG MASA**  
**SULTAN ABDUL HAMID II**

**A. Daulah Utsmaniyah Dan Gelar Khalifah**

Selama Abad Pertengahan, kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Osman Gazi bin Ertugrul menandai babak penting dalam sejarah Turki. Kehebatan militer Osman ditunjukkan dalam kemenangan telak atas pasukan Kristen Bizantium, di mana ia dan pasukannya mengalahkan 2.000 tentara dan merebut kota Nicea (sekarang Iznik, Republik Turki) pada tahun 1302 M. Peristiwa penting ini menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Utsmani.<sup>27</sup>

Kesultanan Utsmaniyah, meski memiliki kekuatan tersendiri, merupakan bagian dari negara-negara Islam yang lebih luas pada era tersebut. Yang menonjol di antaranya adalah Dinasti Mamluk di Mesir, Suriah, dan Hijaz; Timuriyyah di Transoxania dan Persia; Mariniyyun di Maroko; dan Sumatra Pasai dalam bahasa Melayu, antara lain. Masing-masing dinasti ini memiliki kekuasaan otonom dalam wilayahnya masing-masing, namun mereka mengakui dan tetap setia kepada otoritas penuh Kekhalifahan Abbasiyah, yang memegang kekuasaan sebagai pemimpin spiritual dan simbolis dunia Muslim yang sah pada periode tersebut.

Walaupun Khalifah Abbasiyah mempunyai peran utama dalam hal

---

<sup>27</sup> Halil Inalcik, *The Utsmani Empire: The Classical Age 1300-1600* (London: Phoenix, 1995), 6

spiritual, yang dilambangkan dengan penyebutan dalam khotbah Jumat dan prasasti mata uang, pengaruh mereka jauh melampaui sekedar simbolisme. Dinasti Mamluk, yang berpusat di Mesir, khususnya memegang kekuasaan sebagai titik fokus pemerintahan Islam di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah. Penaklukan bersejarah Konstantinopel pada tahun 1453 M oleh Sultan Mehmet II, yang juga dikenal sebagai Sultan Al-Fatih, menandai era baru bagi Kesultanan Utsmaniyah. Kemenangan ini menyebabkan perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan di dunia Islam. Sultan Mehmet II, setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya atas Konstantinopel, mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Mamluk Sultan Inal yang baru dinobatkan. Sikap tersebut mencerminkan kesopanan diplomatik dan pengakuan atas kedudukan Sultan Mamluk dalam komunitas Islam.<sup>28</sup>

Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Bayezid II (1481-1512 M), Mamluk dan Utsmaniyah kembali menjalin hubungan baik, dikarenakan keduanya saling membutuhkan untuk melawan Dinasti Syafawiyah di Persia yang pada saat itu Dinasti Syafawiyah mendukung penyebaran sekte Syi'ah. Namun kondisi tersebut menjadi berbalik ketika Sultan Salim I naik tahta pada tahun 1512 M. Hubungan Mamluk dengan Daulah Utsmaniyah semakin memburuk, khususnya setelah anak-anak dari pangeran Ahmet, yaitu Sulayman dan Alauddin yang mengancam kedudukan Sultan Salim I mengungsi ke Kairo di bawah perlindungan Sultan Al-Asyraf Qansuh Al-Gawri dari Mamluk.

---

<sup>28</sup>Nicho Pandawa, *Khilafah*, 37

Hal tersebut kemudian membuat Sultan Salim I menjadi marah, sampai kemudian terjadi peperangan antara Mamluk dan Utsmaniyah di medan Marj Dabiq. Dimana Khalifah Al-Mutawakkil III yang merupakan pasukan Sultan Al-Asyraf Qansuh Al-Gawri dari Mamluk amat kewalahan menghadapi pasukan Sultan Salim I yang Tangguh dengan teknologi senapan yang digunakan oleh pasukan Utsmaniyah pada saat itu.<sup>29</sup> Yang akhirnya menetapkan pasukan Utsmaniyah sebagai pemenang. Sultan Al-Asyraf Qansuh Al-Gawri terbunuh dalam pertempuran, sedangkan Sultan Salim I tetap melanjutkan kampanye militernya menuju Kairo untuk menumpas sisa-sisa kekuatan Mamluk yang pada saat itu dipimpin oleh Tumabay.

Hingga kemudian pada Januari 1517 M Tumabay berhasil di eksekusi dan Sultan Salim I berhasil menjadikan Mesir sebagai wilayah baru kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Sultan Salim I kemudian Kembali ke Istanbul dengan membawa Al-Mutawakkil III, kemudian pada Juli 1517 M, Syarif Mekkah mengirimkan kunci Ka'bah sebaga simbol transisi politik kepada Utsmaniyah. Sejak saat itu, maka Hijaz juga menjadi wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah.

Maka kemudian, Sultan Salim I menerima gelar dan legitimasi sebagai Khalifah dari al-Mutawakkil III, ada perbedaan pendapat mengenai prosesi pemberian gelar ini kepada Sultan Salim I, ada yang mengatakan prosesi ini berlangsung di Masjid Aya Sophia di Istanbul, kemudian ada

---

<sup>29</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 38

juga yang mengatakan berlangsung di Masjid Agung Aleppo pasca pertempuran Marj Dabiq. Yang jelas, dengan diberikannya gelar dan legitimasi sebagai Khalifah dari al-Mutawakkil III kepada Sultan Salim I, maka Daulah Utsmaniyah sudah bukan lagi sekedar negara tapal batas antara dunia Islam dengan Eropa, akan tetapi juga sebagai Khilafah Islamiyyah. Sultan-sultan Daulah Utsmaniyah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga tapal batas wilayah Islam di perbatasan Eropa, akan tetapi sekaligus pelindung Kaum Muslimin di seluruh dunia.<sup>30</sup>

Sejak masa Sultan Salim I sampai keruntuhan Daulah Utsmaniyah yakni tahun 1924 M, para penguasa Utsmaniyah digelar “Khalifah yang agung” dalam berbagai dokumen resminya, serta diakui oleh penguasa Muslim di belahan bumi lain untuk mengakui mereka sebagai Khalifah yang sebenarnya untuk dunia Islam. Kaum Muslim menyebut para penguasa Utsmaniyah dengan gelar Sultan, atau gelar dari Bahasa Persia, “Padisah” yang berarti “Raja yang Agung”.

## **B. Kondisi Sosial Politik**

Dalam ranah yurisprudensi Islam, konsep Khilafah berarti sebuah entitas politik yang prinsip-prinsip Islamnya menjadi pilar dasar pemerintahan. Dari perspektif regional, para ulama fiqh membedakan dua kategori berbeda: wilayah Islam (Dar al-Islam) dan zona perang (Dar Harb). Kriteria untuk mengategorikan suatu wilayah ke dalam salah satu kategori

---

<sup>30</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 40

tersebut bergantung pada dua faktor utama: pertama, penerapan hukum Islam di wilayah tersebut, dan kedua, penguasaan kekuasaan dan keamanan oleh umat Islam di wilayah tersebut. Jika kedua kriteria ini terpenuhi, wilayah tersebut dianggap sebagai wilayah Islam (*Dar al-Islam*), sebaliknya jika salah satu atau kedua unsur tersebut tidak ada maka diklasifikasikan sebagai zona perang (*Dar Harb*).<sup>31</sup>

Salah satu aspek kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh negara-negara Khilafah secara historis melibatkan dakwah Islam secara global melalui dakwah (ajakan masuk Islam) dan jihad (perjuangan atau upaya). Prinsip ini disebutkan dalam teks-teks dasar yurisprudensi Islam seperti *Fath al-Qarib*, yang menggarisbawahi kewajiban komunal (*fardu kifayah*) jihad, yang dilakukan setiap tahun di kalangan umat Islam.<sup>32</sup> Akibatnya, negara-negara Islam, mulai dari era Nabi Muhammad hingga masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, secara konsisten melakukan kampanye militer ke wilayah *Dar al-Harb* (daerah yang tidak berada di bawah kekuasaan Islam) sampai penduduknya memeluk Islam atau mengakui supremasi Khilafah. membayar jizyah, pajak yang dikenakan pada non-Muslim.

Penting untuk diklarifikasi bahwa konsep jihad dalam konteks ini berkaitan dengan peperangan defensif dan bukan agresi ofensif. Perbedaan ini sejalan dengan perintah Al-Quran yang menekankan sifat defensif jihad,

---

<sup>31</sup>An-Nahbani, Taqiyuddin, *Keperibadian Islam (al-Syakhsyiyah al-Islamiyyah)* (Jakarta: Hizbut Tahrir 2014), 250-251

<sup>32</sup> Muhammad bin Qasim al-Gazi, "Syarh Fath al-Qarib al-Mujib", dalam <https://onsearch.id/Record/IOS17064.25077> (9 Juli 2015)

seperti yang dicontohkan dalam ayat: “(wa ma arsalnaka illa kaffatan l al-nas baysiran wa naziran)”

Yang artinya: “Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) melainkan kepada umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.”<sup>33</sup> Begitu pula dalam sebuah hadist Rasulullah saw bersabda: “(umirtu an uqatila al-nas hatta yasyhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasul Allah wa yuqimu al-salah wa yu'tu al-zakah fa iza fa'alu zalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqq al-islam wa hisabuhum 'ala Allah)” Yang artinya:

Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak di sembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, dan membayar zakat. Bila mereka lakukan itu, maka darah dan harta mereka aka naman dariku, kecuali yang sesuai dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah.

Oleh karena itu, sepanjang evolusi politik dari era kenabian hingga puncak Kesultanan Utsmaniyah, Daulah Islam menganut kebijakan strategis dengan memperluas wilayah Dar al-Harb hingga mereka bersedia menerima Islam atau mengakui otoritas Khilafah, sehingga berkontribusi terhadap narasi yang lebih luas tentang pemerintahan Islam dan konsolidasi teritorial dalam konteks sejarah.

Daulah Utsmaniyah berdiri sebagai bukti kemegahan kekaisaran di masa lalu, dengan wilayah luas yang membentang di tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Keberagamannya yang luar biasa mencakup populasi yang bercirikan mosaik etnis, agama, dan budaya, yang memimpin periode

---

<sup>33</sup> Qs. Saba (34) : 28

kekuasaan yang panjang. Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Roma dan Eropa, Kesultanan Utsmaniyah memiliki banyak keunggulan di berbagai bidang.

Asal usul kekaisaran yang tangguh ini dapat ditelusuri kembali ke pendirinya yang visioner, Osman, yang kepemimpinannya tidak hanya melahirkan kekaisaran tetapi juga menganugerahkan nama yang disandangnya hingga hari ini. Di bawah kepemimpinan putra Osman, Orhan, selama periode 1324-1359 M, kesultanan yang baru lahir ini mulai berkembang menjadi sebuah entitas yang mapan. Peristiwa penting di era ini termasuk penaklukan kota Bursa pada tahun 1326, yang kemudian menjadi ibu kota pertama Kesultanan Utsmaniyah setelah mengatasi kesulitan seperti kelaparan dan bencana alam.<sup>34</sup>

Ekspansi strategis Kekaisaran Utsmani terjadi dengan tujuan tertentu, didorong oleh dua tujuan yaitu pertumbuhan wilayah dan jihad agama. Semangat ekspansionis ini berupaya memperluas wilayah Islam sambil merambah wilayah Bizantium, sehingga membentuk kembali lanskap geopolitik. Momen penting tiba di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mencapai prestasi monumental dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 M, sebuah peristiwa penting secara global mengingat keunggulan sejarah dan budaya kota ini.

Lintasan kesultanan terus menanjak, ditandai dengan tonggak sejarah seperti penaklukan Dinasti Mamluk di bawah Sultan Salim I pada

---

<sup>34</sup> Lukman Al-Hakim, "Sejarah Jaringan Sekularisme Di Dalam Tubuh Khalifah Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II Pada Tahun 1876-1909 M", (*Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2020), 46

tahun 1517 M, yang semakin memantapkan kekuasaan Utsmaniyah. Meskipun berhasil meraih kemenangan, Kesultanan Utsmaniyah tetap mempertahankan sistem sosial dan politiknya yang berbeda, dengan adaptasi yang menonjol adalah pembentukan korps Janissari untuk pertahanan dalam negeri dan evolusi struktur pemerintahan untuk mengangkat gubernur provinsi sebagai tokoh terkemuka dalam hierarki administratif kesultanan.

Melalui perpaduan kekuatan militer, visi strategis, dan pemerintahan yang adaptif, Kesultanan Utsmaniyah telah melewati berabad-abad sebagai kekuatan yang tangguh dalam catatan sejarah, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di wilayah yang disentuhnya dan memengaruhi dinamika jauh melampaui batas wilayahnya.

Pada saat Sultan Salim I berhasil menaklukkan Mamluk, ia juga mendapatkan kewenangan untuk menjadi “Pelayan Dua Tanah Suci”. Jadi, selain berhak untuk mengontrol Mekkah dan Madinah sebagai ritus umat Islam sedunia untuk melaksanakan ibadah haji, Khilafah Utsmaniyah juga berkewajiban untuk mengamankan rute-rute menuju Tanah Suci, khususnya rute Laut Merah dan Samudera Hindia. Hal ini membuat Khalifah harus berhadapan dengan armada laut Portugis yang saat itu mencoba merebut kontrol perdagangan internasional di perairan Samudera Hindia.<sup>35</sup>

Pada masa Sultan Mehmet IV pada tahun 1648 M. Pada saat itu, Sultan Mehmet IV diangkat menjadi Khalifah, pada saat itu, beliau baru

---

<sup>35</sup> Ismail Hakki Goksoy, “Acehnese Appeals for Utsmani Protection”, dalam A.C.S. Peacock dan Annabel The Gallop, ed., *From Anatolia to Aceh*, 183.

menginjak tujuh tahun. Melihat hal ini negara-negara Eropa menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk memporak-porandakan hegemoni Khilafah. Mereka membentuk aliansi yang terdiri dari Austria, Polandia, Venesia, Rusia, pendeta-pendeta Malta, dan paus di Roma yang mereka namakan sebagai aliansi suci (*Holy League*) untuk melawan Khilafah Utsmaniyah.<sup>36</sup>

Kekuatan Khilafah pada saat itu sedikit demi sedikit mulai melemah, apalagi semenjak penaklukan kota Vienna gagal pada tahun 1683 M. Setelah itu pasukan *Holy League* Eropa menghantam balik Khilafah Utsmaniyah. Kemudian Perjanjian Karlowitz ditandatangani pada tahun 1699 M, yang menandakan keberhasilan *Holy League* dalam merebut kembali Hungaria yang sebelumnya berada dibawah otoritas kekuasaan Islam.<sup>37</sup>

Pertempuran Daulah Utsmaniyah yang berlarut-larut dengan Rusia kemudian dapat diakhiri di tahun 1774 M dengan Perjanjian Kucuk Kaynarca. Dalam perjanjian ini, wilayah Krimea yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah kini menjadi wilayah merdeka. Namun begitu, penduduk Krimea yang beragama Islam tetap dapat memperlakukan Daulah Utsmaniyah seperti yang ditetapkan dalam agama, tetapi secara politik dan sipil, kaum Muslim Krimea bukanlah warga negara Khilafah. Hal ini merupakan awal upaya Barat untuk memisahkan potensi

---

<sup>36</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 378

<sup>37</sup> Suraiya Faroqhi, *The Utsmani Empire and The World Around It*, (London: Bloomsbury Academic), 58

spiritual dan politik dari kekuasaan Utsmaniyah.<sup>38</sup>

Dengan terjadinya pemisahan antara kekuasaan spiritual dan politik ini, negara-negara Eropa memposisikan jabatan Khalifah Daulah Utsmaniyah setara dengan kedudukan Paus dalam agama Katolik, yakni semata hanya sebagai pelaksana kekuasaan rohani. Akibat dari ini, maka negara-negara Eropa yang menjajah wilayah-wilayah Islam di Asia dan Afrika mendalihkan bahwa Eropa merupakan penguasa yang sah secara politik atas kaum Muslim, sedangkan Kekhalifahan Utsmaniyah di Istanbul hanya dianggap sebagai penguasa dalam hal spiritual saja.<sup>39</sup>

Khilafah yang dihormati oleh para ulama sebagai institusi yang menjaga agama dan mengatur urusan global, mengalami penurunan kekuasaannya, terutama pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I di Daulah Utsmani (1823-1861 M). Sultan Abdul Majid I menonjol dalam sejarah karena memprakarsai gerakan Westernisasi resmi di dalam pemerintahan, yang dicontohkan dengan penerapan sistem Tanzimat (Reformasi). Era penting ini menandai perubahan signifikan dari pemerintahan tradisional, ketika Kekhalifahan Utsmani mulai mengadopsi berbagai hukum dan praktik yang dipengaruhi oleh cita-cita Barat.

Di bawah era Tanzimat, Kekhalifahan Utsmani mengalami perubahan besar, khususnya dalam pendekatannya terhadap kebijakan luar negeri. Sultan Abdul Majid I menganjurkan integrasi Kekhalifahan Utsmani ke dalam kerangka Eropa, mencari pengakuan dan penerimaan dalam

---

<sup>38</sup> Nicho Pandawa, 50

<sup>39</sup> Hurgronje C. Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje* (Jakarta: INIS 1996),173

"keluarga Eropa" (Famille Europeene). Awalnya mendapat perlawanan dari negara-negara Eropa, Sultan Abdul Majid I dan pemerintahannya terlibat dalam upaya diplomatik selama beberapa tahun untuk mendapatkan pengakuan selama Kongres Paris yang diadakan antara bulan Februari dan April 1856 M.

Penerimaan Kekhalifahan Utsmaniyah ke dalam wilayah Eropa harus disertai dengan syarat dan kompromi yang signifikan. Inti dari penerimaan ini adalah persyaratan bagi Kekhalifahan Utsmaniyah untuk melepaskan Islam sebagai landasan hubungan internasionalnya dan sebagai gantinya menyesuaikan diri dengan "Hukum Publik Eropa".<sup>40</sup> Pergeseran penting ini mempunyai implikasi yang besar, khususnya dalam membatasi otonomi Daulah Utsmaniyah dalam urusan kebijakan luar negeri, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan militer dan aliansi dengan dinasti Muslim lain yang berjanji setia kepada Kekhalifahan Utsmaniyah di Istanbul. Penerapan Hukum Publik Eropa membatasi kemampuan Negara Utsmani untuk terlibat dalam kegiatan militer proaktif atau campur tangan dalam urusan negara lain, termasuk memberikan dukungan kepada umat Islam yang bergulat dengan kolonialisme Eropa di luar perbatasannya. Hal ini sangat berbeda dengan preseden sejarah Kesultanan Utsmaniyah, yang menganggap konsep jihad dan perlindungan wilayah sebagai inti kebijakan luar negeri dan manuver geopolitiknya. Era di bawah Sultan Abdul Majid I mewakili titik kritis dalam sejarah Utsmani, menyoroti interaksi kompleks

---

<sup>40</sup> Abdul Qadim Zallum, "Pemikiran Politik Islam"; Hugh McKinnon Wood, "The Treaty of Paris and Turkey's Status in International Law", dalam *Jurnal The American Journal of International Law*, Vol. 37, No. 2 (April 1943), 267

antara tradisi, modernisasi, dan dinamika internasional yang membentuk kembali peran kekaisaran di panggung global dan dalam kerangka hubungan Eropa yang lebih luas.

Kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Aziz. Pada masa Sultan Abdul Aziz, sepanjang tahun 1861 sampai 1876, dunia Islam sedang bergejolak dengan sederet peperangan kaum Muslim melawan Kolonialisme Eropa, salah satunya yang terjadi di Aceh pada tahun 1870 an. Seperti pada masa sultan sebelumnya, Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Aziz terjebak dilema antara tekanan diplomatik dari para duta besar Eropa agar tidak mencampuri urusan Belanda-Aceh, dan di satu sisi tuntutan publik Istanbul untuk menolong Muslim Aceh. Kemudian akhirnya, *Sadrazam* mengambil jalan tengah dengan hanya memberikan medali Osmani tingkat pertama untuk Sultan Aceh saat itu tanpa memberikan substansi dari permintaan Aceh yaitu bantuan militer, yang artinya para pejabat Utsmaniyah lebih condong kepada suara Belanda.

Dengan keputusan tersebut, maka Abd Al-Rahman al-Zahir, yang merupakan utusan Aceh saat itu sangat marah dan Khilafah Utsmaniyah dianggap mengorbankan orang-orang Aceh serta melawan hukum Al-Qur'an. Sejak Khilafah Utsmaniyah tergabung dalam keluarga Eropa pada tahun 1856 M, elite negara Utsmaniyah mengubah struktur pemerintahan menjadi sistem monarki parlementer, sebagaimana negara-negara Eropa yang lain. Maka dengan begitu, kekuasaan Sultan dibatasi oleh dewan

kementerian yang dipimpin oleh Sadrazam, yang mana identik dengan jabatan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan Barat.<sup>41</sup> Kelompok yang bertanggungjawab dalam perubahan sistem pemerintahan ini ialah Utsmani Muda, yakni kelompok intelegensia Utsmaniyah yang banyak terpengaruh pemikiran Barat.<sup>42</sup>

Maka ketika Khilafah Utsmaniyah tidak lagi dapat mengomando jihad (aktivitas militer) dalam politik luar negerinya dikarenakan terkekang oleh hukum internasional sehingga tidak memperkenankan Daulah Utsmaniyah untuk melakukan intervensi terhadap urusan negara lain, termasuk menolong kaum Muslim di luar teritorial Daulah Utsmaniyah yang sedang berada di bawah penjajahan Eropa, kemudian dari kondisi politik Daulah Utsmaniyah pada saat itu, dari sinilah semangat Pan-Islamisme muncul.

### C. Nuansa Kebudayaan

Bangsa Turki berdiri sebagai permadani yang ditunen dari beragam benang agama, suku, dan etnis, sehingga memunculkan lanskap budaya yang kaya dan bernuansa. Dalam penggabungan budaya ini, pengaruh tradisi Persia, Bizantium, dan Arab telah memberikan kontribusi signifikan terhadap mosaik yang mendefinisikan budaya Turki.<sup>43</sup>

Berangkat dari warisan Persia, masyarakat Turki menganut adat

<sup>41</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 63

<sup>42</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 105

<sup>43</sup> Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Edisi I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 335

istiadat etis dan santun yang lazim di istana kerajaan, memperkaya tatanan sosial mereka dengan prinsip kesopanan dan kesopanan. Pengaruh Bizantium, di sisi lain, meresap ke dalam strategi militer dan struktur administrasi, membentuk sistem pemerintahan dan pertahanan Negara Utsmani yang sedang berkembang. Dari budaya Arab, kekayaan pengetahuan yang mencakup praktik ekonomi, norma-norma sosial, upaya ilmiah, dan karya sastra masuk ke dalam masyarakat Turki, sehingga mendorong pendekatan holistik terhadap pembangunan masyarakat.

Meskipun memiliki banyak segi budaya, budaya Islam tetap menempati posisi penting dalam warisan Turki, khususnya di bawah payung Kesultanan Utsmaniyah. Estetika Islam, yang dilambangkan dengan arsitektur yang rumit dan kaligrafi yang indah, menghiasi lanskap, meninggalkan jejak abadi pada bangunan dan masjid yang ditinggalkan. Era Sultan Sulaiman, yang dikenal sebagai Zaman Keemasan Kesultanan Utsmaniyah, menyaksikan berkembangnya budaya Islam yang diwujudkan melalui pembangunan berbagai fasilitas yang melayani kebutuhan keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan rekreasi di seluruh kota, baik besar maupun kecil. Contoh cemerlang dari kebangkitan budaya ini terlihat pada keajaiban arsitektur yang dibuat oleh arsitek legendaris Sinan dari Anatolia. Kejeniusan Sinan tercermin dalam koordinasi dan desain tidak kurang dari 235 bangunan terkenal, yang menampilkan penguasaan

arsitektur Islam dan kehebatan teknik yang menentukan era tersebut.<sup>44</sup>

Sintesis budaya di negara Turki menjadi bukti evolusi dinamisnya, memadukan beragam pengaruh sekaligus menjaga nilai-nilai inti dan estetika yang menentukan identitasnya. Interaksi budaya yang berbeda-beda ini tidak hanya memperkaya warisan budaya Turki namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap mosaik keragaman budaya global yang lebih luas, menyoroti warisan abadi pertukaran dan adaptasi budaya yang terus membentuk masyarakat di seluruh dunia.

#### **D. Nuansa Keagamaan**

Agama memainkan peran integral dan beragam dalam masyarakat Turki, memberikan pengaruh di bidang sosial, politik, dan hukum. Inti dari kerangka keagamaan ini adalah otoritas para ulama, yang fatwa-fatwanya mempunyai bobot hukum dan mengikat dalam negara yang berakar kuat pada yurisprudensi Islam. Ulama, yang terdiri dari cendekiawan dan otoritas agama, memainkan peran penting dalam membentuk keputusan hukum dan norma-norma masyarakat sepanjang sejarah Utsmani, yang mewujudkan hubungan erat antara negara dan hukum Islam. Di puncak otoritas keagamaan di Kesultanan Utsmaniyah berdiri mufti, yang bertugas sebagai pejabat urusan agama tertinggi yang bertugas mengeluarkan fatwa resmi mengenai beragam masalah agama yang dihadapi masyarakat. Legitimasi fatwa-fatwa ini sangat penting, karena fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar

---

<sup>44</sup> Duriana, "Pemikiran Politik Turki Utsmani Hingga Masa Modern", dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial Islam*, Vol. 11, No. 2, 59

bagi proses hukum dan pemerintahan di dalam kerajaan, yang menggarisbawahi sifat saling terkait antara agama dan pemerintahan dalam masyarakat Utsmani.

Era Kekaisaran Utsmani menyaksikan perkembangan signifikan dalam tarekat sufi yang dikenal sebagai tarekat, yang berkembang dan menjadi terkenal baik di kalangan militer maupun sipil. Sekte tarekat terkemuka seperti Bektasyi dan Maulawi muncul, masing-masing mempunyai pengaruh yang berbeda. Tarekat Bektasyi memegang kekuasaan di kalangan tentara Bektasyi, memupuk perpaduan unik antara etos spiritual dan militer, sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa, khususnya dalam melawan pengaruh Janissari, sebuah korps militer elit. Meskipun tarekat sufi berkembang pesat, studi keagamaan formal seperti fiqh (yurisprudensi), kalam (teologi), tafsir (penafsiran Al-Quran), dan hadis (tradisi Nabi) mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Para penguasa pada masa itu sering kali lebih menyukai aliran pemikiran agama tertentu, sehingga menyebabkan kemajuan ilmiah yang tidak merata dalam disiplin ilmu tersebut.

John L. Espowsito, dalam karya ilmiahnya, menekankan pengaruh tradisi Islam yang bertahan lama dalam negara dan masyarakat Turki, terutama melalui pengaruh mendalam tarekat sufi seperti tarekat Maulawiyah, Naqsybandiyah, Malamiyah, dan Bektasyi sejak abad ke-16. Namun, era Tanzimat yang transformatif menandai peralihan dari struktur pemerintahan tradisional, karena metode Barat menggantikan peraturan

negara yang berakar pada hukum Islam. Pergeseran ini menyebabkan upaya Barat untuk melemahkan fondasi budaya, termasuk warisan Islam yang telah lama menjadi bagian integral dari pemerintahan Utsmani dan norma-norma masyarakat.<sup>45</sup> Interaksi antara tradisi keagamaan, tarekat sufi, dan paradigma pemerintahan yang berkembang mencerminkan sifat dinamis nuansa keagamaan dalam sejarah Turki, menyoroti interaksi dan transformasi kompleks yang telah membentuk lanskap keagamaan dan norma-norma masyarakat selama berabad-abad.

Pertemuan bersejarah antara Daulah Utsmaniyah dan dunia Barat berawal dari momen penting jatuhnya ibu kota Bizantium, Konstantinopel, ke tangan pasukan Turki di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 M. Peristiwa penting ini menandai peralihan Konstantinopel ke Istanbul, sebuah kota metropolitan kosmopolitan yang melintasi benua Asia dan Eropa, mengantarkan era keemasan Turki Utsmani yang bertahan hingga abad ke-18. Luas wilayah Daulah Utsmaniyah terbentang dari Hongaria Utara di Barat hingga Iran di Timur, meliputi Ukraina di Utara dan meluas hingga pesisir Samudera Hindia di Selatan. Bahkan Semenanjung Arab, termasuk kota-kota suci Mekkah dan Madinah, pernah berada di bawah kedaulatan kekuasaan Daulah Utsmaniyah.

Kesultanan Daulah Utsmaniyah, dalam menciptakan kerajaan yang begitu luas, memimpin masyarakat yang beragam dan multi-etnis, yang ditandai dengan mosaik agama dan budaya. Yang membedakan Kesultanan

---

<sup>45</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxpord Dunia Islam Modern, Jilid VI* (Bandung: Mizan, 2002), 63

Utsmaniyah adalah pendekatannya terhadap pemerintahan, yang dicirikan oleh fleksibilitas dan asimilasi, bukan pemaksaan yang kaku. Masyarakat non-Muslim di wilayah kekaisaran diberikan kebebasan dan otonomi budaya yang besar, sehingga menjadi preseden toleransi dan keadilan yang bergema bahkan dalam diskusi kontemporer mengenai sistem Khilafah dan pemerintahan Islam.

Namun, ketika pengaruh Barat memberikan tekanan yang semakin besar dan merambah lebih dalam ke masyarakat Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II muncul sebagai tokoh penting dalam evolusi kesultanan. Sultan Abdul Hamid II, menggantikan ayahnya Sultan Abdul Majid, yang menganut Gerakan Tanzimat—serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memodernisasi kesultanan—menyadari perlunya solidaritas di kalangan umat Islam di tengah pergeseran dinamika geopolitik dan gangguan Barat.

Menanggapi tantangan ini, Sultan Abdul Hamid II memperjuangkan gerakan Pan-Islamisme, yang berupaya menyatukan umat Islam di seluruh dunia berdasarkan tujuan yang sama. Inti dari visi ini adalah kolaborasinya dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang ulama dan reformis Islam terkemuka. Sultan Abdul Hamid II menyambut Al-Afghani di Istanbul, mengirimkan utusan ke negara-negara Islam, termasuk Indonesia, dalam upaya untuk menggalang dukungan bagi kepemimpinannya sebagai Khalifah umat Islam sebuah peran simbolis dan spiritual yang memiliki

pengaruh signifikan di dunia Muslim.<sup>46</sup>

Periode ini menandai fase manuver strategis dan ideologis di dalam Kesultanan Utsmani, yang menunjukkan interaksi rumit antara pemerintahan Islam tradisional, pengaruh Barat, dan upaya untuk persatuan pan-Islam sebuah dinamika yang terus bergema dalam diskusi seputar sejarah Islam dan Muslim global.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>46</sup> DR. Muhammad Harb, *Memoar Sultan Abdul Hamid II* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012)

### BAB III

#### KEBIJAKAN PAN-ISLAMISME SULTAN ABDUL HAMID II

##### A. Pengertian Pan-Islamisme

Pan-Islamisme, sebagai sebuah konsep, mendapatkan maknanya dari perpaduan dua istilah berbeda— “Pan,” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti universalitas atau keseluruhan, dan “Islamisme,” yang berasal dari bahasa Arab, berarti perdamaian, keamanan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Islam. Istilah Islamisme sendiri menunjukkan pemahaman Islam secara komprehensif yang mencakup dimensi politik, sosial, budaya, dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>47</sup> Islam pada intinya adalah agama monoteistik yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menekankan ketundukan pada kehendak Tuhan.

Asal usul Pan-Islamisme sebagai sebuah istilah dapat ditelusuri kembali ke Gabriel Charmes, seorang jurnalis Prancis terkemuka yang tulisannya banyak meliput Kekhalifahan Utsmani dan signifikansinya. Charmes, yang tertarik dengan peran Kekhalifahan Utsmani dan reaksi Muslim terhadap kolonialisme, menciptakan istilah ini dalam konteks Eropa, terutama untuk menggambarkan gerakan yang menganjurkan persatuan Muslim sebagai respons terhadap tekanan kolonial.

Awalnya, Pan-Islamisme dikonseptualisasikan sebagai "Persatuan Islam", yang mencerminkan aspirasi solidaritas di kalangan umat Islam di

---

<sup>47</sup> [Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](https://kemdikbud.go.id), (01 Februari 2024)

seluruh dunia. Namun, penggunaannya berkembang lebih dari sekedar deskripsi persatuan, mendapatkan implikasi yang lebih luas seperti gerakan pan lainnya seperti Pan-Slavisme, Pan-Amerikanisme, Pan-Jermanisme, dan Pan-Asianisme, yang bertujuan untuk persatuan etnis, nasional, atau kontinental.

Pengamatan Charmes mengenai reaksi Muslim terhadap kolonialisme Prancis di Tunisia dan mobilisasi Utsmani melawan kekuatan kolonial berkontribusi signifikan dalam membingkai Pan-Islamisme sebagai gerakan perlawanan dan solidaritas. Artikel Charmes yang berjudul "La Situation de la Turquie" menyoroti bagaimana sentimen Muslim digalakkan terhadap tekanan eksternal, yang mengarah pada munculnya apa yang disebutnya sebagai "Gerakan Pan-Islamisme".<sup>48</sup>

Dalam wacana Eropa, Pan-Islamisme menjadi identik dengan upaya yang menganjurkan persatuan umat Islam yang lebih luas dan perlawanan terhadap kolonialisme dan pengaruh eksternal. Penggunaannya mencerminkan gerakan pan yang lebih luas yang lazim di kalangan intelektual Eropa, yang menandakan seruan terhadap identitas kolektif dan solidaritas dalam berbagai konteks ideologis dan geopolitik.

Oleh karena itu, istilah Pan-Islamisme, yang berasal dari wacana Eropa dan dipopulerkan oleh Gabriel Charmes, merangkum beragam aspirasi umat Islam akan persatuan, identitas, dan perlawanan terhadap tekanan eksternal sebuah konsep yang terus bergema dalam diskusi

---

<sup>48</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 57

mengenai sejarah Islam, identitas Muslim global dan dinamika geopolitik.

Pan-Islamisme, sebagaimana tertuang dalam Ensiklopedia Islam terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki konsep multifaset dengan dimensi historis dan landasan ideologis yang berbeda. Ensiklopedia ini menggambarkan tiga makna mendasar yang dikaitkan dengan Pan-Islamisme, menyoroti evolusi dan relevansinya dalam konteks Islam dan geopolitik.

1. Aspek pertama Pan-Islamisme yang dijelaskan dalam ensiklopedia ini berkaitan dengan perannya sebagai oposisi umum terhadap kolonialisme Barat, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam dan identitas kolektif umat Islam yang tinggal di wilayah kolonial. Perspektif ini menggarisbawahi signifikansi historis Pan-Islamisme sebagai respons terhadap usaha imperialis yang berusaha menundukkan dan mendominasi wilayah mayoritas Muslim, menyoroti gagasan solidaritas dan perlawanan terhadap eksploitasi eksternal.
2. Aspek kedua Pan-Islamisme yang diuraikan dalam ensiklopedia ini berfokus pada pemanfaatannya sebagai alat strategis pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II yang memimpin Turki Utsmani pada tahun 1876 hingga 1909 M. Sultan Abdul Hamid II, menyadari tantangan yang ditimbulkan oleh tekanan kolonial dan perubahan dinamika geopolitik, memanfaatkan Pan-Islamisme untuk meningkatkan pengaruh dan keterlibatan Utsmani dalam dunia Islam yang lebih luas. Periode ini menyaksikan upaya bersama untuk

memelihara dan memupuk hubungan dengan komunitas Muslim di seluruh wilayah, yang mencerminkan visi Pan-Islamisme sebagai kekuatan pemersatu di bawah kepemimpinan Utsmani.

3. Aspek ketiga Pan-Islamisme yang digambarkan dalam ensiklopedia ini menggali perannya sebagai kerangka ideologis yang bertujuan menghidupkan kembali sistem kekhalifahan setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah pada tahun 1924 M. Pembubaran Kekhalifahan Utsmani menandai momen penting dalam sejarah Islam, yang mendorong diskusi dan upaya untuk meremajakan institusi kekhalifahan dan mengembalikan sentralitasnya di dunia Muslim. Pan-Islamisme, dalam konteks ini, mewakili kebangkitan aspirasi untuk pemerintahan dan kepemimpinan Islam yang bersatu di bawah kerangka kekhalifahan, yang menandakan pencarian identitas kolektif dan kohesi politik di kalangan umat Islam secara global.<sup>49</sup>

Konsep Pan-Islamisme, ketika dikaji dalam konteks perspektif Muslim Turki, mengungkapkan pendekatan multifaset untuk memupuk persatuan dan solidaritas di dunia Islam di bawah kepemimpinan Kekaisaran Utsmani. Visi persatuan Islam ini, yang dikenal sebagai Ittihat-i Islam atau Birligi Islam di kalangan sarjana Turki, memiliki akar sejarah yang dalam dan implikasi ideologis yang bergema selama berabad-abad. Ittihat-i Islam, yang berarti persatuan Islam, muncul sebagai inisiatif strategis di Kekaisaran Utsmani untuk mengkonsolidasikan komunitas Muslim secara

---

<sup>49</sup> Abdul Somad, "Pemikiran Dan Pergerakan Pan-Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20 Jurnal Pendidikan Dan Sejarah", dalam *Jurnal Pendidikan dan Sejarah* Vol, 1 No. 1, (2015), 5

global di bawah kerangka kepemimpinan yang kohesif. Istilah ini menjadi terkenal di Istanbul sekitar tahun 1868, awalnya muncul dalam sebuah artikel anonim yang mengartikulasikan aspirasi sultan Utsmani untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Visi ini dielaborasi lebih lanjut dan dipopulerkan oleh ulama ternama seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, yang tulisannya di terbitan seperti Al-'Urwah Al-Wusqa pada tahun 1884 menekankan konsep Jami'ah Al-Islam atau Al-Wahdah Al-Islamiyyah, yang melambangkan kesatuan umat Islam.<sup>50</sup>

Pan-Islamisme, yang dipandang sebagai gagasan politik, terkait erat dengan upaya menjaga wilayah Utsmani dari gangguan sekularisme dan pengaruh eksternal.<sup>51</sup> Cendekiawan seperti Bruce Master dan Gabor Agoston menyoroti Pan-Islamisme bukan sekadar sebuah ide, melainkan sebuah gerakan dan kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk menggalang umat Islam, baik di dalam maupun di luar kekuasaan Utsmani, untuk bersatu di bawah payung Kekhalifahan Utsmani. Gerakan ini berkembang sebagai respons terhadap kolonialisme Eropa yang mengancam kedaulatan dan otonomi umat Islam di berbagai wilayah di luar Kesultanan Utsmaniyah.<sup>52</sup>

Esensi Pan-Islamisme seperti yang diungkapkan oleh para pemikir Muslim Turki menggarisbawahi sifat gandanya, yaitu sebagai kekuatan pemersatu umat Islam di bawah kepemimpinan pusat dan sebagai reaksi

---

<sup>50</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 58

<sup>51</sup> Luqman Al-Hakim, "Sejarah Jaringan Sekularisme, 59

<sup>52</sup> Abdul Somad, "Pemikiran Dan Pergerakan Pan-Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20 Jurnal Pendidikan Dan Sejarah", dalam *Jurnal Pendidikan dan Sejarah* Vol, 1 No. 1, (2015)

terhadap intervensi kolonial dan kekuatan hegemonik. Kerangka ideologis ini mencakup aspirasi kesatuan politik, sosial, dan budaya, yang mencerminkan upaya kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, identitas, dan penentuan nasib sendiri di tengah perubahan dinamika global. Melalui kacamata Pan-Islamisme, Muslim dan cendekiawan Turki telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk narasi persatuan, ketahanan, dan penentuan nasib sendiri di dunia Islam, sehingga meninggalkan dampak jangka panjang dalam diskusi seputar pemerintahan Islam, identitas, dan solidaritas global.

## **B. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II**

Dalam suatu negara atau pemerintahan, seorang pemimpin pasti memiliki cara untuk melindungi masyarakat maupun negaranya dalam segi jasmani maupun rohani. Pemimpin juga pasti memiliki berbagai strategi politik sebagai cara atau upaya untuk mencegah sekelompok orang yang akan berusaha menjatuhkan kepemimpinannya dalam pemerintahan. Strategi atau kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin diharapkan dapat menjadi sebuah solusi alternatif serta dapat memberikan dampak yang luas serta positif bagi pemerintahan.

Kepemimpinan yang efektif merupakan landasan tata kelola yang sukses, ditandai dengan kemampuan untuk mengadaptasi gaya kepemimpinan dalam berbagai situasi. Kecakapan kepemimpinan secara

signifikan mempengaruhi kualitas dan efektivitas kebijakan publik, yang pada gilirannya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan masyarakat dan mengatasi berbagai tantangan.<sup>53</sup>

Kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka panduan, yang mewujudkan peraturan dan arahan yang berfungsi sebagai tolok ukur pengambilan keputusan di berbagai sektor. Ini bertindak sebagai mekanisme penting untuk mengantisipasi dan menavigasi kondisi masa depan yang tidak pasti, yang memerlukan tinjauan ke masa depan, kesiapsiagaan, dan tindakan strategis. Selain itu, kebijakan publik berfungsi sebagai katalis untuk mengatasi permasalahan mendesak dengan cepat dan tegas, yang berpotensi memberikan dampak positif dan luas.

Interaksi antara kepemimpinan dan kebijakan publik bersifat simbiosis, dimana kepemimpinan berfungsi sebagai kunci utama dalam proses perumusan kebijakan. Kepemimpinan yang efektif memastikan bahwa kebijakan tidak hanya disusun dengan baik namun juga dapat dipahami, dengan mempertimbangkan nuansa situasional dan lanskap kebijakan yang lebih luas. Hubungan yang dinamis ini menggarisbawahi pentingnya kecerdasan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks dan mengembangkan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan Islam, kepemimpinan mempunyai dimensi yang lebih luas, khususnya dalam kerangka Khilafah. Khalifah, atau pemimpin Islam, memikul

---

<sup>53</sup> AA, Toana, "Kepemimpinan Situasional Dalam Kebijakan Publik, dalam *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol, 1 No. 2, (2018)

berbagai tanggung jawab yang mencakup pemerintahan, pengelolaan agama, dan bimbingan moral sejalan dengan prinsip-prinsip yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan Syariah. Pendekatan holistik terhadap kepemimpinan ini menggarisbawahi sifat pemerintahan dan pedoman etika yang saling terkait dalam sistem pemerintahan Islam, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif dalam konteks pemerintahan Islam tidak hanya mencakup kecerdasan administratif tetapi juga komitmen yang mengakar terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan etis yang memprioritaskan kesejahteraan dan peningkatan moral masyarakat. Integrasi harmonis antara keunggulan kepemimpinan dan pengelolaan etis menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi perumusan dan implementasi kebijakan yang kuat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan cita-cita Islam.

Sultan Abdul Hamid II merupakan Khalifah atau pemimpin ke- 34 Daulah Utsmaniyah. Sultan diangkat menjadi Khalifah pada tahun 1876 M, yang menggantikan sultan sebelumnya yakni Sultan Murad V yang masa kekuasaannya hanya berlangsung selama 90 hari. Sultan Abdul Hamid II memimpin Daulah Utsmaniyah dalam era krisis dan penuh dengan tekanan. Tekanan demi tekanan harus dihadapi oleh Sultan Abdul Hamid II di masa awal kepemimpinannya.

Pada saat itu Sultan harus menghadapi ketamakan negara-negara

Barat untuk berkuasa di negara itu yang mana ketamakan tersebut sudah sampai pada puncak tertingginya, Sultan Abdul Hamid II juga bertanggung jawab dalam membayar hutang luar negeri yang merupakan akibat dari hutang-hutang kepemimpinan yang sebelumnya, menyingkirkan orang-orang yang berusaha menghancurkan Daulah Utsmaniyah di kepemimpinan sebelumnya. Sultan juga harus menghadapi dan mencari solusi bagaimana agar supaya wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah dapat bangkit kembali dari keterpurukan pengaruh pemikiran Barat yang merebak pada saat itu.

Disamping itu, Kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II pada masa pemerintahannya ditandai dengan tantangan yang diajukan oleh berbagai kelompok, termasuk aktivis Freemasonry dan revolusioner liberal dalam "Gerakan Turki Muda". Kelompok-kelompok ini, yang dipengaruhi oleh ideologi sekuler dan sentimen anti-Khalifah, bertujuan untuk melemahkan otoritas Sultan Abdul Hamid dan membawa perubahan politik yang signifikan di Kesultanan Utsmaniyah. Organisasi Freemasonry, yang terkenal dengan operasi rahasia dan pengaruhnya di kalangan politik, secara strategis menyusup ke dalam barisan pemuda revolusioner liberal yang bersekutu dengan Gerakan Turki Muda. Gerakan ini, yang awalnya menganjurkan reformasi dan modernisasi di dalam kekaisaran, menjadi platform agenda anti-monarki dan sekuler yang dipromosikan oleh elemen Freemasonry. Selain itu, kolaborasi Freemasonry dengan "Organisasi Persatuan dan Kemajuan" memajukan misi sekularisme mereka dan akhirnya pembubaran Kekhalifahan Islam. Kepemimpinan Sultan Abdul

Hamid II diuji di tengah serangkaian tantangan yang kompleks, termasuk tekanan eksternal dari Freemasonry, kelompok Yahudi, dan gerakan internal yang mendukung pemerintahan sekuler. Upaya terpadu dari kelompok-kelompok ini berupaya menggoyahkan Kesultanan Utsmaniyah dan melemahkan otoritas Sultan, yang berpuncak pada gejolak signifikan dalam lanskap politik kesultanan.<sup>54</sup>

Pada tahun 1924 M, puncak dari upaya ini mengakibatkan Turki mengalami perubahan transformatif dari warisan Islam menjadi negara sekuler. Titik balik ini menandai transisi dalam lintasan politik Turki, yang mencerminkan perjuangan abadi antara pemerintahan Islam tradisional dan munculnya ideologi sekuler yang dipengaruhi oleh filosofi dan gerakan politik Barat. Warisan era Sultan Abdul Hamid II menggarisbawahi interaksi dinamis antara otoritas agama, tantangan sekuler, dan kompleksitas pemerintahan dalam menavigasi periode transformasi sosial-politik. Transisi menuju negara sekuler di Turki menandai babak baru dalam sejarah Turki, yang memicu perdebatan dan refleksi mengenai titik temu antara agama, pemerintahan, dan modernitas dalam konteks masyarakat Islam.

Kemudian usaha yang dilakukan oleh Sultan Abdul hamid II dalam mengatasi segala macam permasalahan yang dihadapi didalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah ialah dengan cara mempersatukan umat Islam. Di dalam sebuah catatan hariannya Sultan Abdul Hamid II mengatakan: “Pemerintah Utsmani meliputi semua etnik mulai dari Turki,

---

<sup>54</sup> DR. Muhammad Harb, *Memoar*, 22

Arab, Albania, Bulgaria, Yunani, Negro, serta berbagai unsur lainnya. Dengan demikian, persatuan Islam menjadikan kita sebuah keluarga”.<sup>55</sup>

Sultan Abdul Hamid II juga mengungkapkan sikap optimisme dan kepercayaannya mengenai persatuan Islam dengan mengatakan:

Kita harus memperkuat hubungan persaudaraan dengan umat Muslim lainnya di seluruh negeri. Kita harus saling mendekatkan diri antara yang satu dengan yang lain dan lebih memperkuatnya. Sehingga tidak ada harapan bagi masa depan kecuali persatuan ini. Waktunya belum bisa sekarang, melainkan yang akan datang. Akan datang pada suatu masa dimana umat Islam Bersatu dan bangkit dalam sebuah Gerakan. Mereka akan bangkit dalam sebuah Gerakan. Mereka akan bangkit di bawah kepemimpinan seseorang sehingga mampu menghancurkan batang leher orang-orang kafir.<sup>56</sup>

Inisiatif yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II menggarisbawahi komitmen mendalam untuk menyatukan umat Islam secara politik dalam menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi Negara Utsmani. Ide-idenya tidak hanya bersifat teoritis namun berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial yang nyata dalam struktur pemerintahan kekaisaran. Transformasi ini sangat penting karena berupaya untuk mendorong kolaborasi dan tindakan kolektif di antara beragam komunitas yang menghadapi tantangan bersama. Sultan Abdul Hamid II menyadari bahwa mengatasi beragam permasalahan di Kesultanan Utsmaniyah memerlukan upaya bersama yang berakar pada persatuan Islam dan manuver politik strategis. Kebijakan-kebijakannya bukan semata-mata tindakan defensif terhadap ideologi-ideologi Barat, namun merupakan

<sup>55</sup> DR. Muhammad Harb, *Memoar*, 12

<sup>56</sup> Ibid.

respons strategis yang bertujuan memperkuat kekaisaran terhadap tekanan dan serangan eksternal. Visi Sultan melampaui batas-batas Kekaisaran Utsmani, dengan mengakui bahwa persatuan umat Islam melampaui batas-batas geografis. Ia membayangkan sebuah gerakan yang lebih luas, mencakup umat Islam di seluruh Asia, termasuk Asia Tengah, dan sekitarnya, untuk meningkatkan pengaruh dan ketahanan persatuan Islam melawan gangguan Barat.

Konsep yang muncul dari visi Sultan Abdul Hamid II diartikulasikan sebagai Pan-Islamisme, sebuah ideologi politik yang berupaya menyatukan umat Islam secara global di bawah identitas dan tujuan Islam yang sama. Pan-Islamisme mewakili kerangka strategis untuk menghadapi tantangan geopolitik yang lebih luas sekaligus menggalang solidaritas dan keagenan Muslim dalam skala global. Melalui Pan-Islamisme, Sultan Abdul Hamid II bertujuan untuk memobilisasi kekuatan kolektif, sumber daya, dan pengaruh untuk mengatasi permasalahan kontemporer dan menjaga kepentingan umat Islam di dalam dan di luar wilayah Utsmani. Kerangka ideologis ini mencerminkan pendekatan pemerintahan yang proaktif dan berpikiran maju, menekankan keterlibatan proaktif, aliansi strategis, dan promosi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam wacana dan tindakan politik. Warisan Sultan Abdul Hamid II sebagai pendukung Pan-Islamisme merupakan bukti dari upaya abadi untuk mencapai persatuan, ketahanan, dan keagenan dalam komunitas Muslim global, menyoroti relevansi inisiatif politik strategis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dalam menavigasi lanskap geopolitik

yang kompleks. dan menjaga kepentingan umat Islam.

Berbagai tujuan yang terangkum dalam visi Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II menggambarkan peta jalan strategis yang bertujuan untuk memperkuat dunia Islam terhadap ancaman eksternal dan membina blok Muslim yang bersatu dan berpengaruh di panggung global. Tujuan-tujuan ini, yang dirancang dengan cermat untuk mengatasi tantangan kontemporer dan memperkuat persatuan Islam, mencerminkan pemahaman cerdas Sultan mengenai dinamika geopolitik dan pentingnya tindakan kolektif di antara negara-negara Muslim.

1. Melawan Pengaruh Barat: Salah satu tujuan utama Pan-Islamisme adalah melawan gangguan ideologi Barat di kalangan terpelajar dan lembaga pemerintah yang sensitif di negara-negara Islam. Dengan mempromosikan persatuan dan nilai-nilai Islam, Sultan Abdul Hamid II berupaya memperkuat ketahanan intelektual dan politik masyarakat Muslim terhadap pengaruh Barat yang dapat melemahkan prinsip-prinsip Islam.
2. Menghentikan Agresi Kolonial: Pan-Islamisme berfungsi sebagai alat strategis untuk menyatukan umat Islam dan menciptakan front yang tangguh melawan kekuatan kolonialis Eropa dan Rusia, sehingga menjaga perbatasan wilayah Islam. Dengan menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Islam mengenai keserakahan kolonial dan menganjurkan pertahanan kolektif melalui persatuan Islam, gerakan ini bertujuan

untuk mencegah agresi eksternal dan melindungi kedaulatan tanah Muslim.

3. Memberdayakan Badan Politik Muslim: Sultan Abdul Hamid II membayangkan Pan-Islamisme sebagai sarana untuk mengangkat umat Islam ke panggung politik internasional sebagai kekuatan yang signifikan dan berpengaruh. Hal ini mencakup melawan peperangan ideologi, budaya, dan agama yang dilakukan oleh negara-negara Kristen di Eropa dan menegaskan hak negara-negara Muslim untuk menentukan nasib sendiri dan otonomi ideologi.
4. Mempengaruhi Kebijakan Nasional dan Internasional: Pan-Islamisme dipahami sebagai pendekatan proaktif untuk membentuk agenda politik nasional dan internasional. Dengan memanfaatkan kekuatan dan persatuan kolektif Muslim, Sultan Abdul Hamid II bertujuan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan melayani kepentingan komunitas Muslim di seluruh dunia.
5. Menghidupkan Kembali Otoritas Kekhalifahan: Inti dari Pan-Islamisme adalah revitalisasi Kekhalifahan sebagai institusi yang kuat dan pemersatu di dunia Muslim. Dengan memposisikan Kekhalifahan sebagai simbol persatuan dan perlawanan terhadap tekanan eksternal, Sultan Abdul Hamid II bertujuan untuk menggalang negara-negara Muslim dengan tujuan yang sama, memperkuat peran Sultan sebagai tokoh pemersatu dan katalis solidaritas Islam.

6. Memperkuat Kenegaraan Utsmani: Pan-Islamisme juga mencakup visi strategis untuk meremajakan Negara Utsmani menjadi Khilafah yang tangguh, dilengkapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern dan kekuatan komprehensif di berbagai bidang. Revitalisasi ini bertujuan untuk memulihkan otoritas Kesultanan Utsmaniyah, menjadi mercusuar pemerintahan Islam, dan memberikan pembelajaran berharga bagi generasi mendatang, sebagaimana terangkum dalam komitmen Sultan Abdul Hamid II untuk memperkuat kehadiran politik dan sosial Islam.<sup>57</sup>

Di dalam penelitian ini penulis membagi alasan atau yang melatar belakangi munculnya kebijakan Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ini menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal yakni sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang melatar belakangi munculnya kebijakan Pan-Islamisme dari dalam Kekhalifahan Daulah Utsmaniyah  
 Kekalahan perang berkepanjangan dan terus-menerus yang dihadapi oleh Daulah Abbasiyah di masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya berdampak pada kemunduran Daulah Utsmaniyah. Negara yang seringkali melakukan serangan terhadap Daulah Utsmaniyah bahkan pernah menaklukkan kekuasaan Daulah Utsmaniyah sebelum Sultan Abdul Hamid II berkuasa ialah negara Rusia yang melakukan penyerangan sejak abad ke XVIII. Pada saat dilantiknya Sultan Abdul Hamid II menjadi Khalifah yaitu pada tahun 1876 M, Rusia telah melakukan berbagai macam persiapan dalam melakukan serangan

---

<sup>57</sup> Luqman Al-Hakim, "Sejarah Jaringan Sekularisme, 82

terhadap Daulah Utsmaniyah, Rusia mempersiapkan latar belakang politik yang diperlukan dan menyelesaikan persiapan militer untuk menyatakan perang terhadap Daulah Utsmaniyah, sehingga puncaknya Rusia resmi menyatakan perang terhadap Turki Utsmani pada tanggal 24 April 1877.<sup>58</sup>

Penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Turki Utsmani ini dikenal dengan nama lain Russo-Turkis War. Awal mula terjadinya konflik ini terjadi di era kepemimpinan Sultan Abdul Majid (1823-1861 M) dan Sultan Abdul Aziz (1861-1876 M). Dan sebagai puncaknya yaitu terjadi peperangan tepat beberapa tahun setelah Sultan Abdul Hamid II diangkat menjadi Khalifah (1876-1909 M), peperangan terjadi sekitar tahun 1877-1878 M. Sehingga adanya peperangan ini menjadi salah satu masalah yang harus di hadapi di awal kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II.

Akibatnya, banyak wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang berhasil di taklukkan. Setelah menguasai Laut Hitam, Rusia juga berencana merebut sebagian Anatolia hingga Teluk Iskandaria di Laut Mediterania. Para tentara Rusia itu berhasil merebut Dobruja, Zishtovi, dan Tirnova, serta membantai sebagian besar penduduk Muslim yang ada disana.<sup>59</sup> Turki Utsmani banyak kehilangan wilayah kekuasaan, wilayah Turki Utsmani yang ada di belahan Eropa tidak tersisa kecuali wilayah

---

<sup>58</sup> Rahmawati, R. K, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M)" dalam *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol, 1 No. 1, (2017),193-211

<sup>59</sup> Prof. Dr. Mehmet Maksudoglu, *The Unthold History of Ottoman* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023), 333

Thrace Timur, dengan luas keseluruhan berkisar 60.000 mil persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang.

Sehingga pada tahun 1878 M di Istanbul banyak di penuhi para pengungsi Muslim yang telah kehilangan segalanya akibat dari kekalahan perang. Seperti halnya orang-orang Muslim Albania yang terus menerima perlakuan buruk dan di usir oleh orang-orang Yunani di wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Kemudian bantuan-bantuan dari para pemimpin Muslim di negara lain mulai berdatangan, salah satunya bantuan dari Muslim di India yang memberikan sumbangan berupa kebutuhan selama peperangan.<sup>60</sup>

Akibat lain yang terjadi dalam peperangan ini ialah lepasnya wilayah Bulgaria, yang mana Bulgaria di beri hak untuk menjalankan urusan di dalam negerinya sendiri, yang mana Bulgaria sendiri telah berada di dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani sejak lima abad lamanya. Pembebasan Bulgaria ini ditandai dengan Perjanjian Saint Stefanos yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1878 M, dengan kesepakatan bahwa Rusia menyatakan bahwa perjanjian ini hanya sementara dan dapat dirubah. Merasa iri dengan perolehan teritorial Rusia yang besar itu, maka Inggris, Austria, dan Prusia meminta untuk segera diadakan kongres di Berlin.

Pada awalnya Rusia enggan untuk menyetujui, karena ia tau bahwa penolakannya tersebut akan dihadapkan pada krisis besar, atau

---

<sup>60</sup> Siti Alia, Rayma Nur Falah, dkk, "Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri Yang Diterapkan Oleh Sultan Abdul Hamid Ii Di Dinasti Osmani (1876- 1909 M)", dalam *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol, 2 No. 2, (2021), 122-132

bahkan perang. Akhirnya kemudian Kongres Berlin di selenggarakan pada tanggal 13 Juni 1878 M. Perdana Menteri Jerman Pangeran Bismarck yang terpilih sebagai presiden.<sup>61</sup> Kemudian hasil akhir dari perang Rusia-Osmani ini menegaskan bahwa Daulah Utsmaniyah harus mengakui kemerdekaan Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro, sedangkan wilayah Utsmani yang lain seperti Kars dan Bantun menjadi wilayah kekuasaan Rusia.

Bukan hanya perang antara Rusia-Osmani yang menjadi salah satu perang yang mengakibatkan Daulah Utsmaniyah mengalami kemunduran akibat banyaknya wilayah yang hilang dan melepaskan diri, selain itu beberapa perang yang terjadi di masa akhir kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II ialah perang Balkan I dan II yang terjadi pada tahun 1912-1913. Bahkan akhir perang Balkan menuliskan kekalahan umat Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyaknya kekalahan perang ini menyebabkan Daulah Utsmaniyah kemudian mengalami kemunduran.

Maka dari itu, untuk melakukan pertahanan terhadap serangan-serangan dari Barat, maka Sultan Abdul Hamid II berupaya mempersatukan berbagai elemen unsur yang beragam dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah, dalam sebuah kekuatan Islam agar mampu menghadapi serangan-serangan dari Barat, ide dan gagasan Sultan Abdul Hamid II ini kemudian disebut dengan kebijakan politik Pan-Islamisme.

---

<sup>61</sup> Prof. Dr. Mehmet Maksudoglu, *The Unthold*, 334

2. Faktor Eksternal yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Pan-Islamisme dari luar Kekhalifahan Daulah Utsmaniyah dengan adanya intervensi (dominasi) asing ke dalam Daulah Utsmaniyah.

a) Masuknya pemikiran barat di Kekhilafahan Turki Utsmani (Turki Utsmani Era Sekuler)

Salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah masuknya sekularisme di dunia Islam. Membahas mengenai sekularisme di Turki Utsmani, tentu berawal dari era *Tanzimat* (pembaharuan) yang dilakukan pada masa Sultan Abdul Majid I pada tahun 1839 M hingga runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani di masa Sultan Abdul Majid I, hingga sekularisme menjadi bagian penting dari berdirinya negara Republik Turki pada tahun 1924 M.

Istilah "sekuler" berasal dari kata Latin "saeculum", yang memiliki konotasi ganda terkait waktu dan tempat. Dalam bahasa masa kini, kata "sekuler" lazim dipahami sebagai berkaitan dengan aspek duniawi atau materi, berbeda dengan ranah spiritual atau agama, sesuai definisi KBBI.

Konsep sekularisasi mempunyai dua makna utama: pertama, proses yang mengarah pada kehidupan yang terputus dari pengaruh agama; dan kedua, konversi properti milik negara untuk penggunaan alternatif. Sekularisme, di sisi lain, mewakili pendirian atau perspektif filosofis yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral

tidak harus berasal dari doktrin agama. Meskipun istilah "sekuler", "sekularisasi", dan "sekularisme" memiliki definisi yang berbeda, istilah-istilah tersebut memiliki tema mendasar yang sama yaitu mengutamakan hal-hal duniawi daripada pertimbangan agama. Kesamaan ini menggarisbawahi gagasan untuk menurunkan otoritas ketuhanan atau agama ke posisi sekunder dalam urusan kemasyarakatan, dengan menekankan nilai-nilai yang berpusat pada kemanusiaan dan pemerintahan yang independen dari doktrin-doktrin agama. Ideologi sekuler menganjurkan pemisahan lembaga keagamaan dari pemerintahan negara, mengedepankan sikap netral di mana keputusan didasarkan pada rasionalitas, etika, dan kesejahteraan masyarakat daripada dogma agama. Pendekatan ini berupaya menciptakan ruang inklusif di mana individu dengan keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam kerangka yang menghormati kebebasan dan hak individu, terlepas dari afiliasi agama.<sup>62</sup>

Evolusi sekularisme di Kesultanan Utsmaniyah berlangsung secara bertahap, ditandai dengan proses transformatif yang terbentuk terutama pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I. Perjalanan transformatif ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik dan tekanan eksternal, terutama dari negara-negara Barat yang berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. mengerahkan pengaruhnya di dalam

---

<sup>62</sup> Fadlurrahman Ashidiqi, "Problem Doktrin Sekularisme", dalam *Jurnal Kallimah*, Vol. 12, No. 2, (2014), 216

kekaisaran. Sultan Abdul Majid I naik jabatan Khalifah di usia yang masih sangat muda, yakni baru 16 tahun. Akses kekuasaan yang lebih awal ini memberikan peluang bagi kekuatan eksternal, terutama negara-negara Barat, untuk menjalankan agenda mereka di wilayah Utsmani. Era ini menyaksikan perpaduan manuver politik yang diatur oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang menganjurkan modernisasi dan reformasi gaya Barat. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh ini, Mustafa Rasyd Pasha menonjol karena pendekatan inovatifnya. Menjabat sebagai duta besar Utsmani untuk London dan Paris, Rasyd Pasha memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan menjalin hubungan dengan jaringan sekuler Barat. Keterlibatan diplomatiknya membantu menjembatani kesenjangan antara otoritas Utsmani dan ideologi Barat, membuka jalan bagi pengenalan dan penerimaan ide-ide sekuler dalam wacana politik Utsmani. Masa jabatan Sultan Abdul Majid I mewakili periode penting yang ditandai dengan benih awal pemikiran sekuler yang berakar dalam pemerintahan Utsmani. Meningkatnya pertukaran dengan negara-negara Barat, ditambah dengan munculnya inisiatif diplomatik yang mempromosikan modernisasi dan prinsip-prinsip sekuler, meletakkan dasar bagi pergeseran paradigma ideologi di dalam kekaisaran. Fase awal eksplorasi sekuler pada era Sultan Abdul Majid I ini menandakan transformasi dan perdebatan yang lebih luas seputar sekularisme yang akan terjadi pada tahun-tahun

berikutnya di Turki Utsmani. Hal ini menggarisbawahi periode keterbukaan intelektual dan keterlibatan dengan ide-ide Barat, sehingga menggerakkan lintasan kompleks yang secara signifikan akan membentuk lanskap politik dan sosial kekaisaran tersebut dalam beberapa dekade mendatang.<sup>63</sup>

Pada mulanya, diantara alasan Turki Utsmani mengadopsi sistem sekuler yaitu mereka ingin adanya reformasi dari segi hukum agama, Pendidikan, ekonomi, dan untuk memunculkan paham nasionalisme dan cinta tanah air. diantaranya dalam hal politik, sosial budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Proses sekularisasi di dalam Kekhalifahan Turki Utsmani meliputi segala bidang dalam kehidupan manusia.

Di bidang politik, efek dari adanya sekularisasi ini adalah berupa kebijakan dalam penghapusan syari'at Islam di dalam masyarakat. Kebijakan ini tidak lain adalah untuk memisahkan urusan politik dengan agama. Dampak sekularisasi kemudian semakin tampak dirasakan ketika umat Islam di Turki kemudian tidak lagi memandang agama sebagai sesuatu yang penting dan membuat kehidupan menjadi liberal, kebebasan atas nama Hak Asasi Manusia kemudian yang dijadikan sebagai tameng dalam kehidupan yang sudah tanpa syari'at.

---

<sup>63</sup> Luqman Al-Hakim, "Sejarah Jaringan Sekularisme", 63

Di bidang Pendidikan, pada masa Sultan Abdul Majid I, Muhammad Ali yang saat itu memerintah Mesir, dilakukan reformasi di bidang Pendidikan dengan mendatangkan guru-guru dari Eropa dan terjadi transfer keilmuan oleh orang-orang Eropa, sehingga dari sini membuka penyebaran pemikiran sekuler di Mesir yang berada dalam wilayah kekuasaan Utsmani, banyak ilmuwan-ilmuwan yang bahkan di datangkan langsung dari Eropa. Pada masa itu juga banyak pelajar-pelajar yang dikirim ke Eropa, yakni Italia, Inggris, dan Prancis. Selain itu, banyak proyek penerjemahan-penerjemahan buku berbahasa Eropa ke dalam bangsa Arab, sehingga banyak buku-buku yang membahas mengenai nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya masuk ke dunia Islam.<sup>64</sup>

Evolusi sekularisme di masa Kesultanan Utsmaniyah bukanlah sebuah fenomena tersendiri, melainkan sebuah proses multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan ideologi dan kekuatan eksternal. Salah satu perkembangan signifikan adalah dampak Zionisme dan Freemasonry, yang keduanya berkontribusi pada penyebaran cita-cita sekuler dalam pemerintahan dan masyarakat Utsmani. Gerakan Freemasonry memberikan pengaruh yang besar, khususnya di kalangan pejabat tinggi pemerintahan Utsmani. Melalui dukungan mereka terhadap sekularisme sebagai simbol kemajuan Barat, Freemason menggoda banyak pejabat untuk

---

<sup>64</sup> Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 58-62

mengadopsi ideologi sekuler, yang menyebabkan terkikisnya nilai-nilai budaya Turki dan Islam secara bertahap dalam eselon tertentu dalam masyarakat Utsmani. Pergeseran internal ini menciptakan faksi-faksi di dalam kekaisaran yang secara aktif menentang pemerintahan Islam tradisional, sehingga semakin memperburuk ketegangan dan perpecahan ideologis.

Dinamika ini juga ditambah dengan munculnya Gerakan Turki Muda, yang mendapatkan momentumnya sekitar tahun 1865. Gerakan ini menganut perpaduan ideologi sekuler, liberal, dan nasionalis, yang mencerminkan kecenderungan yang lebih luas menuju modernisasi dan Westernisasi. Seiring dengan berkembangnya ideologi-ideologi ini, ideologi-ideologi ini membawa perubahan signifikan pada tatanan masyarakat dan lanskap politik Turki, yang menandakan penyimpangan dari norma-norma dan nilai-nilai Islam tradisional. Munculnya sekularisme di dunia Islam pada masa kolonial juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap agama dan pemerintahan. Pendudukan Perancis di Mesir pada tahun 1798 menandai titik balik, diikuti oleh dominasi Inggris sejak tahun 1882 dan seterusnya. Kekuatan kolonial ini tidak hanya menerapkan kontrol politik namun juga mempengaruhi elit terpelajar, dan secara efektif menggunakan mereka sebagai saluran untuk menyebarkan ideologi sekuler yang sejalan dengan agenda kolonial mereka.

Sedangkan, Inggris sendiri merupakan negara yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Usmaniyah, sehingga pemikiran Inggris tidak dapat dijadikan satu peradaban dengan peradaban Islam. Dalam sebuah konferensi pers mengenai hubungan pemerintah Utsmani dengan Inggris, Sultan Abdul Hamid menulis dalam catatan hariannya : “Islam dan Kristen memiliki pandangan yang berbeda, dan tidak mungkin keduanya menyatu dalam sebuah peradaban. Inggris telah meracuni akal orang-orang Mesir, karena Sebagian penduduk Mesir meyakini bahwa keselamatan Mesir akan datang dari Inggris.”<sup>65</sup>

Di Mesir gelombang pengaruh Inggris melanda kalangan terpelajar, membentuk pola pikir banyak intelektual terhadap nasionalisme dan patriotisme yang bertujuan untuk membebaskan bangsanya dari kekuasaan kolonial Inggris. Gelombang semangat nasionalis ini mencapai puncaknya dengan kemenangan Mesir atas Inggris, yang melambangkan kebebasan baru dari dominasi eksternal, termasuk kekuasaan Kesultanan Usmaniyah. Namun, Sultan Abdul Hamid II tidak acuh terhadap semangat perlawanan yang muncul di kalangan intelektual Mesir.

Menyaksikan kebangkitan elit intelektual Mesir, Sultan Abdul Hamid II berusaha untuk kritis terhadap pemikiran Barat. Ia memahami bahwa pemahaman yang berbeda terhadap ideologi Barat

---

<sup>65</sup> DR. Muhammad Harb, *Memoar*, 10

sangatlah penting, terutama dalam melawan penafsiran kasar yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Sultan menekankan bahwa kedaulatan dan ketahanan Islam yang otentik berasal dari hubungan yang mengakar dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Inti dari visi Sultan Abdul Hamid II adalah konsep Ukhuwah Islamiyah, atau persaudaraan Islam, yang berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Ukhuwah Islamiyah melampaui batas geografis, etnis, dan negara, menyatukan individu berdasarkan keyakinan bersama terhadap Islam. Ikatan keimanan ini tidak hanya memperkuat ikatan komunal tetapi juga memberikan perisai terhadap pengaruh luar yang berupaya melemahkan prinsip-prinsip Islam. Untuk mencapai cita-citanya, Sultan Abdul Hamid II merumuskan kebijakan politik komprehensif yang dikenal dengan Pan-Islamisme. Ideologi ini bertujuan untuk menyebarkan persatuan dan solidaritas Islam di berbagai wilayah Muslim, melawan pengaruh Barat yang telah meresap ke wilayah Islam. Dengan memperjuangkan Pan-Islamisme, Sultan memimpikan penegasan kembali nilai-nilai Islam dan reklamasi identitas Islam dalam menghadapi pelanggaran ideologi Barat.

Oleh karena itu, upaya Sultan Abdul Hamid II tidak hanya bersifat reaktif namun juga proaktif, berupaya menavigasi medan pengaruh Barat yang kompleks sembari memperkuat kekuatan cita-cita dan kedaulatan Islam yang abadi. Keterlibatan strategisnya

dengan Pan-Islamisme mencerminkan visi yang lebih luas dalam menjaga prinsip-prinsip Islam dan membina persatuan di kalangan umat Islam secara global.

b) Penjajahan di wilayah-wilayah Islam

Prancis menduduki Mesir pertama kalinya pada tanggal 1 Juli 1798 M, atas kendali dari Napolenon, mereka berhasil mendaratkan anggota Militernya di salah satu pelabuhan penting di Mesir yaitu Alexandria. Sedangkan pemerintah Daulah Utsmaniyah mengalami kesulitan dalam merangkul wilayah-wilayah Islam yang termasuk dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian akhirnya Napoleon meninggalkan Mesir setelah mengalami kekalahan dalam melawan armada Inggris pada tanggal 31 Agustus 1801 M. Pasukan Inggris mendarat di Alexandria, mengalahkan Mesir di Tell-el Kebir pada tanggal 13 September 1882 M dan kemudian empat hari kemudian Inggris menduduki Kairo.<sup>66</sup>

Selama era pemerintahan kolonial Inggris di Mesir, negara ini mengalami transformasi besar di berbagai bidang, meliputi pemerintahan, dinamika militer, dan respons masyarakat terhadap dominasi eksternal. Dampak kolonialisme Inggris terhadap Mesir sangat beragam, sehingga memicu berbagai reaksi dan perlawanan dari para intelektual Mesir dan masyarakat luas. Di tengah latar belakang ini, Mesir menyaksikan gelombang upaya perlawanan yang

<sup>66</sup> Prof. Dr. Mehmet Maksudoglu, *The Unthold*, 339

bertujuan menantang otoritas kolonial Inggris. Tokoh-tokoh intelektual muncul sebagai garda depan perubahan, menggunakan kekuatan pengetahuan dan gagasan dalam upaya mereka untuk membebaskan Mesir dari kendali asing. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Lutfi al-Sayyid, Saad Zaghloul, dan Mustafa Kamil muncul sebagai tokoh reformis yang sangat penting, masing-masing memberikan kontribusi unik dalam perjuangan kedaulatan Mesir. Gerakan reformis yang dipimpin oleh para intelektual ini memiliki ciri pendekatan yang beragam, memadukan semangat keagamaan dengan nasionalisme sekuler dalam upaya mereka mencapai emansipasi Mesir. Saad Zaghloul, misalnya, melambangkan komitmen ganda ini dengan memperjuangkan nilai-nilai agama dan cita-cita nasionalis sekuler dalam perjuangan melawan imperialisme Inggris.<sup>67</sup> Tanpa disadari para cendekiawan serta kaum Intelektual Mesir menjadi permainan menarik oleh tangan Inggris dan menghancurkan potensi negara Islam sekaligus Kekhalifahan Islam.

Maka dari itu kemudian Sultan Abdul Hamid II tidak tinggal diam saja melihat hal itu terjadi dan berusaha meluruskan pandangan masyarakat Mesir mengenai ajaran nasionalis yang diajari secara mentah kepada Inggris. Berusaha meluruskan kembali pemahaman masyarakat Mesir dengan menyadarkan akan pentingnya persatuan Islam, bahwa persatuan Islam adalah jalan yang paling benar dalam

---

<sup>67</sup> Putri, "Pengaruh Pan Islamisme Terhadap Kehidupan Bangsa Mesir Tahun 1897-1922", dalam *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, (2013), 8

melawan penjajahan pemikiran dan penjajahan fisik yang dilakukan oleh Inggris terhadap Mesir.

Kemudian Sultan Abdul Hamid mulai mengenalkan gagasan Pan-Islamismenya pada kaum terpelajar Mesir, meski dirasa solusi di gaungkannya ide Pan-Islamisme tidak cukup kuat di tengah situasi yang genting, akan tetapi Sultan Abdul Hamid II mengungkapkan kepercayaan dan optimismenya terhadap persatuan Islam karena menurut Sultan, agama merupakan cara penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam dan Kekhilafahan Islam.

### **C. Hubungan Konsep Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II Dengan Jamaluddin Al-Afghani**

#### **1. Konsep pemikiran Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani**

Jamaluddin Al-Afghani atau dikenal dengan nama lengkap Al-Afghani Sayid Jamaluddin Al-Afghani, berdiri sebagai tokoh Islam terkemuka yang berasal dari keturunan Afganistan, menjaga garis keturunan langsung dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Husein Bin Ali bin Abi Thalib . Kelahirannya di desa Kanar, Afghanistan, bertepatan dengan kedatangan Inggris pada tahun 1836 M, menandai periode pergolakan kolonial yang secara signifikan

membentuk pandangan dunia dan kontribusinya terhadap reformasi Islam.<sup>68</sup>

Pendidikan awal Al-Afghani berakar pada ajaran agama di bawah bimbingan ayahnya yang terhormat, Sayyid Shaffar, seorang tokoh terhormat di desanya yang terkenal karena kecerdasan bisnis dan pengetahuan agamanya. Mengikuti bimbingan ayahnya, Al-Afghani memulai perjalanan pertumbuhan intelektual, melanjutkan studinya di Delhi di bawah bimbingan ulama terkenal seperti filsuf Muslim kelahiran Persia Ibnu Sina dan Nashiruddin Ath-Thusi.

Latar belakang munculnya Al-Afghani sebagai tokoh terkemuka adalah dominasi kolonial dan fragmentasi wilayah Islam oleh kekuatan Barat. Menyaksikan penjajahan di beberapa wilayah Muslim, Al-Afghani menjadi pendukung setia reformasi dan berupaya mengubah pola masyarakat dan tanah airnya. Visi beliau yang menyeluruh baik dalam bidang politik maupun agama berpusat pada penyatuan umat Islam di seluruh dunia di bawah kekhalfahan besar, yang menghidupkan kembali semangat umat Islam di tengah masa-masa penuh tantangan.

Inti dari warisan intelektual Al-Afghani adalah pembelaannya yang mendalam terhadap Pan-Islamisme, sebuah doktrin yang bertujuan untuk memupuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Muslim. Ideologi Pan-Islamnya bergema sebagai mercusuar harapan

---

<sup>68</sup> Arbi Mulya Sirait, "Jamaluddin Al-Afghani dan Karir Politikanya. Intelektual", dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol, 10 No. 2, (2020),167-182

bagi entitas politik Islam universal, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Asal usul Pan-Islamisme Al-Afghani dapat ditelusuri kembali ke peristiwa sejarah seperti perpindahan Sultan Mughal dan kendali Barat atas wilayah Muslim pada pertengahan abad ke-19, yang mendorong seruan kolektif di antara para pemimpin Islam dan reformis untuk bersatu dan bersatu. kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Dalam upayanya menghidupkan kembali persatuan umat Islam, Al-Afghani memelopori pembentukan asosiasi politik yang berakar pada solidaritas Islam, yang dikenal sebagai Jami'ah Islamiyah atau Pan-Islamisme. Asosiasi ini bertujuan untuk melampaui batas-batas geografis, mencakup umat Islam secara global, termasuk mereka yang tinggal di negara-negara merdeka dan wilayah kolonial seperti Persia. Tujuan bersama mereka adalah untuk menantang sistem pemerintahan despotik yang lazim pada masa mereka dan mengadvokasi bentuk pemerintahan yang lebih deliberatif dan berbasis Islam. Warisan abadi Al-Afghani tidak hanya terletak pada kontribusi teoretisnya tetapi juga pada upaya praktisnya untuk menggembleng umat Islam menuju visi bersama tentang persatuan dan reformasi.<sup>69</sup>

Pan-Islamisme yang dikampanyekan oleh Jamaluddin Al-Afghani tidak serta-merta berjalan mulus, banyak rintangan-rintangan yang dialami seperti Al-Afghani pernah di usir oleh pemerintahan

---

<sup>69</sup> Sitti Nurtina, "The Dynamics of Applying Pan-Islamism As A New Politic Concept", dalam *Jurnal Islamic World and Politics*, Vol. 3. No.1 (January-June 2019), 489

Inggris dan berhasil melarikan diri ke Kairo. Jamaluddin Al-Afghani yang dikenal oleh masyarakat di Kairo sebagai pejuang kedaulatan Islam, menyambut baik kedatangan Al-Afghani. Di Mesir, Al-Afghani memakai strategi dengan masuk ke dunia politik dan bergabung dengan *Fremassonry* Mesir yang merupakan organisasi anti zionis, hal ini dilakukan untuk menghindari Inggris yang ingin memasuki pemerintahan Mesir.<sup>70</sup>

Begitupula dalam usahanya melawan Imperialis Barat, selain menyebarkan Pan-Islamisme di kalangan masyarakat, Jamaluddin Al-Afghani juga turun aktif dalam membuat karya tulis atau majalah yang berisikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah yang pro dengan negara Barat. Salah satu bentuk karya tulisan Jamaluddin Al-Afghani yang berisi semangat Pan-Islamisme ialah jurnal yang diterbitkan pada 13 Maret 1884 M dengan judul *Al-Urwatul Wutsqo*. Jurnal *Al-Urwatul Wutsqo* yang ditulis Al-Afghani ini berisikan beberapa tujuan yakni:

- a) Untuk memberikan gambaran atau informasi mengenai tipu daya kaum Imperialis, dan untuk membangkitkan semangat dan persatuan politik umat Islam dengan mengungkap mengenai negara-negara Eropa yang memanfaatkan perselisihan diantara negara Islam
- b) Untuk menjaga batasan di setiap negara dalam naungan wilayah Islam

---

<sup>70</sup> Akmal Hawi, "Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (Jamal Ad-Din Al-Afghani) (1838–1897 M) 2017)", dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol, 13 No. 1, 2017), 9-24

- c) Sebagai bentuk perjuangan bagi pembebasan negara-negara yang dijajah oleh kolonial Barat.<sup>71</sup>

Bukan hanya Jurnal *Al-Urwatul Wutsqo* yang ditulis oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai bentuk usahanya dalam melawan Imperialis Barat dan mengkampanyekan semangat Pan-Islamisme, akan tetapi ia juga menulis beberapa majalah yang berisikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah yang pro dengan negara Barat. Salah satunya majalah *Dliyaul Khafiqqain* yang berisi kritikan terhadap pemerintahan di Iran, pemerintahan Iran tidak menginginkan kritikan tersebut terus beredar, sehingga kemudian mengantarkan Jamaluddin Al-Afghani ke Istanbul.<sup>72</sup>

## 2. Hubungan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dengan Sultan Abdul Hamid II

Mengenai upayanya dalam mempersatukan Islam, Sultan Abdul Hamid II mengundang Jamaluddin Al-Afghani, seseorang yang dianggap intelektual yang populer ke Istana Yildiz atau ke kediaman Sultan Abdul Hamid II dengan mengirim surat lewat mufti kerajaan yaitu Syaikh Abdul Huda As-Syajadi. Sultan Abdul Hamid II serius dalam upayanya untuk mempersatukan umat Islam di bidang politik. Maka dalam hal ini, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan diri untuk menjembatani ide yang di gagas ini serta berusaha meyakinkan Sultan

<sup>71</sup> Sirojuddin AR, "Jamaluddin Al-Afghani, Api Pan-Islamisme dan kegiatan politik", dalam *Journal of humanities Al-Turas*, Vol, 10 No. 2, (2004), 142

<sup>72</sup> Hadikusuma, Djarnawi, *Aliran pembaruan Islam: dari Jamaluddin Al-Afghani hingga KH Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 36

mengenai kemungkinan adanya kerjasama antara kaum Syiah dengan Ahlussunnah dalam upaya melawan kekuatan non-Muslim. Seperti yang dituliskan Sultan Abdul Hamid II dalam catatan hariannya:

Aku mengundang dia (Al-Afghani ke Istanbul melalui Syaikh Abdul-Huda As-Syajadi yang memperleh kedudukan terhormat di setiap negeri Arab. Baik Munif Pasha (pelindung sebelumnya bagi Al-Afghani) maupun ahli syair Abdul Haq Hamid segera memberikan bantuan kepadanya. Al-Afghani datang ke Istanbul dan aku tidak pernah membiarkannya keluar lagi.<sup>73</sup>

Salah satu bentuk ketertarikan Sultan Abdul Hamid II kepada Jamaluddin Al-Afghani ialah Sultan tertarik dengan salah satu karya Jamaluddin Al-Afghani bentuk terjemahan ke dalam Bahasa Turki yang begitu populer yaitu *al-Raddu Ala al-Dahriyyi* yang berisi keritikan terhadap kaum materialisme seperti Midhat Pasha yang merupakan orang yang memang sebelumnya selalu menjadi penghalang bagi Sultan Abdul Hamid II. Namun seiring waktu, ternyata terdapat banyak perbedaan dengan maksud Pan-Islamisme antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II. Letak persamaan antara keduanya ternyata hanyalah sebatas semangat dalam menghilangkan kolonialisme dari dunia Islam. Konsep Pan-Islamisme yang di gagas oleh Jamaluddin Al-Afghani merupakan sebuah pandangan Pan-Islamisme modern dengan bentuk pembaharuan dan mengikuti perkembangan zaman, yang bermaksud untuk menyatukan negara-negara sekaligus umat Islam di seluruh dunia menjadi sebuah kekuatan

---

<sup>73</sup> DR. Muhammad Harb, *Memoar*, 127

yang dapat mengimbangi kekuatan kolonialisme atau negara-negara Barat sehingga tercipta sebuah keseimbangan yang akan melahirkan akulturasi budaya maupun pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam perkembangan ilmu sains maupun teknologi, bangsa Eropa lebih modern dan lebih unggul sehingga menurut Jamaluddin Al-Afghani inilah salah satu alasan Daulah Utsmaniyah tidak dapat di pertahankan. Dengan konsep Pan-Islamisme tersebut, menurut Jamaluddin Al-Afghani, puncaknya nanti akan tercipta rasa keadilan dan perdamaian di dunia. Sedangkan gagasan Pan-Islamisme yang dimaksud Sultan Abdul Hamid II ialah, Sultan bermaksud untuk menempatkan seluruh negara-negara Islam ke dalam wilayah kekuasaannya.

Selain terdapat perbedaan konsep mengenai Pan-Islamisme antara Sultan Abdul Hamid II dengan Jamaluddin Al-Afghani, Al-Afghani juga menawarkan sebuah proyek yang besar yakni bermaksud menyatukan kalangan Sunni dan Syi'ah, dikarenakan Al-Afghani sendiri memang lahir di kalangan Syi'ah yang memegang prinsip Taqiyyah. Nama atau julukan "Al-Afghani" yang menjadi nama belakang Jamaluddin Al-Afghani merupakan nama yang di peroleh setelah ia meninggalkan Afghanistan, yang mana ketika ia meninggalkan Afghanistan pada tahun 1866 M, Al-Afghani mengenalkan dirinya sebagai penasehat politik, hal ini ia lakukan dengan tujuan dapat

memperoleh kepercayaan serta dukungan dari umat Islam dengan mayoritas Sunni, dengan menganggap bahwa dirinya Sunni.<sup>74</sup>

Akan tetapi, proyek yang ditawarkan oleh Al-Afghani ini, lagi-lagi di tolak dan tidak mendapatkan dukungan dari Sultan Abdul Hamid II, yang mana tujuan Sultan sendiri hanya sebatas untuk penyatuan umat Muslim yang pada saat itu sedang terpecah-belah untuk melawan kolonialisme. Ketidakselarasan pemikiran antara Sultan Abdul Hamid dengan Jamaluddin Al-Afghani membuat eksistensi Daulah Usmaniyah semakin mencemaskan dan terancam semakin terpecah-belah dengan konsep Pan-Islamisme modern yang di bawa Jamaluddin Al-Afghani ke dalam Daulah Utsmaniyah. Al-Afghani mengusung gerakan nasionalisme modern yang merupakan hasil dari hasutan negara-negara Eropa. Maka kemudian dari situ, Sultan Abdul Hamid kemudian Kembali mengundang Jamaluddin Al-Afghani ke Istana Yildiz, untuk memberikan peringatan atas batasannya dan berhenti untuk mempropagandakan pemikirannya maupun konsep Pan-Islamisme modern lagi.<sup>75</sup> Sultan Abdul Hamid II yang dikenal sebagai anti-Inggris, kemudian menyebut Jamaluddin Al-Afghani sebagai seorang “pelawak” atau “kaki tangan Inggris”. Seperti yang ditulis oleh Sultan Adul Hamid dalam sebuah catatan hariannya:

Aku mendapati sebuah agenda yang dipersiapkan oleh Kementrian Luar Negeri Inggris dengan menghadirkan tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani dan juga Blent yang merupakan salah satu warga Inggris. Dalam

---

<sup>74</sup> Nicko pandawa, 113

<sup>75</sup> Ibid.

pertemuan itu, kedua tokoh tersebut bermaksud menyerukan penghapusan kekhilafahan Islam di Turki, mereka mengusulkan supaya Inggris mengumumkan Syarif Hasan yang merupakan walikota Mekkah sebagai khalifah umat Islam. Dan pada suatu ketika, Jamaluddin Al-Afghani mengusulkan kepadaku Al-Mahdiyyah dan menggerakkan seluruh umat Muslim di Asia Tengah untuk agendanya ini. Aku tau ia tidak mampu mewujudkan ini, ternyata ia merupakan kaki tangan Inggris.<sup>76</sup>

Seorang warga Inggris yang dimaksud, yaitu Wilfrid Scawen Blunt merupakan seorang yang berpengaruh di Inggris. Agen Inggris yang membawa semangat “Khilafah Arab” untuk melepaskan suku-suku Arab, Nasionalis liberal Mesir dan beberapa ulama modernis di Al-Azhar untuk melepaskan diri dari pemerintahan Utsmaniyah, dengan menjalin relasi dengan tokoh-tokoh tersebut. awal hubungan kerjasama antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Inggris ini dimulai pada saat pertemuan awalnya dengan Blunt di London pada tahun 1883 M, yang pertamakali disarankan oleh Muhammad Abduh, murid Al-Afghani yang lebih dulu mengenal Blunt. Maka kemudian perlahan-lahan, Jamaluddin Al-Afghani yang sebelumnya juga dikenal sebagai anti-Inggris kemudian tertarik dengan pemikiran Blunt, dan diam-diam mulai berupaya mengendalikan Inggris untuk memerdekakan Arab dari orang-orang Turki.<sup>77</sup>

Cara berpolitik Jamaludin Al-Afghani yang modern itu, menawarkan konsep kebebasan berpikir, yang menurutnya kebebasan berfikir tidak hanya dapat dimiliki oleh raja ataupun kalangan penguasa

<sup>76</sup> DR. Muhammad Harb, *Memoar*, 14

<sup>77</sup> Nicko Pandawa, *Khilafah*, 112

Jamaluddin Al-Afghani bermaksud mengganti sistem pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sedangkan menurut Sultan Abdul Hamid II, kebebasan berfikir dan berpendapat hanya di pegang oleh raja atau penguasa untuk bertindak sesuatu yang tidak di atur di dalam undang-undang, Sultan berpendapat bahwa pemerintahan absolut dan otokratis tidak memiliki kebebasan berpendapat.<sup>78</sup> Maka dari itu, Sultan Abdul Hamid tidak sepakat jika kekhalifahan yang berjalan berabad-abad lamanya di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah kemudian digulingkan dengan model pemikiran modern yang di usung oleh Jamaluddin Al-Afghani.

Kecemasan Sultan Abdul Hamid semakin bertambah dengan eksistensi Jamaluddin Al-Afghani yang begitu terkenal saat itu, salah satunya dilihat dari hasil buah pemikiran Al-afghani yang berhasil menumbuhkan semangat nasionalisme Arab “Khalifah Arab” yang di kampanyekan oleh al-Hizb Al-Wahthani yang menyerukan nasionalisme di Mesir supaya bebas dari pemimpin bangsa Turki atau dikenal dengan istilah “Mesir untuk orang Mesir”.<sup>79</sup> Maka dari itu, Sultan Abdul Hamid tidak ingin nasib Daulah Utsmaniyah pada akhirnya sama dengan pemimpin-pemimpin di Mesir, India, maupun Irak yang lengser akibat kekuatan Jamaluddin Al-Afghani beserta jama’ahnya.

Kemudian pada saat Sultan Abdul Hamid II mendengar kerjasama antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Inggris tersebut, maka

<sup>78</sup> Dela Melisa Nur Alam, “ Pan Islamisme Jamaluddin Al Afghani Dalam Perspektif Politik Islam”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 5

<sup>79</sup> Nicko pandawa, *Khilafah*, 134

Sultan Abdul Hamid II kemudian mengundang kembali Al-Afghani ke Istanbul untuk membatasi gerak pemikiran modernnya di dalam pemerintah Daulah Ustmaniyah dan setelah itu Jamaluddin Al-Afghani tidak pernah diizinkan keluar dari Istanbul. Meski sempat meminta bantuan kepada kedutaan Inggris dikarenakan kondisi Al-Afghani yang semakin memprihatinkan dengan sakitnya yang ia derita di dalam tahanan, dengan mengirimkan surat kepada Sultan Abdul Hamid II, namun Jamaluddin Al-Afghani diminta agar supaya menarik kembali surat tersebut karena tidak layak jika seorang ulama meminta bantuan kepada Inggris dan tentunya Sultan Abdul Hamid II tentu juga memiliki belas kasihan dengan dengan mendatangkan penanganan. Hingga pada akhirnya Jamaluddin Al-Afghani meninggal pada bulan Maret 1697 M di usianya yang ke 58 Tahun.<sup>80</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>80</sup> Hadikusuma, Djarnawi, *Aliran pembaruan Islam: dari Jamaluddin Al-Afghani hingga KH Ahmad Dahlan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), 4

## BAB IV

### STRATEGI KEBIJAKAN PAN-ISLAMISME SULTAN ABDUL HAMID II

#### A. Strategi Propaganda Media Massa

Tujuan dari kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II tentu akan tercapai dengan strategi atau penyebaran gagasan yang dapat disampaikan dengan baik terhadap umat Islam. Dengan tujuan untuk membuat kejayaan Islam berdiri kembali serta mengembalikan keutuhan Daulah Utsmaniyah seperti sebelumnya, salah satunya dengan strategi penyebaran Pan-Islamisme menggunakan media massa. Sebagai dampak atau akibat dari adanya kontak hubungan antara umat Islam dengan Eropa, selain dampak negatif juga memberikan dampak positif bagi umat Islam, salah satunya mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang teknologi dan intelektual. Adanya hubungan yang erat atau interaksi yang sering terjadi di antara umat Islam dengan orang-orang Barat juga berdampak pada peningkatan pers atau media informasi milik umat Islam. Media informasi atau pers merupakan salah satu sarana dalam dakwah Islam sekaaligus strategi penyebaran Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II sejak awal pemerintahannya.<sup>81</sup>

Munculnya media pers menandai perubahan transformatif dalam paradigma komunikasi, peralihan dari metode lisan tradisional ke format tertulis yang merevolusi penyebaran informasi. Meskipun bersifat satu arah,

---

<sup>81</sup> Ahmad Salman Kurniawan, Nurfitri Hadi, "Pengaruh Pan Islamisme Bagi Kekhilafahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II", dalam *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 2 No. 2, (2022), 190

media pers memiliki potensi besar dalam mengkatalisasi revolusi komunikasi, meningkatkan kesadaran kolektif di berbagai bidang termasuk kepentingan publik, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola negara. Sartono Kartodirjo, seorang akademisi terkemuka, menggarisbawahi peran penting media pers dalam menumbuhkan pemikiran kritis dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif, dan menumbuhkan pemahaman luas tentang dinamika masyarakat. Memang benar, media pers muncul sebagai alat ampuh yang mampu mempengaruhi narasi politik dan memfasilitasi implementasi kebijakan strategis.<sup>82</sup>

Kekuatan transformatif media pers ini bergema dalam pendekatan strategis Sultan Abdul Hamid II untuk menyebarkan doktrin politik Pan-Islamisme. Penyebaran cita-cita Pan-Islamis mendapatkan momentumnya melalui pers, yang berfungsi sebagai platform untuk menyatukan umat Islam dan melawan kepentingan kekuatan imperialis. Di masa Kesultanan Utsmaniyah, perkembangan surat kabar dan majalah meluas. Pada tahun 1876 M, jumlah publikasi cetak melonjak menjadi 107, menandai peningkatan signifikan dalam penyebaran informasi. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan pertumbuhan eksponensial, dengan angka sirkulasi berkisar antara 200 hingga 500 eksemplar pada tahun 1900 M dan lonjakan yang luar biasa hingga 1000 surat kabar dan majalah yang beredar pada tahun 1914 M. Perkembangan media cetak ini tidak hanya memperluas akses terhadap informasi namun juga mengkatalisasi gerakan sosial dan

---

<sup>82</sup> Septian Anto Waginugroho, "Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924-1927", dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1, (2023), 30

politik, membentuk wacana publik dan mempengaruhi lanskap kebijakan. Peran media pers sebagai katalisator transformasi masyarakat dan mobilisasi politik menegaskan pentingnya peran media sebagai landasan sistem komunikasi modern.<sup>83</sup>

Propaganda media Utsmaniyah semakin tersebar luas ke penjuru negeri serta Pan-Islamisme terus berkembang dalam penyebaran pemikiran Islam, sehingga hal ini menimbulkan ketakutan oleh para tokoh Barat dan orang-orang Kristen yang berada dalam naungan Dulah Utsmaniyah akan kebangkitan Islam. Pan-Islamisme yang marak di perbincangkan di media menimbulkan berbagai respon dari masyarakat Utsmani sendiri bahkan di kalangan Eropa dan Barat. Strategi Pan-Islamisme melalui propaganda media massa ini terus dilakukan sampai terwujudnya tujuan Pan-Islamisme yaitu untuk mempersatukan umat Muslim di seluruh dunia dalam melawan pemikiran dan upaya-upaya orang Barat untuk melemahkan umat Muslim. Sehingga pada tahun 1878 M terbit surat kabar yang ditulis oleh Arminius Vamber dengan tulisannya bahwa semakin hari populasi Muslim di India semakin pesat dan tidak mungkin jika hal ini tidak terjadi di masa depan. Dalam tulisannya, Arminius Vamber menjelaskan bahwa akan sangat di sayangkan jika orang-orang Barat atau Kristen diam saja tanpa melakukan sesuatu.<sup>84</sup>

Dalam kronik sejarah tahun 1894-1895 M, Armenia menjadi

---

<sup>83</sup> Ahmad Salman Kurniawan, Nurfitri Hadi, "Pengaruh Pan Islamisme Bagi Kekhilafahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II", dalam *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 2 No. 2, (2022), 190

<sup>84</sup> Lee, D. E., *The Origins Of Pan-Islamism. The American Historical Review* (Oxford: Oxford University Press, 1942), 278-287

panggung pemberontakan yang bergema lintas batas internasional, hingga menuai tanggapan dari berbagai penjuru dunia yang ditujukan kepada Daulah Utsmaniyah. Dalam wacana global ini, umat Islam di berbagai wilayah, termasuk India, menyuarakan solidaritas mereka melalui artikel dan editorial di surat kabar. Mereka dengan keras mengutuk campur tangan dan tuduhan yang dilontarkan oleh pers Eropa terhadap orang-orang Armenia, dan menyatakan bahwa orang-orang Eropa tidak mempunyai klaim yang sah untuk mendukung atau membantu perjuangan Armenia. Alasan mereka didasarkan pada premis bahwa populasi Muslim di Armenia tetap berada di bawah kedaulatan Kekaisaran Utsmani, sehingga tidak ada campur tangan kekuatan eksternal.<sup>85</sup>

Pada saat yang sama, ideologi Pan-Islamisme, yang menganjurkan persatuan umat Islam di seluruh dunia, mendapat gaung bahkan di Hindia Belanda. Dakwah ini tidak lepas dari upaya tokoh-tokoh seperti Sayyid Fadl Pasa, utusan Sultan Abdul Hamid II, yang mengutamakan penguatan hubungan dengan penduduk Hindia Belanda. Melalui berbagai cara, termasuk penjangkauan media, Pan-Islamisme memperoleh daya tarik di wilayah tersebut. Basiret, sebuah surat kabar yang didirikan oleh Utsmani Ali Efendi pada tahun 1870 M dan diterbitkan di Istanbul, muncul sebagai platform penting untuk menyebarkan cita-cita Pan-Islamis. Diperjuangkan oleh Utsmani Muda, Basiret mempromosikan konsep Ittihad al-Islam (Pan-

---

<sup>85</sup> Ahmad Salman Kurniawan, Nurfitri Hadi, "Pengaruh Pan Islamisme Bagi Kekhilafahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II", dalam *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 2 No. 2, (2022), 204

Islamisme) sebagai respon strategis terhadap ideologi ekspansionis Pan-Slavisme dan Pan-Jermanisme yang dianut oleh Eropa.<sup>86</sup>

Periode tahun 1873-1904 M menjadi saksi terjadinya Perang Aceh, konflik antara masyarakat Aceh dengan kekuatan kolonial Belanda. Perang ini bergema secara global, mengingat Kesultanan Aceh mempunyai predikat sebagai kesultanan Islam terbesar di Asia Tenggara dan Samudera Hindia. Akibatnya, reaksi terhadap Perang Aceh meluas melampaui dunia Melayu, bahkan menimbulkan tanggapan di kalangan Kekhalifahan Utsmani.<sup>87</sup>

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M), surat kabar Besiret menjadi semakin penting sebagai corong kebijakan Pan-Islamis. Sultan Abdul Hamid II, yang dikenal karena pembelaannya terhadap Pan-Islamisme, menggunakan Besiret untuk menyebarkan visinya dan melaporkan tentang cahaya umat Islam di bawah pemerintahan kolonial Eropa. Upaya terpadu ini bertujuan untuk menggalang dukungan terhadap perjuangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di wilayah seperti Belanda dan Malaya Britania, di mana dominasi kolonial menimbulkan tantangan besar terhadap identitas dan kedaulatan Islam. Oleh karena itu, Besiret memainkan peran penting dalam kampanye Sultan Abdul Hamid II untuk menumbuhkan solidaritas dan perlawanan terhadap gangguan kolonial di dunia Muslim.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Ahmad Salman Kurniawan, Nurfitri Hadi, "Pengaruh Pan Islamisme, 190

<sup>87</sup> Iin Sayyi Mawarti, "Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mmempertahankan Kekhalifahan Turki Utsmani Tahun 1876-1909", (*Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023)

<sup>88</sup> Frial Ramadhan Supratman, "Surat Kabar Basiret: Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo", dalam *Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol, 15 No. 1, (2019), 95

Di dalam surat kabar *Besiret* memberitakan mengenai Perang Aceh dengan perspektif Pan-Islamisme. Artinya, Surat kabar *Besiret* memperlihatkan bahwa Aceh merupakan negara Muslim yang berada di bawah perlindungan Daulah Utsmaniyah. Pada tanggal 27 Mei 1873 M di dalam surat kabar *Besiret* di kabarkan bahwa masyarakat Aceh merupakan warga negara Utsmani, buktinya adalah dengan bendera Kesultanan Aceh yang berlambang Bulan Bintang. Surat kabar *Besiret* bertujuan untuk memberikan informasi kepada sultan-sultan Utsmani agar memberikan bantuan militer maupun diplomasi untuk membantu Aceh dalam mengatasi serangan Belanda. Negara Utsmani menjadi hal yang penting karena pada saat itu merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dan Sultan Abdul Hamid juga di gelari sebagai Pemimpin Muslim (Amirul Mukminin) dengan kebijakan Pan-Islamismenya.

Surat kabar *Besiret* merupakan salah satu respon Utsmani terhadap imperialisme yang terjadi di wilayah-wilayah Muslim, seperti Hindia Belanda, India hingga British. Salah satunya yang mengabarkan mengenai Perang Aceh secara spesifik yaitu surat kabar *Besiret*. Beberapa media di Timur Tengah juga ikut serta memberitakan mengenai permasalahan di Hindia Belanda, diantaranya yaitu dengan menerbitkan surat kabar *Al-Ma'lumat* (Turki), *Mua'yyad* (Mesir), dan *Thamarat Al-Funun* (Beirut). Seruan Pan-Islamisme mulai lantang di sebarluaskan di media pers, dengan tujuan agar supaya umat Islam bersatu dan tidak diperlakukan sesuka hati

demi kepentingan negara-negara imperialis.<sup>89</sup>

Salah satu surat kabar yang lain yang juga berisi mengenai Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah surat kabar Utsmani *Siratimustakim Sebilurresad*, penulisan majalah ini dipimpin oleh Mehmed Akif Eksoy yang di terbitkan di Istanbul pada tahun 1913-1914 M dan terdapat 11 jilid. *Siratimustakim Sebilurresad*, di terbitkan dalam rangka menyebarkan gagasan Pan-Islamisme yang di inisiasikan oleh Sultan Abdul Hamid II yang berasaskan Persatuan Umat Islam dibawah payung Kekhalifahan Utsmani dalam menghadapi cengkraman kolonialisasi massif Eropa di negeri-negeri umat Islam. Tidak hanya diterbitkan di Istanbul, surat kabar ini diterbitkan di seluruh wilayah Anatolia. Dan pengaruhnya terbukti ampuh melahirkan kebangkitan umat Islam di Rusia, Arab hingga India. Dalam surat kabar Utsmani *Siratimustakim Sebilurresad* untuk periode September 1913-Maret 2014 jilid ke-11 disebutkan bahwa kebangkitan umat Islam melawan penjajah telah dimulai dari madrasah-madrasah yang dikelola komunitas Jawa dan Arab yang untuk di Batavia telah memiliki 4 Madrasah, dan masing-masingnya memiliki 80 santri. Disini disebutkan pula bahwa Surabaya, Solo (Surakarta) dan Batavia dengan sarekat Islamnya dan tertulis bahwa pulau Jawa telah berubah benua Utsmaniyah karena bendera Utsmani dikibarkan di semua cabang perusahaan ini.<sup>90</sup>

Ada banyak buku, jurnal, maupun pamflet yang berisi mengenai Pan-Islamisme diterbitkan pada masa Sultan Abdul Hamid II. Salah satu

<sup>89</sup> Frial Ramadhan Supratman, "Surat Kabar Basiret", 99

<sup>90</sup> [bagcilar.bel.tr/Files/eKitap/siratimustakim\\_sebilurresad/turkce/cilt\\_11.pdf](http://bagcilar.bel.tr/Files/eKitap/siratimustakim_sebilurresad/turkce/cilt_11.pdf) , 28 Februari 2024, 330

diantaranya yaitu, terdapat 212 buku dan famplet ditulis diantara tahun 1878 sampai 1908 oleh Syekh Abu al-Huda al-Sayyadi, Media massa Al-Jawaib yang ditulis oleh Ahmad Faris Al-Shidyaq pada tahun 1860 M, surat kabar *L'Orient Journal de Defense des Inten'ts de l'Empire Utsmani*, Media Pers Urdu dengan judul *Peik Islim* (Utusan Islam) yang di tulis pada tahun 1881 M dan di terbitkan di Istanbul lalu di sebarakan ke India.<sup>91</sup>

Strategi propaganda media massa dalam penyebaran Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II masih terus dilakukan pada saat pemerintahan Turki Muda. Beberapa buku yang diterbitkan pada masa ini diantaranya ialah, buku yang ditulis oleh Sulayman Nazif berjudul *Kebenaran Bukan Fantasi* yang diterbitkan pada tahun 1918 M, buku yang di tulis oleh Celal Nuri berjudul *Islamlasmak* (Islamisasi), famplet yang di tulis oleh Said Halim berjudul *Buhranlarimiz* (krisis kita), buku *Turlesmek, islamlasmak, muasirlasmak* (Mengadopsi Turkisme, Islamisme, dan Modernisasi) yang di tulis oleh Ziya Gokalp, jurnal mingguan yang merupakan editan dari Abd Al-Aziz Shawish dengan judul *Al-Alam Al-Islam* (Dunia Islam), dan lain-lain. Tulisan-tulisan ini kemudian di edarkan ke berbagai daerah, seperti daerah Arab, Eropa, Syria, India, Asia Tenggara, dan Afrika Utara.<sup>92</sup>

## B. Strategi Penyebaran Pan-Islamisme Melalui Pengiriman Konsuler

Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, aliran ideologi yang berbeda

<sup>91</sup> Jacob M. Landau, *Pan-Islam History And Politics* (New York : Oxfort University Pers, 1990),60

<sup>92</sup> Frial Ramadhan Supratman, "Surat Kabar Basiret: Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo", dalam *Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol, 15 No. 1, (2019), 191

melingkupi wilayah kekuasaannya, dan tidak semua penganutnya condong ke ideologi Barat. Sultan Abdul Hamid II, menyadari perlunya memperkuat prinsip-prinsip Islam di dalam Daulah Utsmani, mengumpulkan kader orang-orang terpercaya di Istana Yildiz. Kolektif ini bertujuan untuk bersama-sama menjunjung kesucian Daulah Utsmaniyah sekaligus memperjuangkan keutamaan Syariat Islam. Inti dari upaya ini adalah misi diplomatik yang ditargetkan yang dikirim ke wilayah-wilayah yang dianggap rentan terhadap pengaruh gagasan Barat. Para petugas konsuler ini, yang bertindak di bawah arahan Sultan Abdul Hamid II, memulai kunjungan strategis untuk memperkuat struktur Islamisme Utsmani di seluruh dunia Islam. Di antara tokoh-tokoh penting yang dipercayakan dengan misi penting ini adalah:

1. Syakh Muhammad Zafir Pasha

Berasal dari Libya dan berafiliasi dengan tarekat Syaziliyyah-Madaniyyah, Syekh Muhammad Zafir Pasha mengambil peran penting dalam memajukan propaganda Pan-Islamis di Afrika Utara dan Mesir, di bawah naungan Sultan Abdul Hamid II.

2. Sayyid Fadl Al-'Alawi Al-Husaini Pasa

Seorang tokoh terhormat dari Tarim, Hadramaut, Sayyid Fadl Al-'Alawi Al-Husaini Pasha memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki jaringan yang kuat di India dan Asia. Ditugaskan oleh Sultan Abdul Hamid II, ia mempelopori upaya untuk memperkuat Pan-Islamisme dari

wilayah Yaman hingga Asia Tenggara, memanfaatkan koneksi dan kredibilitasnya dalam komunitas Islam.

3. Syaykh Ahmad As'ad Pasa

Seorang ulama terkemuka dan pedagang kaya yang tinggal di Hijaz, Syekh Ahmad As'ad Pasha mengemban tanggung jawab untuk memperkuat sentimen Pan-Islamis di wilayah Hijaz dan di antara suku-suku Arab di Yaman. Perannya yang beragam mencakup dimensi agama dan ekonomi, selaras dengan visi Sultan Abdul Hamid II yang lebih luas untuk memperkuat solidaritas Islam.

4. Syaykh Abu Al-Huda Al-Sayyadi Pasa

Berasal dari Aleppo, Syria, Syekh Abu Al-Huda Al-Sayyadi Pasha, seorang pemimpin tarekat Rifa'iyyah, dipercaya untuk memperluas Pan-Islamisme di wilayah Syam, Irak, dan wilayah tertentu di Hijaz. Latar belakang keilmuan dan otoritas spiritualnya berperan penting dalam menumbuhkan narasi Pan-Islamis yang kohesif di berbagai wilayah di bawah pengaruh Utsmaniyah.<sup>93</sup>

Keempat utusan Sultan Abdul Hamid II ini dikirim ke wilayah tugasnya masing-masing. Seperti Sayyid Fadhl Pasa yang pernah melakukan kunjungan ke India. Akan tetapi belum pernah untuk wilayah Hindia-Belanda. Namun walaupun Sayyid Fadl Pasa belum pernah melakukan kunjungan ke Hindia-Belanda, ia tetap memperkuat ikatan Hindia-Belanda dengan Daulah Utsmaniyah dengan melakukan beberapa prioritas yakni, 1.)

---

<sup>93</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 71

memberikan beasiswa pendidikan, 2.) melakukan perbaikan serta mengirim bantuan untuk praktik-praktik sufi, 3.) pengencaran agitasi Pan-Islamisme melalui media pers.

Pada tahun 1886 M Sultan Abdul Hamid II juga menempatkan Ahmad Kamil bin Abdullah Al-Qadri yaitu seorang Hadrami yang lama tinggal di Hindia-Belanda supaya menjadi sebagai penerjemah resmi Bahasa Melayu di Istanbul atau sebagai “djoroe-bahasa dari Bahasa bawah angin di Stamboul”. Kitab-kitab agama di terjemahkan oleh Ahmad Kamil bin Abdullah Al-Qadri dan dicetak di Istanbul kemudian didistribusikan ke Batavia.<sup>94</sup> Sultan Abdul Hamid II mengirim utusan yang terdiri dari para ulama, para sufi, pedagang, dan orang-orang penting lainnya ke berbagai wilayah yang dengan populasi masyarakat Muslim yang ada di wilayah Asia, Timur tengah, bahkan Afrika, dengan tujuan untuk menjalin rasa emosional umat Islam yang ada di wilayah-wilayah tersebut dengan Khilafah.<sup>95</sup>

Dalam sejarah diplomasi Utsmaniyah, tahun 1885 M menandai perluasan kehadiran internasional kesultanan secara signifikan. Kantor konsulat diresmikan di ibu kota utama Eropa seperti Jerman, Hongaria, Austria, Belgia, Spanyol, Prancis, Inggris, Italia, Belanda, serta lokasi strategis di Iran, Rumania, Rusia, Serbia, Yunani, Swedia, Denmark, Norwegia, dan Portugal. Upaya terpadu ini mencerminkan keterlibatan

<sup>94</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 72

<sup>95</sup> Siti Rohmah Soekarba, Frial Ramadhan Supratman, “From Abdul Hamid II until Erdogan: Pan-Islamisme Movement in Indonesia and Turkey, dalam *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol, 9 No. 1, (2022)

Kesultanan Utsmaniyah dalam tatanan global yang terus berkembang, serta menyelaraskan diri dengan norma dan praktik diplomatik Eropa. Integrasi Daulah Utsmani ke dalam kerangka diplomatik Eropa berakar pada tahun 1856 M ketika mereka secara resmi bergabung dengan "keluarga Eropa". Keputusan penting ini memfasilitasi penerapan standar hukum Eropa di dalam Kekhalifahan dan mendirikan kantor konsultasi timbal balik di Istanbul antara Kekaisaran Utsmani dan negara-negara Eropa. Pada saat yang sama, Daulah Utsmani memperluas jangkauan diplomatiknya dengan mendirikan kantor konsulat di wilayah Eropa dan wilayah Muslim di bawah kekuasaan Eropa, yang menunjukkan hubungan simbiosis yang bertujuan untuk membina kerja sama internasional dan pertukaran diplomatik.

Penempatan kantor konsulat yang strategis tidak hanya terbatas di Eropa saja tetapi meluas ke wilayah-wilayah yang memiliki kepentingan strategis. Yang menonjol di antaranya adalah kantor konsulat di Singarupa yang didirikan pada tahun 1864 dan kantor konsulat Batavia pada tahun 1882 M. Inisiatif terakhir, yang didukung oleh Seyyit Mustafa Fazil Pasha, seorang pejabat terhormat di Daulah Utsmaniyah, menggarisbawahi minat besar Kesultanan Utsmaniyah dalam membina hubungan dengan komunitas-komunitas di Hindia Timur, khususnya komunitas Arab Hadrami yang berpengaruh di Batavia. Masa jabatan Muhammad Kamil Bey sebagai konsul di Batavia pada tahun 1897 hingga 1899 M menandai periode penting dalam diplomasi Utsmani di Asia Tenggara. Ketajaman diplomatik dan komitmen Kamil Bey terhadap Pan-Islamisme membuahkan prestasi

penting selama konsulatnya. Namun, pendekatan proaktif dan keselarasan dengan kebijakan Pan-Islamis Sultan Abdul Hamid II menuai kritik dari otoritas Belanda, yang memandang tindakannya mengganggu dan bertujuan mengobarkan sentimen anti-Belanda di kalangan Muslim setempat. Upaya Kamil Bey berfokus pada membina ikatan yang kuat dengan masyarakat Muslim setempat, khususnya Arab Hadrami, sejalan dengan strategi Sultan Abdul Hamid II yang lebih luas dalam mengintegrasikan komunitas Arab ke dalam wilayah Utsmani di tengah meningkatnya sentimen nasionalis. Memanfaatkan pers sebagai alat komunikasi, Kamil Bey mengangkat keluhan umat Islam di Batavia menjadi perhatian internasional, meliputi di surat kabar Timur Tengah dan menyoroti tantangan yang dihadapi umat Islam di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Aktivisme diplomatik ini tidak hanya mencerminkan jangkauan global Kesultanan Utsmaniyah namun juga menggarisbawahi dinamika rumit Pan-Islamisme dan perlawanan kolonial di awal abad ke-20.<sup>96</sup>

Para Konsulat Utsmaniyah yang diutus oleh Sultan Abdul Hamid II di Batavia diantaranya ialah:

1. Sayyid ‘Abd Aziz Al-Musawi Al-Baghdadi (1882-1883 M)
2. Ali Galip Bey (1883-1886 M)
3. Ismail Zuhdu Bey (1886 M)
4. Ahmet Rifki Bey (1886-1893 M)
5. Veliyuddin Semsi Bey (1893-1895 M)

---

<sup>96</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 196

6. Mehmet Fuad Bey (1895-1897 M)
7. Mehmet Kemil Bey (1897-1898 M)
8. Emin Bey (1898-1900 M)
9. Sadik Belig Bey (1900-1904)
10. Ahmet Ibrahim Rasim Bey (1904-1908 M)<sup>97</sup>

Sebagai bentuk dari strategi kebijakan politik pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II, tugas para konsulat yang dikirim oleh Sultan Abdul Hamid II lebih dari sekedar mengurus warga negaranya yang ada di negeri orang. Sesuai dengan pernyataan yang ada di *Ikdam* (surat kabar yang diterbitkan di Istanbul) bahwa:

Tugas terpenting dari para konsulat Utsmaniyah ialah memperkuat ikatan diantara orang-orang Islam dimanapun mereka berada, para konsuler tersebut haruslah merupakan orang yang beragama, sebab agama merupakan cara yang esensial untuk memperluas pengaruh Daulah Utsmaniyah di negeri-negeri dengan populasi Muslim.<sup>98</sup>

Hal ini tentu akan menjadi hal yang akan sangat ditakuti oleh kaum Kolonialis Eropa, sebagaimana perkataan Isaac van de Putte, seorang menteri urusan jajahan Belanda yang mengatakan “Para konsulat Daulah Utsmaniyah dapat membangkitkan fanatisme yang penuh dendam dan mudah terbakar di kalangan Muslim Asia Tenggara”.<sup>99</sup>

### C. Pembangunan Sistem Transportasi

Pembangunan jalur kereta api di wilayah Hijaz merupakan aspek

<sup>97</sup> Nicho Pandawa, *Khilafah*, 159

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Ibid., 76

penting dari visi strategis Sultan Abdul Hamid II yang bertujuan mewujudkan agenda politik Pan-Islamisme. Dimulai pada bulan Mei 1900 M, proyek kereta api Damaskus ke Madinah mempunyai dampak yang signifikan. Hal ini bertujuan untuk menggantikan perjalanan darat yang sulit, yang biasanya memakan waktu sekitar 40 hari, dengan waktu perjalanan yang jauh lebih cepat, yaitu hanya 12 hari. Transformasi transportasi ini tidak hanya memfasilitasi ibadah haji bagi umat Islam taat yang melakukan perjalanan ke Baitullah, Mekah, dan Madinah, tetapi juga menyulut semangat keagamaan yang kuat di antara mereka.<sup>100</sup>

Selain itu, jalur kereta api mempunyai banyak tujuan, memperluas jangkauannya lebih dari sekedar efisiensi logistik. Pembangunannya memupuk hubungan nyata antara wilayah-wilayah yang berjauhan di wilayah Kesultanan Utsmaniyah, sehingga meningkatkan pengawasan administratif dan keamanan di wilayah tersebut. Wilayah ini bertindak sebagai benteng strategis melawan potensi pemberontakan, dan menawarkan cara untuk dengan cepat memperkuat otoritas Utsmaniyah di seluruh wilayahnya. Pesatnya perluasan infrastruktur perkeretaapian juga memainkan peran penting dalam konsolidasi dan proyeksi kekuatan Utsmaniyah di seluruh wilayah pedalaman, yang menggarisbawahi pentingnya hal tersebut dalam memajukan cita-cita Pan-Islamis.

Proyek kereta api Hijaz membawa makna simbolis dan sentimental yang mendalam di kalangan Islam. Para cendekiawan secara luas mengakui

---

<sup>100</sup> Rizka Kusuma Rahmawati, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M)", dalam *Jurnal Juspi*, Vol. 1, No. 1, (2017), 207

hal ini sebagai perwujudan utama aspirasi Pan-Islamis Sultan Abdul Hamid II, mengingat seruannya yang berapi-api kepada umat Islam di seluruh dunia untuk berkontribusi dalam mewujudkan hal tersebut. Sultan sendiri yang memprakarsai upaya ini dengan menjanjikan sumber daya pribadi dan negara dalam jumlah besar, seperti sumbangannya sebesar 50.000 koin emas dari kasnya sendiri dan tambahan 100.000 koin emas dari perbendaharaan Negara Utsmani.<sup>101</sup>

Pendanaan untuk proyek ini tidak hanya terbatas pada kas negara, namun juga didukung oleh kontribusi umat Islam di berbagai wilayah geografis. Individu dan entitas, seperti penguasa Mesir Ahmad Pasha Al-Masynawi dan media terkemuka seperti surat kabar 'Al-Liwa' dan Al-Muayyid di Mesir, memberikan contoh dukungan yang lebih luas ini dengan menyumbangkan 3.000 Lira Utsmani untuk pengembangan jalur kereta api. Dukungan finansial dan moral yang luas ini menggarisbawahi komitmen global di kalangan umat Islam untuk berpartisipasi aktif dan memperjuangkan keberhasilan inisiatif perkeretaapian transformatif ini.

Permulaan dan realisasi proyek kereta api di Hijaz ditandai dengan kolaborasi internasional yang signifikan, dimana arsitek dan pemodal asing memainkan peran penting. Keterlibatan negara-negara Barat seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan Austria menggarisbawahi kepentingan global dalam upaya transformatif ini.

Akar dari proyek ini dimulai pada tahun 1830 M ketika Inggris

---

<sup>101</sup> Zulhelman Roslan & Ermy Azziaty Rozali, "Polisi Pan-Islamisme semasa Pemerintahan Sultan 'Abd al-Hamid II (1876-1909M)", dalam *Jurnal Islamiyyat* Vol, 39 No. 1, (2017), 79

mengusulkan pendanaan untuk pembangunan kereta api. Meskipun awalnya berfokus pada rute dari Mediterania Timur ke Teluk Persia melalui Tanjong, sebuah proposal yang kemudian diterima Inggris, pecahnya Perang Krimea pada tahun 1854 Mlah yang memicu keterlibatan aliansi Prancis-Inggris dalam membiayai pembangunan jalur kereta api. Terlepas dari diskusi awal ini, konstruksi sebenarnya baru dimulai pada tahun 1888 M, dengan Austria muncul sebagai pemasok utama material perkeretaapian.

Masuknya Jerman ke dalam proyek ini menandai perubahan yang signifikan. Dengan mengusulkan rute dari pantai Mediterania melalui Laut Mati ke Damaskus melalui Yerusalem, Jerman berupaya memanfaatkan potensi strategis dan ekonomi jalur kereta api. Namun, proyek tersebut menghadapi kemunduran karena kondisi keuangan Negara Utsmani yang genting, sehingga menyebabkan penundaan. Tidak terpengaruh, Jerman memulai upaya pemasangan rel yang diarahkan ke Bagdad, Suriah, dan Palestina.

Pemerintahan Sultan Abdul Hamid II menandai titik balik, ketika ia memanfaatkan investasi ekonomi dan militer dari negara-negara Barat seperti Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, Italia, dan Austro-Hongaria untuk mempercepat pembangunan kereta api. Kemitraan erat Jerman dengan Utsmani selama periode ini mencerminkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan, yang mencapai puncaknya pada kemajuan substansial meskipun terdapat tantangan.

Tenaga kerja dan sumber pendanaan proyek berkembang seiring

berjalannya waktu. Pada tahun 1907 M, tenaga kerja terdiri dari 75.000 pekerja dari wilayah Utsmani, yang merupakan bukti skala dan keterlibatan lokal dalam proyek tersebut. Biaya yang berjumlah 4.283.000 Lira Utsmani menunjukkan efisiensi ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya lokal dibandingkan dengan kontrak luar negeri.

Penyelesaian jalur kereta api ke Madinah pada bulan Agustus 1908 M menandai tonggak sejarah transportasi. Namun, rencana untuk memperluas jalur ke Mekah mendapat tentangan dari Husain Ibn Ali, penguasa Mekah, karena masalah politik. Meski begitu, perjalanan kereta api perdana dari Damaskus ke Madinah pada 22 Agustus 1908 M, menempuh jarak 814 mil hanya dalam waktu 3 hari, melambangkan terwujudnya impian lama umat Islam secara global, yaitu mempermudah akses menunaikan ibadah haji.

Saat ini, bekas stasiun Medina berfungsi sebagai museum di dekat Masjid Nabawi yang ikonik, melestarikan warisan proyek kereta api Hijaz dan dampaknya terhadap transportasi dan konektivitas keagamaan di wilayah tersebut.<sup>102</sup>

#### **D. Kampanye Memajukan Pendidikan**

Kampanye Sultan Abdul Hamid II untuk membentuk kembali pendidikan berasal dari respons strategis terhadap pelanggaran ideologi Barat dan sentimen nasionalis dalam sistem pendidikan Utsmani. Menyadari

---

<sup>102</sup> Siti Aliya, Rahma Nur Falah, dkk., “Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri Yang Diterapkan Oleh Sultan Abdul Hamid II Di Dinasti Osmani (1876-1909 M)”, dalam *Jurnal KHazanah Multidisiplin* Vol, 2 No. 2, (2021), 125

pengaruh arus ini dan potensinya untuk melemahkan nilai-nilai Islam, Sultan melakukan intervensi tegas untuk menyelaraskan kembali prioritas pendidikan menuju kerangka yang berakar pada studi Islam. Dorongan untuk perubahan ini dapat ditelusuri kembali ke peristiwa-peristiwa penting seperti perang melawan Italia, yang mengungkapkan adanya tekanan eksternal yang bertujuan untuk menundukkan Negara Utsmani, termasuk melalui upaya kolonisasi pendidikan. Inisiatif Italia untuk mendirikan sekolah dan lembaga sosial di wilayah Utsmani menggarisbawahi konflik budaya dan ideologi yang lebih luas yang sedang terjadi. Untuk menjaga terhadap infiltrasi ide-ide nasionalis dan Barat-sentris, Sultan Abdul Hamid II memberlakukan serangkaian kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memupuk persatuan dan ketahanan Islam:

1. Pemisahan Kurikulum: Aspek mendasarnya adalah pemisahan materi yang mempromosikan nasionalisme asing atau ideologi non-Islam dari kurikulum inti. Mata pelajaran seperti sejarah umum dan sastra, yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pelajar Muslim, secara hati-hati dibedakan dan diminimalkan.
2. Fokus pada Studi Islam: Penekanan ditempatkan pada penggabungan fiqh (yurisprudensi Islam), ajaran moral, dan studi interpretatif sebagai pilar utama kurikulum. Mata pelajaran ini menjadi terkenal, selaras dengan visi Sultan untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kerangka pendidikan.

3. Membatasi Fokus Sejarah: Dalam bidang pendidikan sejarah, pedoman ketat ditetapkan untuk membatasi studi hanya pada sejarah Islam, termasuk kekayaan narasi sejarah Kekaisaran Utsmani. Dengan mempersempit ruang lingkup eksplorasi sejarah, Sultan Abdul Hamid II bertujuan untuk memperkuat rasa kesinambungan budaya dan sejarah yang berakar pada warisan Islam.<sup>103</sup>

Reformasi pendidikan ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi diterapkan secara ketat di seluruh sekolah di bawah lingkup Sultan Abdul Hamid II. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan generasi terpelajar yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, mampu menghadapi tantangan dunia yang terus berubah sambil menjaga esensi identitas dan persatuan Islam. Sikap proaktif Sultan dalam masalah pendidikan mencerminkan strategi pelestarian budaya yang lebih luas dan perlawanan terhadap pengaruh eksternal yang berupaya melemahkan etos Islam di wilayah Utsmani. Kampanye untuk memajukan pendidikan sebagai benteng nilai-nilai Islam merupakan bukti visi dan komitmen Sultan Abdul Hamid II untuk menjaga warisan Utsmani di tengah perubahan paradigma global.

Upaya Sultan Abdul Hamid II di bidang pendidikan ditandai dengan visi komprehensif dan ambisius yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan Islam dan mendorong pertumbuhan intelektual di seluruh Kesultanan Utsmani. Inti dari reformasi pendidikannya adalah memprioritaskan Al-Qur'an sebagai materi kurikulum mendasar, yang

---

<sup>103</sup> Lukman Al-Hakim, "Sejarah Jaringan Sekularisme, 120

mencerminkan komitmennya untuk menanamkan nilai-nilai Islam sebagai inti pendidikan. Upaya Sultan tidak hanya sekedar retorika, tetapi juga diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran dan perluasan kelembagaan di berbagai wilayah. Di Istanbul, ia memelopori pendirian 355 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta, menandai lompatan signifikan dalam aksesibilitas pendidikan di ibu kota kekaisaran. Tren perkembangan pendidikan yang pesat ini bergema di seluruh Anatolia, dimana jaringan sekolah berkembang di bawah naungan Sultan Abdul Hamid II. Sekilas tentang warisan pendidikannya mengungkapkan betapa besar pengaruhnya: di Aydin, 1.379 sekolah didirikan; di Kastamonu muncul 885 sekolah dasar dan 56 sekolah negeri, ditambah 1.406 sekolah swasta; dan di Canakkale, infrastruktur pendidikan yang kuat yang terdiri dari 400 sekolah dasar telah terbentuk. Selain itu, kota-kota besar seperti Ankara, Konya, Diyarbakir, Sivas, Izmit, dan Erzurum mengalami lonjakan jumlah institusi pendidikan, masing-masing memiliki lebih dari 200 sekolah dasar, dan Erzurum sendiri menampung lebih dari 100 sekolah serupa. Jejak pendidikan Sultan Abdul Hamid II bahkan meluas ke wilayah seperti Kosovo dan Manatsir di Balkan, tempat sekolah dasar berkembang biak sebagai bagian dari reformasi pendidikannya.<sup>104</sup>

Selain pendidikan dasar, visi Sultan Abdul Hamid II mencakup institusi pendidikan tinggi, yang mengarah pada pendirian universitas dan perguruan tinggi bergengsi. Universitas Istanbul berdiri sebagai mercusuar

---

<sup>104</sup> Mukarom, "Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Utsmani 1300-1922 M", dalam *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1, No. 1, (2015), 117

dari visi ini, yang didirikan antara tahun 1878 dan 1900 M, berfungsi sebagai pusat bagi mahasiswa dari negara-negara Arab yang belajar di Istanbul. Pendirian perguruan tinggi khusus seperti Fakultas Hukum, Fakultas Keuangan, Fakultas Seni, Fakultas Teknik, Fakultas Niaga, Fakultas Kepolisian, Fakultas Kedokteran Hewan, dan lain-lain menggarisbawahi komitmen Sultan dalam menyediakan jalur pendidikan yang beragam dan profesional.

Tujuan strategis di balik inisiatif pendidikan ini bukan hanya untuk menyebarkan pengetahuan tetapi juga untuk menumbuhkan rasa keingintahuan intelektual, tanggung jawab sipil, dan kesetiaan kepada Khilafah di kalangan siswa. Warisan Sultan Abdul Hamid II di bidang pendidikan tetap menjadi bukti pandangan ke depan, dedikasinya, dan pengaruhnya yang abadi dalam membentuk lanskap intelektual Kesultanan Utsmani dan sekitarnya.

Ketentuan pendidikan bagi pelajar Arab yang belajar di Istanbul di bawah naungan Sultan Abdul Hamid II tidak hanya komprehensif tetapi juga menyoroti komitmen Sultan untuk membina generasi yang menguasai prinsip-prinsip Islam dan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Ketentuan-ketentuan ini melampaui kurikulum akademis dan mencakup dukungan praktis, seperti liburan yang diberikan kepada siswa selama studi lima tahun mereka, dan pemerintah menanggung biaya keperluan mereka. Sekolah-sekolah Sultan Abdul Hamid II dirancang dengan cermat untuk memberikan siswa pemahaman mendalam tentang

ajaran Islam sekaligus menggabungkan beragam mata pelajaran untuk mendorong perkembangan yang menyeluruh. Sekilas tentang kurikulum sekolah bahasa Arab di Istanbul, yang disusun oleh Sultan Abdul Hamid II, mengungkapkan perkembangan pembelajaran yang terstruktur:

1. Tahun Pertama: Kurikulum dimulai dengan fokus dasar pada Alquran, ilmu agama, tajwid (aturan pembacaan Alquran), imla' (ortografi Arab), bacaan Turki, dan pelatihan militer. Perpaduan antara pendidikan agama dan praktik ini menjadi landasan yang kuat untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Tahun Kedua: Berdasarkan elemen dasar, tahun kedua memperluas cakupannya hingga mencakup studi Alquran, ilmu agama, tajwid, imla', bacaan Turki, matematika, kaligrafi, dan pelatihan militer lanjutan. Perluasan mata pelajaran ini memperkenalkan siswa pada beragam bidang pembelajaran sambil mempertahankan penekanan kuat pada pendidikan agama.
3. Tahun Ketiga: Kurikulum dikembangkan untuk mencakup studi Alquran, ilmu agama, tajwid, imla', kaligrafi, geografi, bahasa Prancis, dan pelatihan militer berkelanjutan. Penambahan bahasa asing dan kajian geografi mencerminkan cakrawala pendidikan yang lebih luas dengan tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam.
4. Tahun Keempat: Maju lebih jauh, tahun keempat mendalami kajian Al-Qur'an, ilmu agama, tajwid, ilmu Sharaf (morfologi) Arab, bahasa Persia, geografi, bahasa Perancis, kaligrafi, matematika, dan pelatihan

militer. Kurikulum komprehensif ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan linguistik, sejarah, dan matematika di samping pendidikan agama mereka.

5. Tahun Kelima: Tahun terakhir studi meliputi studi Alquran, studi agama, pengajian, tata bahasa Arab, bahasa Persia, geografi, sejarah Negara Utsmani, kaligrafi, kemahiran bahasa Turki, pengetahuan umum, ilmu kesehatan, bahasa Perancis dan kaligrafi, arsitektur, matematika, dan pelatihan militer lanjutan. Pendekatan holistik ini merangkum spektrum disiplin ilmu yang luas, memastikan siswa dipersiapkan dengan baik untuk upaya akademis, profesional, dan sipil.<sup>105</sup>

Dalam strategi menyebarkan kebijakan Pan-Islamismenya di bidang pendidikan, Sultan Abdul Hamid II juga memberikan perhatian pada kaum wanita dalam upayanya mendirikan sekolah guru-guru wanita yang memisahkan antara kaum wanita dengan laki-laki. Mengenai hal ini Sultan Abdul Hamid mengatakan dalam catatan hariannya mengenai adab dilarangnya percampuran antara pria dan Wanita didalam 1 bangunan pendidikan:

Jika saya adalah musuh akal dan ilmu pengetahuan, maka apakah saya akan membuka perguruan tinggi? Jika saya adalah musuh ilmu pengetahuan, maka apakah saya akan membuat bangunan untuk kaum Wanita sehingga mereka tidak akan berkumpul dengan kaum laki-laki dan membangun sekolah bagi guru-guru wanita?<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Luqman Al-Hakim, "Sejarah Jaringan Sekularisme, 121-122

<sup>106</sup> Ibid., 123

Inisiatif Sultan Abdul Hamid II tidak hanya mencakup reformasi pendidikan, tetapi juga mencakup peraturan sosial dan budaya, terutama mengenai pakaian dan peran perempuan di Kesultanan Utsmaniyah. Inti dari keprihatinannya adalah masalah pakaian perempuan, khususnya hijab, yang ia atasi melalui langkah-langkah regulasi.

Sultan menerapkan peraturan yang melarang perempuan mengenakan jilbab di wilayah Negara Utsmani. Keputusan ini disertai dengan pernyataan publik yang menekankan pentingnya mematuhi hukum Islam terkait pakaian wanita. Untuk memberikan bobot hukum pada peraturan ini, Sultan Abdul Hamid II mengeluarkan keputusan pemerintah yang mewajibkan penegakan hukum secara tegas oleh pihak kepolisian dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Alasan dibalik peraturan ini mempunyai banyak segi. Di satu sisi, Sultan Abdul Hamid II memandang langkah-langkah ini sebagai sarana untuk mempromosikan pendidikan perempuan. Dengan melarang penggunaan jilbab di ruang publik, ia bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan dan pengembangan profesional perempuan. Sultan memimpikan masa depan dimana perempuan terpelajar, termasuk guru, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pendidikan generasi muda, khususnya di kalangan siswa perempuan.

Selain itu, pendirian Sultan Abdul Hamid II terhadap pakaian dan peran perempuan dipengaruhi oleh pandangannya tentang peran gender dan norma-norma masyarakat. Ia percaya bahwa perempuan, meskipun berperan

penting dalam mendidik generasi masa depan, tidak boleh terlibat dalam urusan negara atau menyampaikan pendapat mengenai masalah politik. Perspektif ini berakar pada keyakinannya bahwa gagasan kesetaraan gender, seperti yang disebarkan dalam ideologi Barat, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tradisi masyarakat yang lazim di Kekaisaran Utsmani.

Strategi Sultan yang lebih luas tidak hanya mencakup reformasi pendidikan tetapi juga pedoman sosial dan budaya yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dan norma-norma masyarakat. Upayanya untuk mendirikan ruang pendidikan terpisah bagi laki-laki dan perempuan, serta peraturan tentang pakaian dan perilaku publik, merupakan bagian dari visi yang lebih luas untuk memupuk persatuan di kalangan umat Islam di bawah panji Pan-Islamisme.

Langkah-langkah ini, meski kontroversial dalam wacana kontemporer, mencerminkan pendekatan rumit Sultan Abdul Hamid II terhadap pemerintahan, memadukan nilai-nilai tradisional dengan upaya modernisasi dalam kerangka prinsip-prinsip Islam dan aspirasi Pan-Islam.<sup>107</sup>

#### **E. Strategi Memajukan Ekonomi**

Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, Kesultanan Utsmaniyah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan yang ditandai dengan defisit pembayaran utang. Kerentanan finansial ini menarik tindakan oportunistik dari Rusia, yang memulai konflik dengan Kesultanan

---

<sup>107</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Daulah Utsmaniyah Faktor-Faktor dan Sebab-Sebab Keruntuhannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 753

Utsmaniyah pada tahun 1877. Periode ini ditandai dengan kemerosotan ekonomi Kesultanan Utsmaniyah, sehingga tidak siap mempertahankan wilayahnya. Perjanjian San Stefano yang dihasilkan membuat Kekaisaran Utsmani menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia, sehingga memperburuk kekhawatiran negara-negara Eropa mengenai potensi konflik yang lebih luas.

Menanggapi perkembangan ini, Jerman mengatur pertemuan diplomatik yang melibatkan Turki Utsmani, Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya. Upaya diplomatik ini mencapai puncaknya pada Perjanjian Berlin, yang secara efektif membatalkan Perjanjian San Stefano. Perjanjian baru tersebut memungkinkan pengembalian sebagian wilayah Utsmani dari Rusia dan bertujuan memulihkan perdamaian di Eropa. Namun, resolusi ini harus dibayar mahal—pemerintah Utsmani harus menyetujui kapitulasi ekonomi, menyerahkan kedaulatan ekonominya kepada negara-negara Eropa.<sup>108</sup>

Dampak dari peristiwa-peristiwa ini menggarisbawahi rumitnya keseimbangan kekuasaan dan diplomasi yang membentuk Eropa dan Timur Tengah pada era ini. Manuver strategis dan kompromi yang dilakukan menyoroti interaksi yang kompleks antara kepentingan ekonomi, ambisi teritorial, dan upaya mencapai stabilitas regional.

Kesultanan Utsmaniyah memulai serangkaian reformasi dan inisiatif ekonomi signifikan yang bertujuan mengelola utang dan memodernisasi lembaga keuangannya pada akhir abad ke-19. Menghadapi hutang yang

---

<sup>108</sup> Anwar Firdaus Mutawally, A Toto Suryana Afriatin, dkk, “Kemunculan Perbankan Modern dan Peranannya dalam Perekonomian Menjelang Keruntuhan Turki Utsmani (1847-1923)”, dalam *Journal of History, Culture and Islamic Civilization* Vol, 4 No.1, (2023), 21

semakin besar, pemerintahan Utsmani melakukan negosiasi dengan kreditor dan badan keuangan internasional, seperti Bank of England (BIO), untuk mendapatkan pinjaman dalam dan luar negeri.

Dalam perundingan tersebut, dicapai kesepakatan penting dimana pemerintah Utsmani berkomitmen untuk menyerahkan kendali atas sumber pendapatan tertentu, termasuk bea cukai, perikanan, sutra, garam, tembakau, dan pajak lainnya, untuk dikelola oleh kreditor dan BIO. Alternatifnya, pemerintah akan mengalokasikan seperlima dari pajak tersebut untuk pembayaran utang. Pengaturan ini, meskipun pada awalnya ditanggapi dengan skeptis, namun terbukti efektif dalam mengurangi beban utang yang sangat besar. Melalui pengelolaan fiskal yang cermat dan kebijakan ekonomi yang hati-hati, utang dalam negeri berkurang secara signifikan dari tiga ratus juta Lira yang mengkhawatirkan menjadi tiga puluh juta Lira yang dapat dikelola dalam waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan keberhasilan ini, pemerintah Utsmani memulai diskusi lebih lanjut dengan kreditor pada tahun 1880 untuk menetapkan pendekatan terstruktur terhadap pembayaran utang. Negosiasi ini membuka jalan bagi keputusan kebijakan penting oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1881. Di bawah kepemimpinannya, Dekrit Muharram diratifikasi, meresmikan pembentukan Administrasi Utang Publik Utsmani (OPDA). Lembaga ini, diawasi oleh konsorsium investor perbankan Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Austria, Italia, dan Utsmani, memainkan peran penting dalam mengelola dan membayar kewajiban utang luar negeri Kesultanan Utsmani.

Selain itu, menyadari pentingnya pembangunan pertanian dan inklusivitas keuangan, pemerintah Utsmani mengambil langkah perintis dengan mendirikan Ziraat Bank (Bank Pertanian Turki) pada tahun 1888. Berbeda dengan lembaga keuangan sebelumnya yang sangat bergantung pada intervensi asing, Ziraat Bank didirikan secara independen untuk menyediakan dana, kredit dan modal yang dapat diakses oleh petani di seluruh kekaisaran. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, memberdayakan masyarakat pedesaan, dan memperkuat sektor pertanian, yang penting bagi stabilitas ekonomi kekaisaran.

Dampak Bank Ziraat tidak hanya mencakup keuangan pedesaan. Khususnya, selama proyek pembangunan kereta api ambisius yang menghubungkan Istanbul ke Mekah pada tahun 1890-an, Sultan Abdul Hamid II memanfaatkan sumber daya Bank Ziraat. Dengan alokasi strategis sebesar 100.000 Lira Utsmani dari dana bank, Sultan memfasilitasi pembangunan jalur transportasi penting ini, yang menunjukkan peran bank sebagai katalis bagi pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi.

Inisiatif-inisiatif ini secara kolektif mencerminkan periode transformatif dalam sejarah ekonomi Utsmani, yang ditandai dengan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi tantangan utang, meningkatkan infrastruktur keuangan, meningkatkan kesejahteraan pertanian, dan mendorong investasi strategis di sektor-sektor penting seperti transportasi. Pembentukan lembaga-lembaga seperti OPDA dan Bank Ziraat merupakan

contoh perpaduan inovasi dalam negeri dan kerja sama internasional yang menandai jalan Kesultanan Utsmaniyah menuju ketahanan ekonomi dan modernisasi pada akhir abad ke-19.<sup>109</sup>

Dekret Muharram menandai momen penting dalam lanskap ekonomi dan politik Kesultanan Utsmaniyah, khususnya mengenai peran Administrasi Utang Umum Utsmaniyah (OPDA) di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Keputusan tersebut menguraikan tanggung jawab OPDA, menekankan wewenang langsungnya dalam administrasi keuangan, perolehan pinjaman, dan pembayaran utang, semuanya berada di bawah wewenang penuh Sultan. Salah satu mandat penting OPDA adalah monopoli tembakau di wilayah Turki Utsmani. Monopoli ini memiliki dua tujuan: pertama, untuk menghasilkan pendapatan yang penting untuk pengurangan utang, dan kedua, untuk menegaskan kendali atas sektor menguntungkan yang didominasi oleh imigran Muslim Yunani di Mesir. Para imigran ini merupakan angkatan kerja yang signifikan di pabrik-pabrik rokok, sehingga menyoroti dinamika ekonomi dan sosial pada saat itu.<sup>110</sup>

Di luar tujuan ekonominya, pendirian OPDA juga bersinggungan dengan agenda Pan-Islamis Sultan Abdul Hamid II. Ideologi politik ini bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat dunia Islam di bawah Kekhalifahan Utsmani. Keterlibatan OPDA dalam proyek-proyek infrastruktur penting, seperti administrasi perkeretaapian, tidak hanya

---

<sup>109</sup> Anwar Firdaus Mutawally, A Toto Suryana Afriatin, dkk, “Kemunculan Perbankan Modern dan Peranannya dalam Perekonomian Menjelang Keruntuhan Turki Utsmani (1847-1923)”, dalam *Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, Vol, 4 No.1, (2023), 25

<sup>110</sup> Luqman Al-Hakim, “Sejarah Jaringan Sekularisme, 128



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta kajian yang mengacu pada fokus penelitian, pembahasan, dan analisis tentang “Strategi Kebijakan Politik Pan-Islamisme Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan politik Pan-Islamisme di Turki Utsmani pada masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M) merupakan sebuah usaha yang dilakukan Sultan Abdul Hamid II dalam mengatasi berbagai permasalahan di dalam pemerintahan Daulah Utsmaniyah dengan cara mengkampanyekan persatuan umat Islam. Faktor yang melatar belakangi munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ada 2 yakni, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal munculnya kebijakan Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah akibat dari kemuduran pasca kekalahan perang. Sedangkan faktor eksternal dari munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah: Masuknya pemikiran Barat di dalam Daulah Utsmaniyah dan terjadinya penjajahan di wilayah-wilayah Islam.
2. Strategi kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid yang digunakan dalam merealisasikan kebijakan Pan-Islamismenya, diantaranya ialah: 1.) Strategi propaganda media massa 2.) Strategi penyebaran Pan-Islamisme melalui pengiriman konsuler ke berbagai

wilayah-wilayah Muslim yang memang membutuhkan perhatian lebih dengan kondisi yang rawan oleh penyebaran pemikiran Barat. 3.) Pembangunan sistem transportasi 4.) Kampanye memajukan pendidikan dan 5.) Strategi memajukan ekonomi, dengan mendirikan Lembaga *Utsmani Public Debt Administration* (OPDA).

## B. Saran

Sebagai penutup penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dikemukakan bagi para peneliti dan cendekiawan masa depan yang tertarik untuk mendalami lebih dalam mengenai “Kebijakan Politik Pan-Islamis Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M).” Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ruang lingkup penelitian terkait era sejarah penting ini.

1. Upaya Penelitian Lebih Lanjut: Disarankan agar upaya penelitian selanjutnya fokus pada mengatasi keterbatasan dan kesenjangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Misalnya, penyelidikan mendalam terhadap peristiwa atau interaksi sejarah tertentu, seperti pertemuan Sultan Abdul Hamid II dengan tokoh terkemuka seperti Jamaluddin Al-Afghani, dapat memberikan lebih banyak pencerahan mengenai seluk-beluk kebijakan Pan-Islamis pada masa itu. Eksplorasi sumber-sumber primer, termasuk dokumen dan bahan arsip, akan memperkaya narasi dan memberikan analisis yang lebih komprehensif.

2. Kontribusi terhadap Wacana Sejarah: Temuan dan wawasan yang diperoleh dari penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kajian sejarah, khususnya dalam memahami kompleksitas sejarah Kekhalifahan Utsmani. Para sarjana masa depan didorong untuk membangun landasan ini, mengeksplorasi jalan dan tema baru dalam konteks Pan-Islamisme dan dampaknya terhadap berbagai wilayah. Misalnya, menyelidiki pengaruh Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II di wilayah seperti Hindia Belanda dapat mengungkap narasi menarik dan memperluas basis pengetahuan kita.
3. Inspirasi untuk Studi Mendatang: Penelitian ini bertujuan untuk menginspirasi dan menjadi titik referensi bagi para sarjana yang memulai upaya penelitian terkait. Tema-tema seperti penyebaran ideologi Pan-Islamis di lingkungan kolonial memberikan peluang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Penulis dan peneliti masa depan didorong untuk mendalami tema-tema ini, mengambil dari beragam sumber dan perspektif untuk memperkaya pemahaman kita tentang dinamika sejarah dan politik.

Demikianlah penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi wacana akademis dan memberikan wawasan berharga bagi pembaca yang tertarik dengan sejarah Kesultanan Utsmaniyah dan gerakan Pan-Islamis. Menyadari bimbingan dan nikmat Allah SWT, peneliti mengucapkan syukur atas kesempatan untuk mendalami periode sejarah yang penting ini dan menantikan kelanjutan eksplorasi dan perluasan ilmu



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Taufiq. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 2*. Jakarta:PT Ihtiar Baru Van Hoeve
- Ash-Shallabi Ali Muhammad. 2017. *Sejarah Daulah Utsmaniyah, Faktor-Faktor Kebangkitan Dan Sebab Sebab Keruntuhannya*. Jakarta:Ummul Qura
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2003. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Berkowitz, Leonard.1995. *Agresi I: Sebab dan Akibatnya* (Jakarta: Pustaka Binaan Persido)
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- C. Snouck, Hurgronje. 1996. *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*. Jakarta: INIS
- D. E, Lee. 1924. *The Origins of Pan-Islamism. The American Historical Review*. Oxford: Oxford University Press
- Fanani, Achmad. 2012. *Kamus Istilah Populer*. Yogyakarta: Mitra Pelajar
- Faroqhi, Suraiya. 2004. *The Utsmani Empire and The World Around It*. London: Bloomsbury Academic

Hadikusuma, Djarnawi. 2014. *Aliran pembaruan Islam: dari Jamaluddin Al-Afghani hingga KH Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah

Harb, Muhammad. 2013. *Memoar Sultann Abdul Hamid II: Benteng Terakhir Khalifah Utsmani dalam Menghadapi Yahudi-Fremason dan Sekuler Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Hasan, Masudul. 1995. *History of Islam: Classical Period 1206-1900 C.E.* Delhi: Adam Publisher and Distributer

Ilham, Masturi, dkk. 2011. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Imber, Colin. 2012. *Kerajaan Utsmani 1300-1650 Struktur Kekuasaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Inalcik, Halil. 1995. *The Utsmani Empire: The Classical Age 1300-1600*. London: Phoenix

Kuntowijoyo. 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Landau, Jacob M. 2016. *The Hejaz Railway and The Muslim Pilgrimage A Case of Utsmani Political Propaganda*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group

Lilya susanti, Eng. 2016. *Modul Metode Penelitian*. Departemen Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi: Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil

Al-Qur'an, 34:28, Menara Kudus, Kudus

Maksudoglu, Mehmet. 2011. *The Unthold History of Ottoman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

- Al-Nahbani, Taqi al-Din. 2006. *Daulah Islam*. (Jakarta: HTI Press)
- Al-Nahbani, Taqi al-Din. 2002. *Al-Dawlah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Nasution, Syamruddin. 2013. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau
- Pandawa, Nicho. 2021. *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda*. Bogor: Komunitas Literasi Islam
- Peacock, Andrew. 2015. *From Anatolia to Aceh*. Oxford University Press
- Rusli, Ris'an. 2013. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saefi Agus Ahmad. 2017. *Sosiologi Islam Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Supriyadi, Dedi. 2016. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Syafii, Antonio. 2012. *Ensiklopedia Peradaban Islam*. Jakarta: Tazkiya Publishing
- Taqiyuddin, An-Nahbani. 2014. *Keperibadian Islam (al-Syakhsiyyah al-Islamiyyah)*. Jakarta: Hizbut Tahrir
- Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Peradaban Islam, Edisi I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

## JURNAL

- Alia, Siti. Falah, Rayma Nu. Dkk. 2021. “Studi Historis Mengenai Kebijakan Luar Negeri Yang Diterapkan Oleh Sultan Abdul Hamid II Di Dinasti Osmani (1876- 1909 M)”, dalam *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol, 2 No. 2
- AR, Sirojuddin. 2004. “Jamaluddin Al-Afghani, Api Pan-Islamisme dan kegiatan politik”, dalam *Journal of humanities Al-Turas*, Vol, 10 No. 2
- Ashidiqi, Fadlurrahman. 2014. “Problem Doktrin Sekularisme” dalam *Jurnal Kallimah*, Vol. 12, No. 2
- Duriana. 2018. “Pemikiran Politik Turki Utsmani Hingga Masa Modern”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial Islam*, Vol 11, No 2
- Al-Hakim, Lukman. Faiz, Muhammad. 2021. “The Role of The Turkey Sekularization Movement in The Collapse of The Utsmani Empire”, dalam *Jurnal Tasfiah Pemikiran Islam*, Vol.5, No. 1
- Hawi Akmal. 2017. “Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani (Jamal Ad-Din Al-Afghani 1838–1897 M)”, dalam *Jurnal Studi Islam* Vol, 13 No. 1
- Kamaruddin. 2015. “Pemikiran politik Ibnu Khadun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik”, dalam *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, Vol, 16, No. 2
- Kurniawan, Ahmad Salman. Hadi, Nurfitri. 2022. “Pengaruh Pan Islamisme Bagi Kekhilafahan Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II” dalam *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 2 No. 2
- Mukarom. 2015. “Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Utsmani 1300-1922 M”, dalam *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1, No. 1

- Mutawally, Anwar Firdaus. Afriatin, A Toto Suryana. Dkk. 2023. “Kemunculan Perbankan Modern dan Perannya dalam Perekonomian Menjelang Keruntuhan Turki Utsmani (1847-1923)”, dalam *Journal of History, Culture and Islamic Civilization* Vol, 4 No.1
- Nurfazillah, 2020. “Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam”, dalam *Journal of Government and Social Science*, Vol. 6, No. 1, Oktober
- Nurtina, Siti. 2019. “The Dynamics of Applying Pan-Islamism As A New Politic Concept”, dalam *Journal Islamic Word And Politics*, Vol. 3, No. 1 January-June
- Purwati, Hanik. Mustafa, Khairil. 2020. “Sejarah Dan Transformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme”, dalam *Jurnal Tamaddun*, Vol 10, No.1, Juli
- Putri. 2013. “Pengaruh Pan Islamisme Terhadap Kehidupan Bangsa Mesir Tahun 1897-1922”, dalam *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*
- R. K, Rahmawati. 2017. “Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II Di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M)”, dalam *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol, 1 No. 1
- Roslan, Zulhelman. Rozali, Ermy Azziaty. 2017. “Polisi Pan-Islamisme semasa Pemerintahan Sultan ‘Abd al-Hamid II (1876-1909M)”, dalam *Jurnal Islamiyyat*, Vol, 39 No. 1
- Sholikah, Ismail. 2019. “Pemikiran politik Ibnu Kholdun (732 H-808 H/1332-1406 M)”, dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol, 9, No. 1
- Sirait, Arbi Mulya, “Jamaluddin Al-Afghani dan Karir Politiknya. Intelektual”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol, 10 No. 2

Somad, Abdul. 2015. “Pemikiran Dan Pergerakan Pan-Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol, 1 No. 1

Supratman, Frial Ramadhan. 2019. “Surat Kabar Basiret: Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo”, dalam *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol, 15 No. 1 2019

Toana, AA. 2018. “Kepemimpinan Situasional Dalam Kebijakan Publik”, dalam *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol, 1 No. 2

Waginugroho, Septian Anto. 2023. “Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924-1927”, dalam *Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1

Zallum, Abdul Qadim.1943. “Pemikiran Politik Islam “The Treaty of Paris and Turkey’s Status in International Law”, dalam *Journal of International Law*, Vol. 37, No. 2

**SKRIPSI** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Al-Hakim, Lukman. “Sejarah Jaringan Sekularisme Di Dalam Tubuh Khalifah Turki Utsmani Pada Masa Sultan Abdul Hamid II Pada Tahun 1876-1909 M”. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2020.

Mawarti, I’in Sayyi. “Gagasan Pan-Islamisme dan Upaya Sultan Abdul Hamid II Mempertahankan Kekhilafahan Turki Utsmani Tahun 1876-1909.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Nur Alam, Dela Melisa. “Pan-Islamisme Jamaluddin Al Afghani Dalam Perspektif Politik Islam.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Rahmawati, Rizka Kusuma. “Studi Historis Kebijakan Politik Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Sutrisno. “Konsep Pan-Islamisme Menurut Jamaluddin Al-Afghani”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Trisakti, Muhammad Nicho Pandawa. “Pasang Dan Surut Pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah Terhadap Hindia Belanda 1882-1928”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020

## INTERNET

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. “Syarh Fath al-Qarib a-Mujib.” Diakses pada 7 Juli 2023 <https://onesearch.id/Record/IOS17064.25077/>

[http://www.bagcilar.bel.tr/Files/eKitap/siratimustakim\\_sebiluresad/turkce/cilt\\_11.pdf](http://www.bagcilar.bel.tr/Files/eKitap/siratimustakim_sebiluresad/turkce/cilt_11.pdf) Diakses pada 28 Februari 2024

[http://www.britishmuseum.org/explore/themes/hajj/the\\_journey/routes/the\\_Utsmani\\_route/hijaz\\_railway.aspx](http://www.britishmuseum.org/explore/themes/hajj/the_journey/routes/the_Utsmani_route/hijaz_railway.aspx) Diakses pada 09 Februari 2024

[https://nabataea.net/travel/info/the-hejaz-railway/?utm\\_campaign=nab\\_recommender&utm\\_medium=web&utm\\_content=TIN7\\_same\\_branch](https://nabataea.net/travel/info/the-hejaz-railway/?utm_campaign=nab_recommender&utm_medium=web&utm_content=TIN7_same_branch) Diakses pada 07 Maret 2024

<https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Galeri.aspx> Diakses pada 01 Juni 2024

[https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Congr%C3%A8s\\_de\\_Paris\\_1856/1005278](https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Congr%C3%A8s_de_Paris_1856/1005278) Diakses pada 01 Juni 2024

Utsmani imperial archives A Pictorial Look into the history of the Utsmani Empire,  
[https://x.com/UtsmaniArchive/status/1348314803165683714?t=aoN\\_FNtdzKdJ5LZ5JdtmwQ&s=08](https://x.com/UtsmaniArchive/status/1348314803165683714?t=aoN_FNtdzKdJ5LZ5JdtmwQ&s=08), Diakses pada 14 Maret 2024



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Alawiyah  
NIM : 201104040011  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

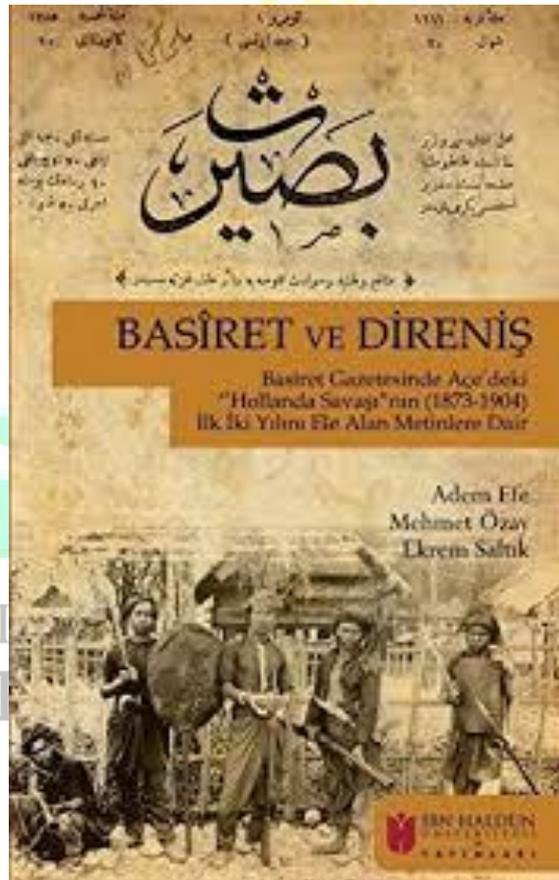
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 April 2024  
Saya yang menyatakan



**Afifah Alawiyah**  
NIM. 201104040011

## ARSIP-ARSIP DALAM PENELITIAN



### Surat Kabar Besiret

Ketaatan dan Perlawanan: Surat Kabar Besiret “Belanda” di Aceh.

Sumber foto :

Frial Ramadhan Supratman, “Surat Kabar Besiret : Melihat Perang Aceh (1873-1904) dari Istanbul dan Kairo”, dalam *Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol. 15, No. 1, (April 2019), 1



Gambar wajah Sultan Abdul Hamid II

Sumber foto:

[https://x.com/UtsmaniArchive/status/1348314803165683714?t=aoN\\_FNtdzKdJ5](https://x.com/UtsmaniArchive/status/1348314803165683714?t=aoN_FNtdzKdJ5)

[LZ5JdtmwQ&s=08](#) (14/03/24)



Surat Kabar Utsmani (Sabilurrsyad) berisi mengenai Muslim Jawa

Sumber foto :

[http://www.bagcilar.bel.tr/Files/eKitap/siratimustakim\\_sebilurresad/turkce/cilt\\_1.pdf](http://www.bagcilar.bel.tr/Files/eKitap/siratimustakim_sebilurresad/turkce/cilt_1.pdf), (28/02/24)



Gambar Rel Kereta Api Hijaz

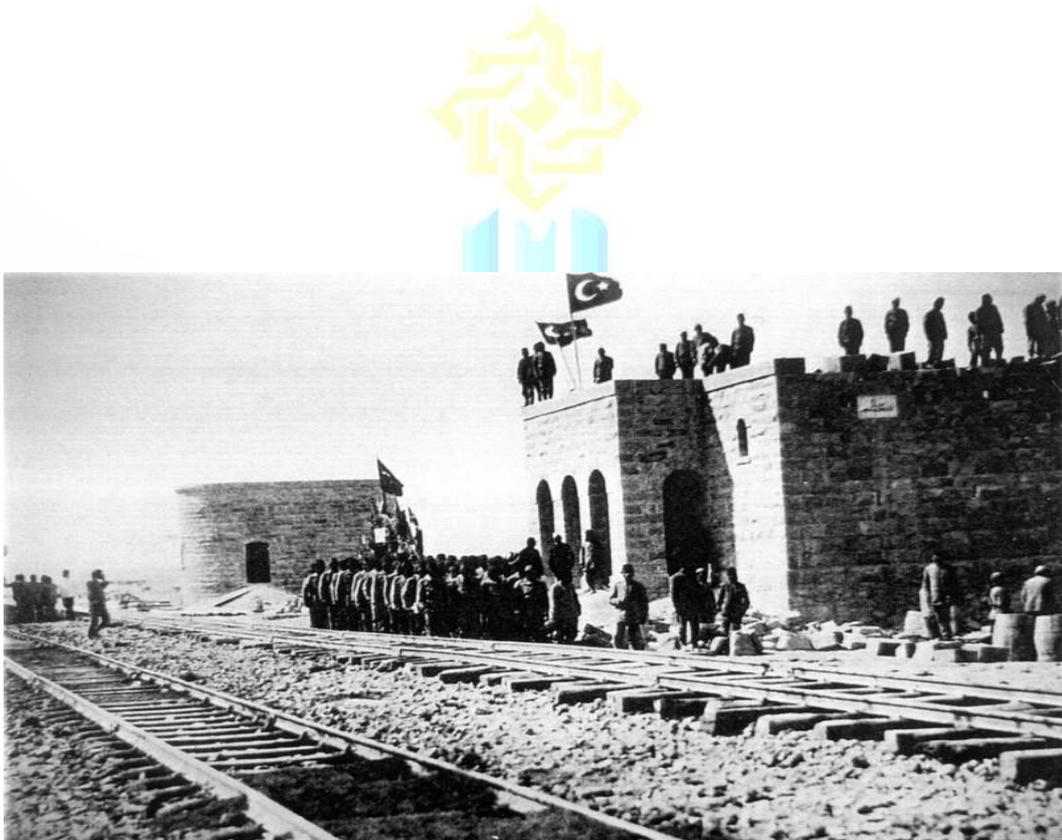
Sumber foto :

[https://nabataea.net/travel/info/the-hejaz-railway/?utm\\_campaign=nab\\_recommender&utm\\_medium=web&utm\\_content=TIN7\\_same\\_branch](https://nabataea.net/travel/info/the-hejaz-railway/?utm_campaign=nab_recommender&utm_medium=web&utm_content=TIN7_same_branch) (07-03-24)



Permintaan dari Konsul Batavia (Mehmed Kamil Bey) agar anak-anak Muslim dari Jawa mendapatkan pendidikan di sekolah Galatassaray

Sumber foto:  
Museum Yunus Emre (Pusat Kebudayaan Turki) Jakarta



J E M B E R

Mu'azzum Station - Railway Hijaz Perjalanan Haji masa Daulah Utsmaniyah

Sumber foto :

[http://www.britishmuseum.org/explore/themes/haji/the\\_journey/routes/the\\_Utsmani\\_route/hijaz\\_railway.aspx](http://www.britishmuseum.org/explore/themes/haji/the_journey/routes/the_Utsmani_route/hijaz_railway.aspx) (09-02-24)



Gambar ilustrasi para pembesar Eropa dan penguasa Utsmaniyah yang hadir dalam perjanjian Paris tahun 1856 M. Dari kiri ke kanan: Vittorio Emanuele II, Raja Sardinia, Victoria, Ratu Inggris, Raya dan Irlandia, Napoleon III, Kaisar Paris, Sultan Abdul Majid I (Sultan Daulah Utsmaniyah), Alexander II, Kaisar Rusia (Friedrich Wilhelm), Raja Prusia (Franz Josef Karl), Raja Austria.

Sumber foto :

[https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Congr%C3%AAs\\_de\\_Paris\\_1856/1005278](https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Congr%C3%AAs_de_Paris_1856/1005278) (01-06-24)



Laporan yang menyebutkan bahwa Sultan Abdul Hamid II meninggal di Istana Beylerbeyi pada 10 Februari 1918 M dan dimakamkan di dekat makam Sultan Mahmud II

Sumber foto :

<https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Galeri.aspx>  
(01-06-24)

## BIOGRAFI PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Afifah Alawiyah  
Tempat/tanggal lahir : Sumenep, 09 September 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Karang Sokon Guluk-Guluk Sumenep  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
NIM : 201104040011  
No. Hp : 082334840474  
Email : afifahalawiyah21@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Karang Sokon
2. MTs Negeri 3 Pamekasan
3. MA. Sumber Bungur Pakong